

KONFLIK AMERIKA SERIKAT (AS) - LIBYA STUDI KASUS MASALAH TERORISM INTERNASIONAL

SKRIPSI



Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat untuk
memperoleh Gelar Sarjana Strata I
Jurusan Hubungan Internasional
Pada
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
Universitas Jember

Oleh :

Harald Budiarto

950910101060

Asli	: Hadiah	S Klas 322/42 BUD K
Terima	: Pembelian	
No. Terima	: 21 JUL 2000 10.2.381	

Pembimbing
Drs. Sjoekron Sjah, SU

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS JEMBER

2000



Motto :

"Dan berilah kabar gembira orang-orang yang sabar, yaitu orang-orang yang apabila ditimpa musibah mereka berkata, "kami kepunyaan Allah dan kepada Allahlah kami akan kembali. Mereka inilah yang mendapat berkat dan rahmat dari Tuhan mereka dan mereka mendapat petunjuk".

(QS. Al Baqarah: 156-157)

Nabi SAW bersabda: "Sesungguhnya besarnya pahala setimbang dengan besarnya cobaan dan kalau Allah Ta'ala mencintai kaum, mereka diuji dengan cobaan. Maka barang siapa yang ridla, baginya keridlaan dan barang siapa yang marah, baginya kemarahan".

Karya tulis ini kupersembahkan kepada :

Yang terhormat dan yang terkasih, **Bapak** dan **Ibu** yang telah memberikan cinta, doa, bimbingan, segenap perjuangan serta pengorbanan yang tiada henti-hentinya untukku.

Dede dan **seluruh keluarga di Yogyakarta**, atas segala doa dan dorongannya.

Guru-guruku, selaku pejuang-pejuang ilmu yang telah banyak memberikan peran dalam kehidupanku.

Saudara-saudaraku, **Mbak Ary** dan **Mas Wahyu** serta si kecil **RM Iqbal A.**, **Mbak Waty** dan **Mas Agus**, dan tak lupa adikku **Agung**, yang telah banyak memberikan dukungan dan doa dengan penuh kasih dan sayang.

Yang tercinta, **calon pendamping hidupku yang sholehah**, atas segala kasih sayang, perhatian dan pengorbananmu yang membuatku bertambah "hidup" selama ini.

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Bismillahirrahmanirrahim

Tiada kata yang paling indah yang sanggup terucapkan selain pujian rasa syukur atas kehadiran Allah SWT yang telah memberikan limpahan rahmat, dalam setiap tarikan nafas kehidupan, serta curahan nikmat berupa kekuatan jasmani dan rohani kepada penulis hingga karya tulis ini dapat terselesaikan.

Penulisan skripsi ini berawal dari keingintahuan penulis tentang konflik Amerika Serikat (AS) – Libya: studi kasus masalah terorisme internasional.

Dalam melaksanakan penulisan skripsi ini memang memakan waktu yang cukup lama, hal ini disadari karena penulis harus menghubungi beberapa instansi yang terkait dengan masalah. Namun syukur alhamdulillah atas pengertian dan kerja sama yang diberikan oleh pihak-pihak yang terkait sehingga penulis dapat menyelesaikan tulisan ini.

"Manusia tidak luput dari kesalahan", itulah kalimat yang tepat yang dapat penulis berikan sehubungan dengan karya tulis ini. Namun sebagai manusia rasional kata sempurna tetap menjadi cita-cita penulis, untuk itu penulis mengharapkan segala kritik yang bersifat membangun dari segala pihak yang terkait demi menambah nilai "sempurna" yang kita harapkan bersama, yang terakhir penulis berharap karya ini dapat memberi manfaat bagi berkembangnya khasanah ilmu pengetahuan pada umumnya dan *"political and sociological scientific"* pada khususnya.

Terima kasih terutama penulis sampaikan kepada :

1. Bapak Drs. Sjoekron Sjah, SU, selaku dosen pembimbing dan Kajar Hubungan Internasional yang telah meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan dan saran yang sangat berharga bagi penulisan skripsi ini;

PENGESAHAN

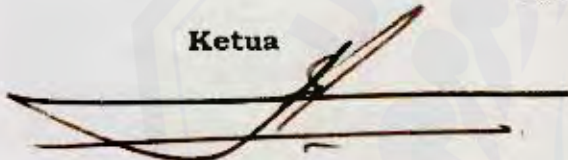
Diterima dan dipertahankan di depan panitia penguji skripsi guna memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar strata satu jurusan Hubungan Internasional pada :

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Jember

Pada hari : Sabtu
Tanggal : 17
Bulan : Juni
Tahun : 2000
Jam : 08.00 - 10.00 WIB

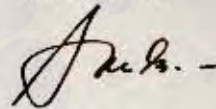
Panitia Penguji

Ketua



Prof. Drs. H. Bariman

Sekretaris



Drs. Sjoekron Sjah, SU

Susunan Anggota Panitia Penguji

1. Prof. Drs. H. Bariman
2. Drs. Sjoekron Sjah, SU
3. Drs. Asrial Aziz
4. Drs. A. Habibullah, Msi



Mengetahui

**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS JEMBER**

Dekan



Prof. Drs. H. Bariman

2. Bapak Drs. A. Habibullah, MSi., selaku asisten dosen pembimbing skripsi yang telah banyak memberikan pengarahan bagi kesempurnaan skripsi ini;
3. Bapak Prof. Drs. H. Bariman, selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik dan juga selaku dosen wali penulis yang banyak membantu kelancaran studi penulis;
4. Segenap Civitas Akademika di Fisip Universitas Jember yang telah ikut mendewasakan penulis selama studi di perguruan tinggi ini;
5. Bapak Soedarso, selaku Kepala Perpustakaan Centre of Strategic and International Study (CSIS) Jakarta;
6. Bapak Wiyono, selaku Kepala Perpustakaan Fisip UGM Yogyakarta;
7. Kepada sahabat-sahabat terbaikku: Nugraha Nusantara, Uwais Al Qarani, Faisol, Dedi, Inunk, Irawan dan Dian yang telah amat sangat membantuku dalam segala hal;
8. Sahabat-sahabatku seperjuangan di HI'95 : Nana, Arin, Rina, Adilah, Irma, double Wahyu, Fika, Eni, Etik, Dyah, Linda, double Rini, Sri, Dewi, Lilik, Reni, Feby, Dini, Windi, Vivin, Ninox, Ita, Julia, Felly, Yurida, Nuning, Elisa, Nunung, Silfi, Yani, Edwan, Agung, Tisna, Mufrani, Teguh, Isal, Exiandi, Pungky, Victor, Dadang, Handi, Muhammad, Yanto, Bagus, dan Wahid terimakasih atas persahabatan dan kerja samanya selama ini, kiranya Allah yang akan membalas segala kebaikan yang telah mereka berikan;
9. Tak lupa kepada adik-adik angkatanku: Elly, Vivin, Agus, Krisna, Diah, Anick (HI '96). Juga Anie, Sari dan Erwin (HI '97). Hari, Dephy', Nuke, adikku Wiwied dan Tina (HI '98) terimakasih atas segalanya;
10. Spesial terimakasihku untuk **Risza Indriasari** yang telah sangat banyak memberikan segala yang aku butuhkan, juga yang telah membantuku untuk menyelesaikan tulisan ini.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Jember, Juni 2000

Penulis

DAFTAR ISI

Halaman

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN MOTTO	ii
HALAMAN PERSEMBAHAN	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI	vii

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Alasan Pemilihan Judul	1
1.2 Ruang Lingkup Permasalahan	3
1.3 Problematika	5
1.4 Kerangka Dasar Teori	7
1.5 Hipotesa	13
1.6 Metode Penelitian	15
1.6.1 Tahap Pengumpulan Data	15
1.6.2 Metode Analisa Data	16
1.7 Metode Pendekatan	17

BAB II TERORISME INTERNASIONAL

2.1 Terorisme, Tujuan dan Terorisme Internasional	20
2.2 Perkembangan Strategi Terorisme	32
2.3 Libya dan Terorisme Internasional	41
2.4 Pandangan AS Terhadap Terorisme Internasional	
Timur Tengah	46
2.4.1 Timur Tengah Secara Umum	46
2.4.2 Timur Tengah Secara Khusus (Libya)	53

BAB III POLITIK LUAR NEGERI AS DAN LIBYA DI TIMUR TENGAH

3.1 Politik Luar Negeri Amerika Serikat (AS) di Timur	
Tengah	57
3.1.1 Membendung Pengaruh Uni Soviet	57

3.1.2 Minyak Sebagai Sumber Kebutuhan Penting ..	64
3.1.3 Israel Sebagai Mitra Utama Amerika Serikat (AS) di Timur Tengah	74
3.2 Politik Luar Negeri Libya di Timur Tengah	80
3.2.1 Naiknya Khadafy Sebagai Tokoh Sentral Libya	80
3.2.2 Khadafy dan Pandangan Politiknya	83
3.2.3 Tujuan dan Hubungan Politik Luar Negeri Libya (Khadafy)	89

BAB IV MASALAH TERORISME INTERNASIONAL DALAM KONFLIK

AS-LIBYA

4.1 Latar Belakang Konflik AS-Libya	96
4.1.1 Peledakan Pesawat Pan Amerika di Lockerbie, Skotlandia	96
4.1.2 Penembakan Dua Pesawat MIG-23 Libya oleh Amerika Serikat	103
4.2 Obsesi Reagan, Bush dan Khadafy	109
4.2.1 Obsesi Ronald Reagan	109
4.2.2 Obsesi George Bush	110
4.2.3 Obsesi Muammar Khadafy	111
4.3 Prospek Perkembangan Penyelesaian Konflik AS – Libya	114

BAB V KESIMPULAN	119
-------------------------------	-----

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Alasan Pemilihan Judul

Pada Maret-April 1992, konflik antara Arab dan Barat memasuki tahap-tahap yang kritis dan berbahaya bagi kestabilan dunia internasional pada umumnya, dan kawasan Timur Tengah pada khususnya. Konflik tersebut, yaitu antara Irak - Amerika Serikat (AS) dan Libya - AS (dalam hal ini AS didukung sepenuhnya oleh Inggris dan Perancis), sebenarnya memang bukan hal yang baru. Konflik Irak - AS seperti diketahui merupakan "kelanjutan" dari Perang Teluk II (Irak-Sekutu, Januari - Februari 1991).

Konflik Libya - AS merupakan "masalah yang tak terselesaikan" yang ditinggalkan mantan Presiden Ronald Reagan. Dalam hal ini, Bush pun belum merasa tenang selama pemimpin Libya Muammar Khadafy masih terus berkuasa. Libya tampaknya menjadi "pekerjaan rumah" yang dilimpahkan Reagan pada Bush. Kendati pada April 1986 Libya sudah dibombardir habis-habisan oleh AS dan Inggris, tetapi ternyata hingga kini Khadafy masih tetap tegar. Hingga saat ini AS masih menganggap Khadafy sebagai "dalang terorisme internasional" yang -- cepat atau lambat -- perlu dimusnahkan. Dengan mengandalkan data-data yang sebenarnya bersifat sangat subyektif dan semena-mena AS dan sekutunya menuduh Libya sebagai "bertanggung jawab" atas meledaknya dua pesawat penumpang sipil. Yaitu, Boeing 747 Pan Am No. 103 yang meledak di atas Lockerbie, Skotlandia (21 Desember 1988) dan menewaskan 270 penumpangnya, serta sebuah pesawat UTA milik Perancis yang meledak di atas Nigeria (1989) yang menewaskan 171 penumpangnya.

Dalam "kasus" Libya ini pun AS kembali memperlambat Dewan Keamanan (DK) PBB untuk menekan Khadafy. Berdasarkan resolusi No. 731, DK - menuntut agar Qadhafi "menyerahkan" enam warga Libya yang oleh AS dan sekutunya didakwa melakukan aksi peledakan kedua pesawat tersebut. Jika Libya menolak tuntutan DK PBB, maka berbagai bentuk sanksi dan embargo akan dikenakan terhadap negara Afrika Utara itu, dan tentu saja AS mempunyai alasan untuk menggunakan

kekuatan militernya. Kendati dalam sidangnya di Kairo (Mesir), 23 Maret 1992 Liga Arab mendesak DK PBB agar menunda pemberlakuan sanksi pada Tripoli, namun kemungkinan serangan militer AS terhadap Libya masih bisa terjadi.

Kasus Libya membuktikan bahwa untuk kesekian kalinya AS, Inggris, dan Perancis berhasil memperalat PBB untuk memojokkan negara lemah yang pembangkang. Seperti diketahui, sejak 15 April 1992, DK PBB -- atas tekanan AS dan sekutunya -- memberlakukan embargo udara dan senjata terhadap Libya, karena pemimpinnya, Kolonel Muammar Khadafy, menolak menyerahkan dua warga Libya ke AS atau Inggris. Dua warga Libya itu, **Lamen Khalifah Fhimah** dan **Abdul Baset Ali**, oleh AS dan Inggris dituduh sebagai pelaku peledakan pesawat Pan Am di atas Lockerbie.

Sebenarnya bukan hal baru kalau Libya, atau tepatnya Khadafy, didakwa berada dibalik kasus-kasus "**terorisme**" internasional. Pada tahun 1986, AS yang juga didukung Inggris, secara membabi buta melancarkan pengeboman ke dua kota Libya, Tripoli dan Benghazi, yang menewaskan anak angkat Khadafy. Serangan AS waktu itu pun didasari dakwaan bahwa Khadafy mendukung aksi terorisme yang menewaskan sejumlah marinir AS di sebuah bar di Jerman.¹ Padahal, sebagaimana terungkap beberapa tahun kemudian, tuduhan AS waktu itu pada hakekatnya tidak lebih dari sekedar kampanye disinformasi yang dilakukan Washington terhadap Libya.

Serangan AS yang dimaksudkan untuk membunuh pemimpin Libya, Muammar Khadafy waktu itu, anehnya, tidak mendapat reaksi dari PBB, kendati jelas-jelas merupakan tindak pelanggaran terhadap kedaulatan sebuah negara merdeka.

Enam tahun kemudian, tepatnya pada tahun 1992, Ronald Reagan telah digantikan oleh George Bush, tetapi daftar yang memasukkan Libya sebagai "**pendukung terorisme internasional**" tampaknya masih terus dipertahankan. Sebagaimana pendahulunya, Bush pun tampak berusaha meneruskan politik agresi AS guna

¹ M. Riza Sibbudi, *Timur Tengah, Dunia Islam dan Hegemoni Amerika*, Pustaka Hidayah, 1997, halaman 90-91

Digital Repository Universitas Jember

mempertahankan posisinya sebagai satu-satunya negara adi kuasa. Keruntuhan Uni Soviet sebagai super power, telah membuat AS semakin menjadi-jadi untuk berusaha memaksakan “tata dunia baru” (**New World Order**) yang, tentu saja, sesuai dengan kehendaknya sendiri.²

Konflik Libya-AS yang paling belakangan, sehubungan dengan kasus peledakan Pan Am dan UTA, menunjukkan secara jelas tanduk AS yang semakin tidak terkontrol. Betapa tidak, AS yang didukung sepenuhnya oleh Inggris dan Perancis, mengaku memiliki bukti-bukti keterlibatan Libya dalam kasus peledakan dua pesawat penumpang sipil itu, tetapi disisi lain justru menolak suatu pengadilan independen atau Mahkamah Internasional. Logikanya, jika AS dan sekutunya benar-benar memiliki bukti semestinya mereka tidak akan menolak suatu pengadilan independen.

Dari uraian diatas dan rasa keingintahuan yang sangat mendalam terhadap permasalahan ini, maka penulis merasa tertarik dan akan mengkaji permasalahan ini dengan judul :

“Konflik Amerika Serikat (AS) - Libya : Studi Kasus Masalah Terorisme Internasional”

1.2 Ruang Lingkup Permasalahan

Pembatasan ruang lingkup pembahasan merupakan hal yang sangat penting didalam penulisan karya ilmiah yang dimaksudkan untuk memperjelas dan mempermudah dalam menganalisa permasalahan secara seksama, terarah, dan sistematis dalam kurun waktu tertentu. Selain itu pembatasan masalah dimaksudkan untuk menghindari kekaburan arti dan pembahasan yang terlalu meluas, mengambang, dan melampaui batas sehingga mengakibatkan berkurangnya bobot ilmiah suatu penulisan.

Seperti yang dikatakan Frankel bahwa pada suatu titik tertentu suatu kejadian historis adalah unik, karena itu semakin luas ruang lingkup studi kita, maka akan semakin sulit untuk membuat pernyataan.³ Dalam hal ini **Kartini Kartono** memberikan penjelasan

² Ibid, halaman 95

³ Joseph Frankel, **Hubungan Internasional**, ANS Sungguh Bersaudara, Jakarta, 1990, hal 20

yang lain tentang pembatasan masalah yang dirumuskan sebagai berikut :

"Pembatasan masalah sangat berkaitan dengan limit waktu, perongkosan, sempitnya waktu, terbatasnya tenaga dan kemampuan intelektual guna menyelidiki semua interrelasi permasalahan".⁴

Berdasarkan pada tujuan diatas, maka dalam karya tulis ini pembatasan yang akan penulis berikan terdiri dari : **(1) Pembatasan Materi; (2) Pembatasan Waktu.**

Pada pembatasan materi, akan diungkapkan konflik yang terjadi antara Libya dengan AS, khususnya dalam masalah terorisme internasional dalam hubungannya dengan kasus peledakan pesawat Pan Am, penembakan dua pesawat jet tempur Libya oleh AS dan tuduhan AS terhadap pembangunan pabrik senjata kimia Libya.

Sebagai gambaran awal, penulis akan membahas tentang latar belakang konflik yang terjadi antara Libya dengan AS. Berikut juga akan dipaparkan upaya yang dilakukan oleh Libya (Khadafy) untuk menghadapi konflik dengan AS tersebut.

Dalam pembatasan waktu, penulis memberikan batasan ruang lingkup pembahasan kajian ini adalah mulai tahun 1986 hingga tahun 1992, serta tahun 1996. Pada tahun 1986 (15 April 1986), dengan mendasarkan terjadi pemboman besar-besaran yang dilancarkan oleh AS dan para sekutunya terhadap dua kota Libya, Tripoli dan Benghazi, yang menewaskan sedikitnya 100 warga sipil Libya. Tahun 1992 (15 April 1992), yaitu pemberlakuan embargo udara dan senjata terhadap Libya yang dilakukan DK-PBB atas tekanan dari AS dan sekutunya. Sementara itu, tahun 1996 untuk melihat perkembangan terakhir dari konflik Libya-AS dalam masalah terorisme internasional yang diawali dengan diselenggarakannya seminar sehari mengenai upaya memerangi terorisme. Seminar ini dihadiri oleh negara-negara G-7 dan Rusia pada 30 Juli 1996 di Paris, Perancis.⁵

Meskipun fenomena yang kita bahas terjadi pada rentang waktu 1986-1992 dan 1996, namun penulis tidak menetapkan batasan waktu

⁴ Kartini Kartono, *Pengantar Metodologi Research*, CV Rajawali Pers, Jakarta, hal. 55

⁵ *Harian Suara Karya*, 5 Agustus 1996 dan *Harian Suara Pembaharuan*, 19 Agustus 1996

yang tertutup. Artinya penulis tidak menutup kemungkinan terhadap fenomena yang terjadi di luar kurun waktu tersebut untuk dideskripsikan. Sepanjang hal-hal yang dipaparkan tersebut masih relevan dengan permasalahan yang dibahas.

1.3 Problematika

Problematika atau permasalahan adalah hal yang mendasar yang harus diperhatikan didalam setiap penelitian ilmiah. Mengetahui permasalahan akan memberikan kepada kita arah didalam setiap penelitian dan membuat kita mudah didalam memfokuskan suatu topik permasalahan didalam penulisan. Serta membuat kita mampu untuk mencari dan menyarankan suatu penyelesaian di dalam setiap permasalahan yang sedang kita hadapi dan berusaha kita pecahkan.

Sebelum penulis merumuskan apa yang menjadi permasalahan dalam penulisan ini, maka terlebih dahulu penulis mengemukakan definisi dari masalah. **Prof. DR. Winarno Surachmad** mendefinisikan masalah sebagai berikut :

*"Setiap kesulitan yang menggerakkan manusia untuk memecahkannya. Masalah harus dapat dirasakan sebagai suatu rintangan yang mesti dilalui dengan mengatasinya apabila kita akan berjalan terus."*⁶

Pada buku lain, **Winarno Surachmad** mendefinisikannya sebagai berikut:

*"Problematika adalah pemisahan daripada kompleksitas kesulitan-kesulitan dan kebutuhan yang dijumpai oleh pikiran yang bekerja didalam suatu situasi."*⁷

Sementara itu **Suharsimi Arikunto** didalam buku "**Problematika Penelitian : Suatu Pendekatan Praktik**", mendefinisikan problematika penelitian sebagai berikut :

"Problematika penelitian adalah bagian pokok dari suatu kegiatan penelitian. Didalam problematika ini, peneliti mengajukan pertanyaan tentang persoalan terhadap

⁶ Winarno Surachmad, *Dasar-dasar dan Tehnik Research : Pengantar Metodologi Ilmiah*, CV Tarsito Bandung, 1970, hal. 53

⁷ Winarno Surachmad, *Pengantar Metode Research*, PN Alumni, Bandung 1976, hal. 77

Digital Repository Universitas Jember

dirinya berkaitan dengan hal-hal yang akan dicari jawaban melalui kegiatan penelitian.”⁸

Berdasarkan para pendapat-pendapat tersebut diatas, maka diambil suatu kesimpulan bahwa yang dimaksud dengan masalah atau problematika adalah kesulitan-kesulitan yang kita hadapi dalam situasi tertentu dan selanjutnya menuntut kita untuk menyelesaikan atau mencari jalan keluar. Ketika kita menghadapi suatu masalah maka kita dituntut untuk mengamati bagaimana masalah itu muncul (alasan timbulnya masalah) dan tidak hanya puas melihat saja melainkan kita juga ingin mengetahui secara mendalam.

Penggambaran Libya dibawah Khadafy, sebagai negara teroris memang pas. Laporan terbaru Amnesty Internasional menyebutkan pembunuhan atas empat belas warga negara Libya oleh negara teroris ini sepanjang tahun 1985, empat diantaranya dihabisi di luar negeri; aksi-aksi besar terorisme bolehlah ditimpakan kepada Libya.⁹

Dalam konflik Libya-AS ini, terlihat cukup jelas bagaimana sibuknya George Bush dan para sekutunya (Inggris dan Perancis) untuk menekan Libya. Tapi disisi lain, Khadafy justru menghadapinya dengan tenang. Khadafy menyadari bahwa berbagai sanksi pada akhirnya akan dijatuhkan terhadap negaranya. Dan tampaknya ia sudah siap menghadapinya. Ini, antara lain, terlihat dari keputusannya untuk memindahkan sebagian besar aset ekonominya, dari Eropa Barat ke Timur Tengah. Khadafy juga menyadari bahwa negaranya tidak lebih akan dijadikan sebagai pihak yang selalu disalahkan. Data-data yang dikumpulkan pihak intelijen Israel (Mossad), menunjukkan bahwa Suriah pun sebenarnya ikut terlibat dalam kasus peledakan Pan Am. Tetapi AS tidak mempercayai data-data dari sekutu utamanya tersebut. Hal ini dikarenakan, bagi AS, Suriah memang jauh lebih penting daripada Libya. Washington sangat membutuhkan Suriah guna melicinkan proses konferensi **“perdamaian”** Timur Tengah yang

⁸ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian : Suatu Pendekatan Praktik*, PT Bina Aksara, Jakarta, 1977, hal 47

⁹ Amnesty International Report, *Political Killing's By Government* (AI Report), London 1985 dalam Noam Chomsky, *Menguak Tabir Terorisme Internasional*, Mizan, Bandung, 1991, hal 157

gagasannya bersama Moskow. Dan, George Bush pun merasa berhutang budi pada Suriah yang telah mendukung AS dalam mengusir Irak dari Kuwait pada tahun 1991 yang lalu.¹⁰ Karenanya, Suriah kemudian juga dicoret dari daftar **“pendukung terorisme internasional”**. Dengan demikian konflik Libya-AS ini memang mengandung makna yang multi-dimensional.¹¹

Dari uraian tersebut diatas, maka penulis menetapkan suatu problematika sederhana dari pembahasan ini adalah :

“Apa sebabnya Amerika Serikat menuduh Libya sebagai Terorisme Internasional ?”

1.4 Kerangka Dasar Teori

Dalam mengkaji suatu permasalahan, kita harus menggunakan pijakan terorisme supaya bahasan yang kita kemukakan dapat tepat dan terarah.

Kerangka dasar teori sangat diperlukan untuk mengkaji suatu permasalahan dengan tepat. Kerangka dasar teori adalah bentuk penjelasan yang paling umum yang menginformasikan kepada kita untuk mengetahui bahwa sesuatu itu terjadi dan kapan dapat diprediksikan sesuatu hal itu akan terjadi. Disamping kerangka dasar teori merupakan alat eksplanasi terhadap permasalahan yang sering terjadi, kerangka dasar teori juga merupakan konsepsi abstrak yang ditempuh pada masalah - masalah khusus yang diperlukan sebagai pisau analisis terhadap masalah yang sedang dihadapi, sehingga kita mendapatkan solusi - solusi yang sesuai dengan apa yang diharapkan.

Seperti halnya pada pengkajian masalah - masalah yang lain, pengkajian terhadap masalah-masalah ini juga memerlukan teori yang berperan sangat penting, sebagaimana dikatakan oleh **Charles A. McClelland** berikut ini :

“Bahwa teori yang memberikan pengarahan, yang menentukan jenis-jenis tindakan yang harus dilakukan dalam hubungan internasional, kebiasaan teori yang

¹⁰ Time 10 Desember 1990, hal 10-13, dikutip dalam **Harian Pelita**, 3 Januari 1991

¹¹ M. Riza Sihbudi, op cit, hal. 97

Digital Repository Universitas Jember

demikian akan menghasilkan penentuan aturan permainan yang tepat. Teori lalu menjadi seperangkat jawaban."¹²

Dalam menghadapi suatu permasalahan, **Charles A. Mc Clelland** juga memberikan pengertian teori sebagai berikut :

(1) Teori merupakan rangka dasar untuk mengatur fakta-fakta; (2) teori merupakan pedoman untuk melaksanakan kegiatan; (3) teori merupakan pedoman untuk melaksanakan seperangkat pertanyaan mengenai seperangkat keadaan yang diharapkan; (4) teori merupakan pikiran spekulatif, bebas dari ikatan dunia nyata; (5) teori merupakan abstraksi."¹³

Secara spesifik **Mc Cain** dan **Segal** memberikan definisi yang lebih bahwa teori adalah :

"Serangkaian statemen yang saling berkaitan (yang terdiri dari): (1) kalimat-kalimat yang memperkenalkan istilah-istilah yang merujuk pada konsep-konsep dasar itu, (2) kalimat - kalimat yang menghubungkan beberapa konsep-konsep statemen teoritis itu dengan sekumpulan kemungkinan obyek pengamatan empiris (yaitu hipotesa)."¹⁴

Sementara itu **James E. Daugherty** dan **Robert L. Pfalzgraf Jr.** memberikan pengertian teori sebagai suatu cara mengorganisir pengetahuan kita sedemikian rupa sehingga kita bisa mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang pantas dicarikan jawabannya dan membimbing riset kita untuk menuju kearah jawaban-jawaban yang valid.¹⁵

Berangkat dari pengertian tersebut, maka dalam menganalisa permasalahan yang penulis ajukan, penulis mendasarkan pada **Teori Konflik**.

Konflik mengandung pengertian "**benturan**" seperti perbedaan pendapat, persaingan dan pertentangan antara individu dan individu,

¹² Charles A Mc Clelland, *Ilmu Hubungan Internasional : Sistem dan Teori*, CV Rajawali Pers. Jakarta, 1971, hal. 5

¹³ *ibid*, hal. 10

¹⁴ Garvin Mc Cain dan Erwin Seagal, *The Game of Science* (Brokes/Cole 1973) hal. 99, dalam Mochtar Mas'ood, *Ilmu Hubungan Internasional : Disiplin dan Metodologi*, LPJES, Jakarta, 1990, hal. 219

¹⁵ James E Daugherty and Robert L Pfalzgraf Jr, *Contending Theoris of International Relations*, The John Hopkins University, 1971, hal. 24

Digital Repository Universitas Jember

kelompok dan individu, individu dengan kelompok dan antara individu atau kelompok dengan pemerintah.¹⁶ Masing-masing berupaya keras untuk mendapatkan dan/atau mempertahankan sumber-sumber yang sama.

Konflik yang sudah mencapai puncaknya dan mencapai taraf yang sangat mengkhawatirkan sehingga membuat penyesuaian diri sudah tidak dapat dimungkinkan lagi, membuka kemungkinan bahwa pemusuhan lawan merupakan alternatif pilihan. Konflik yang mengarah kepada pemakaian kekerasan timbul oleh perpaduan dari berbagai sebab seperti tuntutan atas suatu masalah, sikap bermusuhan, dan berbagai jenis tindakan militer serta diplomatik tertentu. Perilaku yang tercermin oleh tuntutan, sikap dan tindakan tersebut pada umumnya disebabkan oleh pertentangan dalam pencapaian tujuan tertentu seperti perluasan wilayah, untuk memperoleh akses ke daerah pemasaran, prestise, penggulingan pemerintahan negara dan sebagainya.¹⁷

Dalam pencapaian tujuan, tuntutan yang diajukan oleh negara A yang bertentangan dengan kepentingan negara B akan mengakibatkan timbulnya perilaku konflik berupa sikap dan tindakan bermusuhan. Adakalanya konflik timbul karena salah satu pemerintah negara ingin yang menyelesaikan masalah menurut caranya sendiri yang bertentangan dengan yang dikehendaki oleh negara lain.

Konflik mencakup bermacam-macam tindakan seperti tindakan diplomatik, propaganda, ancaman dan sanksi militer, tindakan-tindakan tersebut dilakukan oleh salah satu negara terhadap negara lainnya. Bermacam-macam tindakan tersebut menunjukkan bahwa permasalahan yang menjadi sumber pertikaian datangnya bisa dari berbagai arah, seperti : **(1)** permasalahan yang timbul karena pertentangan tujuan, **(2)** sikap para pengambil kebijaksanaan yang

¹⁶Ramlan Surbakti, *Memahami Ilmu Politik*, PT Gramedia Widiasarana Indonesia, Jakarta, 1992, hal 149

¹⁷R. Suprpto, *Hubungan Internasional : Sistem, Interaksi dan Perilaku*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1997, hal 162

cenderung mendorong untuk melakukan ancaman sanksi, dan (3) perilaku konflik.¹⁸

Situasi konflik yang timbul karena salah satu pemerintah melindungi warga negaranya yang berurusan dengan pemerintah atau masyarakat negara lain, atau mendesak pemerintah yang melindunginya untuk menuntut ganti rugi disebut perselisihan.¹⁹

Perbedaan pendapat, perdebatan, persaingan bahkan pertentangan dan perebutan dalam upaya untuk mendapatkan dan atau mempertahankan nilai-nilai.²⁰ Oleh karena itu, menurut pandangan konflik, pada dasarnya politik adalah konflik. Pandangan ini ada benarnya sebab konflik merupakan gejala yang serba hadir dalam masyarakat, termasuk dalam proses politik. Selain itu konflik merupakan gejala yang melekat dalam setiap proses politik.

Dalam kesempatan ini perlu dijelaskan pula perbedaan tiga istilah tentang pengaturan konflik, agar tidak mengacaukan pemahaman. Ketiga istilah tersebut adalah penyelesaian konflik, pembasmian konflik dan pengaturan konflik. Penyelesaian konflik (**conflict resolution**) lebih merujuk pada sebab-sebab konflik daripada manifestasi konflik. Dengan asumsi selama ada antagonisme kepentingan dalam masyarakat, konflik selalu terjadi maka konflik tidak pernah dapat diselesaikan. Lalu, **pembasmian konflik**, lebih merujuk pada manifestasi konflik daripada sebab-sebab konflik. Dalam jangka pendek, konflik dapat dibasmi dengan kekerasan, tetapi untuk jangka panjang tidak akan dapat ditumpas. Semakin dibasmi, semakin muncul konflik. Selanjutnya, **pengaturan konflik** berupa bentuk-bentuk pengendalian lebih diarahkan pada manifestasi konflik daripada sebab-sebab konflik. Dengan asumsi konflik tidak akan dapat diselesaikan dan dibasmi maka konflik dapat diatur saja sehingga konflik tidak mengakibatkan perpecahan masyarakat.²¹

¹⁸ Ibid, hal 163

¹⁹ KJ Holsti, **Politik Internasional, Suatu Kerangka Analisis**, Jilid 2, Erlangga, Jakarta, 1988, hal. 171

²⁰ Ramlan Surbakti, op cit, hal.8

²¹ Ramlan Surbakti, **ibid**, hal 159

Menurut **Ralf Dahrendorf**, pengaturan konflik yang efektif sangat bergantung pada tiga faktor. **Pertama**, kedua pihak harus mengakui kenyataan dan situasi konflik yang terjadi diantara mereka (adanya pengakuan atas kepentingan yang diperjuangkan oleh pihak lain). **Kedua**, kepentingan-kepentingan yang diperjuangkan harus terorganisasi secara rapi, tidak tercerai-berai, dan terkotak-kotak sehingga masing-masing pihak memahami dengan jelas lingkup tuntutan pihak lain. **Ketiga**, kedua pihak menyepakati aturan main (rules of the game) yang menjadi landasan dan pegangan dalam hubungan dan interaksi diantara mereka. Ketiga-tiga syarat dipenuhi maka berbagai bentuk pengaturan konflik dapat dibuat dan diselesaikan.²²

Mangacu pada pengertian tersebut maka dalam menganalisa konflik Libya-AS dalam masalah terorisme internasional, maka terlebih dahulu kita melihat latar belakang terjadinya konflik diantara keduanya. Serangan AS terhadap Libya menunjukkan terjadinya eskalasi (peningkatan) konflik antara kedua negara tersebut. Ketegangan hubungan Libya-AS sebenarnya sudah berlangsung sejak tahun 1970-an. Tanggal 30 Juni 1970, yaitu sembilan bulan setelah Khadafy berkuasa, Libya memaksa AS membongkar pangkalan militernya di Wheelus Field yang merupakan pangkalan AS yang berada di luar negeri terbesar setelah pangkalan militer AS di Quebec, Philipina.

Sebelumnya, 28 Maret 1970, Khadafy mengusir pangkalan militer Inggris di Tobruk. Menurut Khadafy, pengusiran pangkalan AS dan Inggris tersebut tidak akan diganti dengan pangkalan asing manapun, karena Libya harus menjadi sebuah wilayah yang bebas untuk selamanya.²³

Namun tindakan Khadafy tersebut, ternyata menjadi awal dari ketegangan hubungan Libya-AS. Sebagai sebuah negara adi kuasa, AS tampaknya merasa "tersinggung" dengan tindakan Khadafy. Beberapa kejadian yang kemudian semakin memperburuk hubungan AS-Libya,

²²Ralf Dahrendorf, *Class and Class Conflict in Industrial Society*. Stanford Univesity Pers. hal 228-230, dalam ibid, hal 160

²³John Wright, *Libya : A Modern History*, Croom Helm, London, 1982, hal 132-153, dalam M. Riza Sibbudi, *Bara Timur Tengah*, Mizan, Bandung, 1991, hal. 97

antara lain : penghentian bantuan militer AS kepada Libya, perjanjian persahabatan Libya-Uni Soviet (1973), klaim Khadafy atas perairan Teluk Sidra (1973), penyerangan terhadap kedutaan besar AS di Tripoli (1979), pengusiran dua pesawat SU-22 Libya oleh dua pesawat F-14 Tomcat AS di Laut Tengah (19 Agustus 1981), pelanggaran penggunaan paspor AS untuk perjalanan ke Libya (Desember 1981), dan adanya tuduhan Reagan bahwa Khadafy berada di belakang "serangan kembar" yang dilakukan gerilyawan Palestina di Roma dan Wina (28 Desember 1985).

Daftar tersebut diatas masih dapat diperpanjang, karena masih belum termasuk saling tuduh dan saling maki antara pemimpin kedua negara (Ronald Reagan untuk Amerika Serikat dan Muammar Khadafy untuk Libya) yang tak terhitung jumlahnya. Tuduhan-tuduhan inilah yang menjadi salah satu sebab memanasnya hubungan antara AS-Libya dan mendorong terjadinya konflik yang tak kunjung selesai. Konflik yang selalu berkutat pada masalah terorisme internasional.

Ketegangan antara Libya dan AS berubah menjadi konflik terbuka setelah terjadi peristiwa Roma dan Wina. Reagan tetap ngotot Khadafy lah yang mendalangi peristiwa Roma dan Wina, meskipun sumber-sumber menyebutkan bahwa kelompok **Abu Nidal** yang melancarkan "**serangan kembar**" tersebut. Reagan segera mengenakan sanksi ekonomi kepada Libya. Tapi agaknya itu belum cukup, dan ia pun segera mengerahkan Armada VI AS untuk menyerang Khadafy, dengan memakai justifikasi "**menolak klaim Libya atas Teluk Sidra**".

Agaknya tepat apa yang diungkapkan oleh sementara pengamat, bahwa dengan menghukum Libya, AS sebenarnya telah membantu menaikkan popularitas Khadafy baik didalam maupun di luar negerinya. Ini terlihat dari dukungan dan simpati yang diberikan sebagian besar negara-negara dunia ketiga kepada Khadafy.

Mesir, yang selama ini bermusuhan dengan Libya, meskipun tidak secara terang-terangan mendukung Khadafy, telah menolak keras ajakan AS untuk melakukan aksi militer bersama terhadap Libya.

Jika serangan udara AS terhadap Libya baru-baru ini dimaksudkan untuk "**membasmi terorisme**" sebagaimana yang diinginkan Reagan dan Bush; tampaknya AS telah "**salah alamat**".

Karena apa yang selama ini dikenal sebagai para **teroris Arab** sebenarnya lebih banyak berpusat di Suriah dan Lebanon. Tetapi jika serangan AS tersebut dimaksudkan sekedar untuk **konsumsi politik dalam negeri**, Reagan dan Bush memang berhasil mendapatkannya.

Untuk memberantas terorisme, tidak cukup dengan sekedar mengandalkan sistem persenjataan yang serba modern dan canggih. Namun perlu dikaji persoalan-persoalan yang menjadi akar timbulnya terorisme. Dan perlu perumusan kembali apa sebenarnya yang dinamakan "**terorisme**"

1.5 Hipotesa

Suatu keharusan yang harus dipegang oleh peneliti karya ilmiah adalah suatu hipotesa yang merupakan jawaban sementara dari permasalahan yang ada. Seperti yang telah dikemukakan oleh **Melly G. Tan** bahwa hipotesa merupakan pernyataan tentang adanya variabel yang digunakan dan bersifat sementara.²⁴

Selanjutnya **WJS Poerwodarminto** berpendapat bahwa hipotesa adalah sesuatu yang dianggap benar untuk alasan atau untuk mengutarakan pendapat, meski kebenarannya belum dibuktikan.²⁵ Sementara itu **Sutrisno Hadi** memberikan definisi yang lebih jelas yaitu

*"Hipotesis adalah dukungan yang mungkin benar atau mungkin salah atau mungkin dapat dipandang sebagai kesimpulan yang bersifat sementara, penolakan atau penerimaan hipotesa sangat bergantung kepada hasil penyelidikan terhadap fakta-fakta yang dikumpulkan."*²⁶

Hipotesa diperlukan sebagai usaha untuk menentukan alternatif yang mendekati kebenaran dari berbagai dugaan yang ada. Dan kebenarannya suatu hipotesa memerlukan pembuktian lagi.

Pada saat Ronald Reagan (Presiden AS waktu itu) masih berkuasa, dengan sesuka hatinya memasukkan negara-negara seperti Libya, Suriah, Iran dan Korut ke dalam daftar "**para pendukung terorisme internasional**". Bahkan pada April 1986, AS melancarkan serangan

²⁴Melly G. Tan, *Metode dan Penelitian Masyarakat*, PT Gramedia, Jakarta, hal. 41

²⁵WJS Poerwodarminto, *Kamus Bahasa Indonesia*, PN Balai Pustaka, Jakarta, 1976, hal. 76

²⁶Sutrisno Hadi, *Metode Research*, Penerbitan Fak. Psikologi UGM, Yogyakarta, 1980, hal. 63

membabi buta terhadap dua kota Libya: Tripoli dan Benghazi, karena Libya dituduh **mendukung aksi terorisme** yang menewaskan sejumlah marinir AS di sebuah klub malam di Jerman (Barat). Padahal, sebagaimana terungkap beberapa tahun kemudian, tuduhan AS waktu itu pada hakekatnya tidak lebih sekedar kampanye disinformasi yang dilakukan Washington terhadap Libya.

Serangan AS yang dimaksudkan untuk membunuh Pemimpin Libya **Muammar Khadafy** waktu itu, anehnya, tidak mendapat reaksi dari PBB, kendati jelas-jelas merupakan tindakan pelanggaran terhadap kedaulatan sebuah negara merdeka. Dalam terminologi **St. Augustine**, maka adalah **Sang Perompak** yang menghadapi AS sebagai Sang Kaisar.²⁷

Ronald Reagan telah digantikan oleh George Bush, namun demikian daftar yang memasuki Libya sebagai "**pendukung terorisme internasional**" tampaknya masih terus dipertahankan. Sebagaimana pendahulunya, Bush pun tampak berusaha meneruskan **politik koboi** AS guna mempertahankan posisinya sebagai **Sang Kaisar**. Keruntuhan super power Uni Soviet, membuat AS semakin menjadi-jadi untuk berusaha memaksakan "**tata dunia baru**" yang tentu saja sesuai dengan kehendaknya sendiri.

Konflik Libya-AS yang paling belakangan, sehubungan dengan kasus peledakan pesawat Pan Am dan UTA, menunjukkan secara jelas tindak tanduk **Sang Kaisar** yang semakin tidak terkontrol. Betapa tidak, AS -- yang didukung sepenuhnya oleh Inggris dan Perancis -- mengaku memiliki bukti-bukti keterlibatan Libya dalam kasus peledakan dua pesawat penumpang sipil tersebut, tetapi disisi lain justru menolak suatu pengadilan independent atau Mahkamah Internasional. Logikanya, jika AS dan sekutunya benar-benar memiliki bukti semestinya mereka tidak akan menolak suatu pengadilan independent. Padahal, AS dan para sekutunya selalu mengklaim sebagai para **pendekar demokrasi dan hak-hak asasi** yang seharusnya menjunjung tinggi asas praduga tak bersalah.

²⁷ Noam Chomsky, *op. cit.*, hal 19

Untuk mengkaji permasalahan diatas, penulis mengemukakan hipotesa sebagai berikut :

“AS menuduh Libya sebagai Terorisme Internasional dilakukan untuk berusaha memaksakan “tata dunia baru” (New World Order) yang, tentu saja, sesuai dengan kehendak AS sendiri. Dan konflik Libya - AS sebenarnya memang bukan kasus hukum semata, melainkan masalah politik. Sehingga apa yang disebut sebagai “bukti-bukti tak terbantahkan” yang sifatnya subyektif, stereotip dan semena-mena maupun suatu proses pengadilan, pada hakekatnya hanya sebagai alat politik AS guna menunjukkan bahwa dialah yang selalu benar, sementara kesalahan selalu menjadi milik Libya”.

1.6 Metode Penelitian

Dalam suatu penulisan karya ilmiah, diperlukan adanya penelitian. Tujuan dari penelitian adalah untuk menjelaskan atau menerangkan fenomena. Untuk memahami suatu fenomena, seorang peneliti juga harus menghubungkan fenomena yang satu dengan fenomena yang lainnya, yang untuk itu diperlukan data-data yang selanjutnya akan dianalisis.

Agar penelitian dapat terarah dan mendapatkan hasil yang optimal dan sesuai dengan apa yang diharapkan, diperlukan metode yang tepat. **The Liang Gie** menjelaskan metode sebagai berikut :

“Cara atau langkah yang berulang kembali sehingga menjadi pola untuk menggali pengetahuan tentang suatu gejala. Pada ujung awalnya ini merupakan cara atau langkah untuk mengumpulkan data-data, sedangkan pada ujung akhirnya merupakan suatu cara langkah untuk memeriksa kebenaran daripada pernyataan yang dibuat mengenai gejala tersebut.”²⁸

Dari pengertian diatas dapat diketahui bahwa dalam melakukan kegiatan, ada dua langkah yang dilaksanakan, yaitu mengumpulkan data dan selanjutnya menganalisa data tersebut.

1.6.1 Tahap Pengumpulan Data

Untuk menyelesaikan karya tulis ini, penulis melakukan penelitian tidak langsung yang berarti bahwa data hasil pengamatan terhadap obyek yang diteliti, dikumpulkan melalui jurnal-jurnal, buku-buku terbitan, artikel atau buletin dan pemberitaan oleh media massa. Data yang berhasil dikumpulkan menjadi bersifat tidak langsung.

Dengan demikian, penulis menggunakan metode penelitian perpustakaan (**Library Research**) dan studi literatur. Walaupun merupakan **data sekunder**, namun penulis berusaha untuk mengumpulkan data dari sumber aslinya. Ini dikarenakan upaya untuk mendapatkan **data langsung (primer)** terbentur pada masalah letak geografis yang cukup jauh, masalah bahasa dan biaya untuk menjangkau lapangan yang diteliti (yaitu Libya dan AS). Adapun penelitian yang kepustakaan ini telah penulis lakukan di :

1. Perpustakaan FISIP-Universitas Jember.
2. Perpustakaan Pusat Universitas Jember.
3. Perpustakaan FISIP-Universitas Gadjah Mada Yogyakarta
4. Perpustakaan CSIS di Jakarta
5. Pusat Penelitian Harian Kompas di Jakarta.

1.6.2 Metode Analisis Data

Setelah data-data terkumpul, maka selanjutnya penulis menganalisis data tersebut dengan menggunakan **cara berfikir reflektif**, yaitu dengan mengkombinasikan metode berfikir **deduktif** dan **induktif**. Menurut Marzuki, metode berfikir reflektif adalah :

"Mulai dengan induktif untuk menunjukkan persoalan atau menetapkan hipotesa kemudian diikuti dengan deduktif guna meletakkan kerangka atau jalan untuk pembuktian hipotesa yang dibuatnya itu. Selanjutnya hipotesa perlu diuji kebenarannya dengan induksi sehingga diperoleh pemecahan yang konklusif."²⁹

²⁸ The Liang Gie, *Ilmu Politik*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, 1979, hal. 73

²⁹ Marzuki, *Metodologi Research*, Yayasan Penerbitan Fak. Psikologi Gadjah Mada, Yogyakarta, 1980, hal. 21

Metode induktif adalah cara berfikir berangkat dari hal-hal yang khusus untuk kemudian dirumuskan dalam satu rumusan umum.

Dalam hal ini, penulis menggunakan cara berfikir induktif untuk menetapkan garis besar permasalahan dan hipotesa untuk memudahkan dalam menganalisa fenomena tersebut.

Metode yang selanjutnya dipakai adalah **deduktif**, berangkat dari hal-hal yang umum terlebih dahulu barulah kemudian menuju kepada hal-hal yang khusus. Garis besar permasalahan dan hipotesa yang telah penulis ajukan adalah hal umum yang selanjutnya akan penulis jabarkan ke hal-hal yang khusus untuk dapat lebih memahami fenomenanya.

Barulah setelah hal-hal yang berhasil dijabarkan tadi teruji kebenarannya, maka penulis kembali menggunakan cara berfikir induktif untuk menentukan kesimpulan atas fenomena yang diamati.

Untuk mendapatkan hipotesa yang memadai dan sesuai dengan harapan, penulis memperhatikan beberapa hal (kejadian-kejadian maupun peristiwa-peristiwa) yang melatarbelakangi terjadinya konflik antara Libya dan AS khususnya dalam masalah terorisme internasional. Tekanannya adalah bagaimana konflik tersebut terjadi, mengapa terorisme yang menjadi permasalahan utama dalam konflik ini, dan apa yang menjadi tujuan utama dari pihak-pihak yang berkonflik tersebut.

1.7 Metode Pendekatan

Dalam usaha untuk mempertajam analisis, diperlukan suatu pendekatan atau approach yang membuat penelitian menjadi spesifik. Pendekatan akan semakin jelas dari sudut mana kita memandang suatu permasalahan. Pendekatan menurut **Liang Gie** adalah :

“Keseluruhan rangkaian sikap penyelidikan, sudut pandangan, ukuran, pangkal duga, dan kerangka dasar pemikiran dari suatu ilmu. Jadi pendekatan merupakan keseluruhan unsur yang dipakai untuk mendekati suatu sasaran, memasuki suatu bidang ilmu dan memahami pengetahuan yang teratur, bulat, mengenai sasaran yang ditelaah oleh ilmu tersebut.”³⁰

³⁰ The Liang Gie, op cit, hal. 49

Digital Repository Universitas Jember

Pendekatan adalah keseluruhan unsur yang dipakai untuk mendekati suatu sasaran bidang ilmu pengetahuan secara teratur dan sistematis. Dalam penulisan ini penulis menggunakan **pendekatan sejarah-politik (political-historis approach)** dan **pendekatan personaliti (personality approach)**.

Political historis merupakan suatu pendekatan yang melihat ataupun memahami gejala-gejala politik yang muncul dengan berdasar pada proses sejarahnya. Pemahaman terhadap suatu kejadian atau fenomena akan lebih mudah, apabila kita mengetahui latar belakang ataupun kejadian-kejadian yang mendahului timbulnya fenomena tersebut. **Eisemann** memberikan perumusan mengenai political-history, bahwa political history adalah suatu deskripsi kronologis dari kenyataan politik berbagai hal, baik itu bersifat institusional maupun non-institusional dalam kehidupan suatu negara (atau sosial politik) dalam pertimbangan kebijakan dalam negeri maupun dalam hubungannya dengan negara lain/politik luar negeri atau kebijakan international.³¹

Politik dan sejarah memiliki kaitan yang sangat erat, keduanya saling mempengaruhi dan melengkapi untuk perkembangan kedua unsur tersebut. Segala peristiwa politik dipengaruhi proyeksi sejarah baik dalam hubungannya dengan sejarah masa kini menuju masa depan yang tidak terlepas dari situasi masa lalu sejalan dengan perjalanan waktu.

Konflik Libya-AS dalam masalah terorisme internasional ini tidak dapat dipisahkan dari telaah-telaah sejarah AS maupun Libya, baik pada masa lalu/lampau, kini dan masa datang. Telaah suatu peristiwa dimasa lampau akan lebih berhasil jika dikaitkan dengan masalah politik.

Selanjutnya untuk mengkaji lebih lanjut mengenai permasalahan dalam penulisan ini, penulis juga mencoba untuk menggunakan **pendekatan personaliti (Personality Approach)**. Didalam pendekatan ini, penulis mencoba untuk memahami kebijaksanaan-kebijaksanaan yang diambil oleh Ronald Reagan dan George Bush maupun Muammar Khadafy yang bertujuan untuk mengoptimalkan tercapainya segala apa

³¹ Ibid, hal. 87

Digital Repository Universitas Jember

yang menjadi tujuan dari kepentingan-kepentingan masing-masing negara/pihak. Sehingga dengan demikian dapat diketahui secara lebih mendalam konflik yang terjadi antara Libya dan AS tersebut.

Pendekatan sejarah politik dan pendekatan personaliti secara kontekstual menjadi pendekatan studi ini.



BAB II TERORISME INTERNASIONAL

2.1 Terorisme, Tujuan dan Terorisme Internasional

Sejak akhir Perang Dunia II kekerasan sipil merupakan gejala yang sangat menarik perhatian. Dibanding perang sebenarnya (perang antar negara), kekerasan sipil jauh lebih banyak jumlahnya. Surat kabar New York Times misalnya, mencatat bahwa selama kurun waktu 1946-1959 saja, telah terjadi 1.200 kekerasan sipil/politik yang meliputi bentuk-bentuk perang saudara, aksi gerilya, huru-hara, kekacauan-kekacauan luas, terorisme, pemberontakan dan kudeta.¹ Peristiwa-peristiwa kekerasan itu terutama sangat mencuat pada dasawarsa 1960-an, yang terjadi tidak saja di negara-negara berkembang, melainkan juga terjadi di negara-negara maju. Antara 1961-1968 kekerasan politik telah terjadi di 114 dari 121 negara yang ada di dunia waktu itu.² Dalam tahun 1988 tercatat 856 aksi teroris internasional, tetapi kemudian berkurang menjadi 455 pada tahun 1990, mungkin karena semakin baiknya kerjasama antar negara dalam membasmi terorisme internasional itu.³ Setelah berakhirnya Perang Dingin, berbagai kekerasan politik dan terorisme, baik terorisme domestik maupun terorisme internasional, kelihatannya seperti semakin menjadi-jadi. Perang saudara, **ethnic cleansing**, terorisme dalam berbagai bentuk, pemberontakan, pemboman (World Trade Center New York, Oklahoma), peracunan (Tokyo), pembantaian, penyanderaan (oleh para pejuang Cechnya), demonstrasi berdarah, dan sebagainya memenuhi media dunia, baik media cetak maupun media elektronik.

Dari paparan diatas beserta beberapa contoh kegiatan yang dapat dihubungkan sebagai tindak kejahatan terorisme, maka dapat dipahami disini bahwa terorisme merupakan bentuk kekerasan yang digolongkan

¹ Harry Eckstein (Ed.). *Internal War*, Free Press of Glencoe, New York, 1964, hal. 3 dalam Hasnan Habib, *Kapita Selekt: Strategi dan Hubungan Internasional*, CSIS, Jakarta, hal. 569

² Ted Robert Gurr, *Why Men Rebel*, Princeton University Press, New York, 1970, hal. 3 dalam loc cit.

³ U.S. Department of State Dispatch, May 1991, hal. 339 dalam ibid, hal. 570

kedalam kekerasan politik, atau juga disebut kekerasan sipil. Kekerasan politik mencakup suatu spektrum yang sangat luas, mulai dari "unjuk rasa" atau protes dengan menggunakan kekerasan, pemberontakan spontan dan sporadis, pemberontakan berencana dan berlanjut, kudeta, sampai ke revolusi. Perang (antar negara) tidak termasuk didalamnya, yang merupakan kekerasan militer, tetapi perang saudara (**civil war**) termasuk. Dalam pengertian kekerasan politik berbentuk terorisme, termasuk juga penggunaan atau ancaman penggunaan kekerasan oleh pemerintah terhadap rakyatnya sendiri atau sebagian dari rakyatnya sendiri (terorisme negara/**state terorisme**).

Kendala utama dalam memperoleh konsensus mengenai terorisme ialah persepsi mengenai 'kepentingan nasional'. Negara-negara (dan individu-individu) tidak ingin mendasarkan sikap dan responsnya terhadap suatu kekerasan politik (terorisme) atas hanya rumusan definisi. Respon itu mungkin sekali terhadap konflik dengan kepentingan-kepentingan politik luar maupun dalam negeri yang lebih besar atau lebih penting. Perbedaan-perbedaan persepsi nasional tentang suatu peristiwa atau kelompok sangat menyulitkan pencapaian konsensus internasional yang diperlukan bagi kegiatan internasional terpadu melawan terorisme. Contoh: perbedaan-perbedaan pandangan negara-negara tentang PLO sebelum proses persetujuan damai PLO-Israel.

Sebenarnya, tidak ada definisi/pengertian maupun teori yang "universal" mengenai terorisme. Tidak saja tidak ada kesepakatan dikalangan para ahli, tetapi juga tidak ada kesamaan paham dikalangan pihak-pihak yang bertugas memberantasnya atau menanganinya, seperti para politisi, diplomat, penyidik kriminal, penuntut umum, pejabat intelejen, pejabat keamanan, ahli keamanan industri, satuan khusus militer, dan wartawan. Dari segi ilmu ia dapat didekati dari sudut sosiologi, kriminologi, psikiatri, antropologi budaya, agama, psikologi sosial, sejarah, ilmu politik (termasuk hubungan internasional) dan hukum. Seorang pakar pernah mencantumkan 109 definisi yang dirumuskan selama kurun waktu

1936-1981, dan sejak itu hingga dewasa ini jumlah itu pasti sudah bertambah lagi.⁴ Namun terdapat beberapa kesamaan pendapat mengenai ciri-ciri dasar dari terorisme, sebagai berikut: a). pengeksploitasian kelemahan manusia secara sistematis, yaitu kengerian atau ketakutan yang melumpuhkan (teror) terhadap kekejaman/kekerasan/penganiayaan fisik; b). penggunaan atau ancaman kekerasan fisik; c). adanya unsur pendadakan/kejutan; d). mempunyai tujuan politik yang jauh lebih luas dari sasaran/korban langsungnya; e). sasaran pada umumnya nonkombatan; f). direncanakan dan dipersiapkan secara rasional.

Dengan berdasarkan pada ciri-ciri diatas, maka dalam tulisan ini terorisme diartikan sebagai 'penggunaan atau ancaman penggunaan kekerasan fisik yang direncanakan, dipersiapkan dan dilancarkan secara mendadak terhadap sasaran langsung yang lazimnya adalah nonkombatan untuk mencapai suatu tujuan politik'.⁵ Sebagai tambahan bahan perbandingan, dibawah ini dicantumkan pula suatu rumusan pengertian yang lebih panjang, tetapi pada dasarnya mempunyai inti-inti yang sama, yaitu:

Terorisme adalah penggunaan atau ancaman kekerasan fisik oleh individu-individu atau kelompok-kelompok untuk tujuan-tujuan politik, baik untuk kepentingan atau untuk melawan kekuasaan yang ada, apabila tindakan-tindakan terorisme itu dimaksudkan untuk mengejutkan, melumpuhkan, atau mengintimidasi suatu kelompok sasaran yang lebih besar daripada korban-korban langsungnya. Terorisme melibatkan kelompok-kelompok yang berusaha untuk menumbangkan rezim-rezim tertentu, untuk mengoreksi keluhan kelompok/nasional, atau untuk menggerogoti tata politik internasional yang ada.⁶

⁴ Walter Lacqueur, "Reflections on Terrorism", Foreign Affairs Fall, 1980, hal 88 dalam ibid, hal 571

⁵ Loc cit

⁶ James Adams, *The Financing of Terror: How the Groups That Are Terrorizing the World Get the Money to Do It*, Simon and Schuster, New York, 1986, hal 6 dalam ibid, hal 572



Sedangkan versi Departemen Luar Negeri AS tahun 1987 dalam publikasi tahunannya mengenai terorisme global berbunyi:

"Terorisme adalah kekerasan fisik yang direncanakan dan bermotivasi politik yang dilancarkan terhadap sasaran-sasaran nonkombatan, oleh kelompok-kelompok subnasional atau agen-agen rahasia negara, biasanya untuk mempengaruhi publik tertentu."

Salah satu pengertian politik ialah **penyelesaian sengketa**, yaitu upaya untuk mencapai persetujuan antar-individu atau antar kelompok mengenai perbedaan kepentingan atau penyelesaian konflik demi kepentingan bersama. Ia merupakan permulaan dari proses peradaban. Proses pembudayaan mulai, bila konsiliasi gagal dicapai dan terorisme mengambil alih keadaan. Terorisme terjadi bila sarana-sarana politik biasa sudah tidak berfungsi lagi. Dengan kata lain, **terorisme adalah kelanjutan politik dengan cara-cara lain**. Rumusan ini me-"paraphrase" diktum Clausewitz tentang perang. Jadi, dapat dikatakan bahwa terorisme juga adalah perang, yaitu **perang politik (political warfare)**. Tetapi, berbeda dari perang sebagai tindakan kekerasan yang mempunyai legitimasi dan menggunakan alat negara resmi (Angkatan Perang), terorisme adalah ilegal, bahkan kriminal.

Ada beberapa pendapat dari para pakar terorisme yang menyebutkan tentang definisi terorisme. Antara lain adalah **J. Bowyer Bell** dalam bukunya, **Transnational Terror**, menyatakan bahwa terorisme adalah senjata kaum lemah, tetapi ia juga merupakan senjata yang ampuh. **David Fromkin** dalam bukunya **Contemporary Terrorism (editor: John D Elliot dan Leslie K. Gibsin)**, membedakan antara terorisme dan aksi militer. Menurutnya, **"military action is aimed at physical destruction while terrorism aims at psychological consequences"** (aksi militer adalah mengarah kepada pembinaan secara fisik, sedangkan terorisme mengarah kepada konsekuensi psikologi). **Brian Michael Jenkins** memandang terorisme sebagai **"a new form of warfare"** (bentuk baru dari perang). Dan, **Antal Deutsch** melihat terorisme sebagai **"a low cost type of warfare"**

between major power" (tipe termurah/terendah dari peperangan diantara kekuatan-kekuatan utama).⁷

Dr. Kent Layne Oots,⁸ mendefinisikan "terorisme" sebagai berikut: a). sebuah aksi militer atau psikologi yang dirancang untuk menciptakan ketakutan, atau membuat kehancuran ekonomi atau material; b). sebuah metode pemaksaan tingkah laku pihak lain; c). sebuah tindakan kriminal bertendensi mencari publisitas; d). tindakan kriminal bertujuan politis; e). kekerasan bermotifkan politis; f). sebuah aksi kriminal guna meraih tujuan politis atau ekonomis.

Akan tetapi yang paling tepat tampaknya apa yang dikemukakan **Fathi Osman**. Dalam salah satu kolomnya di majalah **Arabia**, **Osman** antara lain mengatakan bahwa suatu kesulitan dalam membahas terorisme adalah masalah definisinya. Jika terorisme diartikan sebagai penggunaan kekerasan untuk mencapai tujuan tertentu, maka semua aksi militer pun menggunakan kekerasan. Jika kita menganggap terorisme sebagai tindakan menyakiti atau melukai orang tak berdosa, maka penggunaan senjata berat dalam peperangan pun jelas merupakan tindakan yang menyakiti atau melukai ribuan atau bahkan jutaan orang tak berdosa.⁹

Menurut **Noam Chomsky**, istilah terorisme mulai digunakan pada akhir abad ke-18, terutama untuk menunjuk aksi-aksi kekerasan pemerintah (penguasa) yang ditujukan untuk menjamin ketaatan rakyat. dengan kata lain, istilah itu digunakan untuk merujuk pada kekuatan koersif (pemaksaan/penekan) -- sebagai lawan kekuatan persuasif (pembujuk) -- suatu rezim yang berkuasa.¹⁰ Dengan demikian, menurut Chomsky, arti aslinya terlupakan, dan istilah terorisme lalu diterapkan terutama untuk "terorisme pembalasan" oleh individu atau kelompok.

⁷ Oots, *A Political Organization Approach to Transnational Terrorism*, Greenwood Press, New York, 1986, hal 5 dalam M. Riza Sihbudi, *Timur tengah, Dunia Islam dan Hegemoni AS*, Pustaka Hidayah, Jakarta, 1993, hal 93

⁸ Kent Layne Oots, *A Political Organization Approach to Transnational Terrorism*, Greenwood Press, New York, 1986, hal 7-8 dalam M. Riza Sihbudi, *Bara Timur Tengah*, Mizan, Bandung, 1991, hal 94

⁹ Osman, "Terrorism: A Search for Justice in the International Jungle", *Arabia* (Agustus 1985), hal 9-10 dalam M. Riza Sihbudi, *op.cit*, hal 93-94

¹⁰ Noam Chomsky, *Menguak Tabir Terorisme Internasional*, Mizan, Bandung, 1991, hal 19-20

Dalam kamus **Webster's New School and Office Dictionary**, oleh **Noah Webster**¹¹, **A Fawcett Crests Book**, disebutkan bahwa **terror** sebagai **kata benda** mengandung banyak arti: **1) extreme fear**, sebuah ketakutan yang amat sangat; **2) one who excites extreme fear**, seseorang yang gelisah karena ketakutan yang amat sangat; **3) the ability to cause such fear**, kemampuan untuk menimbulkan ketakutan; **4) the systematic use of violence, as a murder, by a party or faction to maintain power, promote political policies, etc**; penggunaan kekerasan secara sistematis seperti pembunuhan, yang dilakukan oleh sekelompok orang atau golongan untuk memelihara, menegakkan atau mengurus masalah kekuasaan, mempromosikan kebijakan politik, memaksakan kehendak, menunjukkan sikap dan sebagainya.

Sedangkan **terorisme** sebagai **kata kerja** adalah **the use of violence, intimidation, etc. to gain an end; especially, a system of government ruling by terror**; penggunaan kekerasan, ancaman dan sejenisnya untuk mendapatkan sesuatu yang diinginkan dan merupakan tujuan, teristimewa sebagai suatu sistem pemerintahan yang diatur dengan teror. Para pelakunya atau orang yang berperan dalam masalah teror ini disebut sebagai **terrorist**.

Sementara itu, terorisme internasional adalah bentuk kekerasan politik yang **melibatkan warga atau wilayah lebih dari satu negara**. Ia juga dapat diartikan sebagai tindakan kekerasan yang dilakukan diluar **ketentuan diplomasi internasional dan perang**. Sebagai sasaran dipilih benda hidup atau mati, misalnya diplomat, pejabat, pengusaha besar, pesawat terbang dan sebagainya. Tindakan teror ini dimotivasi oleh keinginan mempengaruhi dan mendapatkan perhatian masyarakat dunia terhadap aspirasi yang diperjuangkan.

Menurut **Jeffrey Ian Ross** dan **Ted Robert Gurr** dalam artikel mereka, **"Why Terrorisme Subsides"**, mendefinisikan terorisme internasional sebagai, **"Terrorism carried out by autonomous nonstate**

¹¹ H. Lukman Saksono, Ph.D. M.Sc. dan M. Puspa Heriyadi, B.Ph., Amerika Serikat, Inggris, Yahudi dan Terorisme Internasional, PT Cendekia Jaya Utama, Bandung, 1988, hal 342

actors and affecting nationals of at least two states" (terorisme dibawa oleh aktor-aktor non-negara yang berkepentingan dan mempengaruhi kepentingan nasional yang melibatkan paling sedikit dua negara).¹²

Terorisme internasional pada umumnya dikutuk oleh dunia internasional. Namun, usaha mengatasinya tidak efektif. Ia bahkan merupakan masalah tersendiri yang rumit, karena tidak ada kesamaan pandangan mengenai penanganan faktor-faktor penyebab yang sesungguhnya. Terorisme internasional hanya gejala dari faktor yang berakar jauh lebih dalam. Dalam hubungan ini misalnya, perjuangan rakyat Palestina memperoleh hak menentukan dirinya sendiri dengan mendirikan negara Palestina yang tidak mendapat dukungan dari Israel dan negara-negara Barat lain pada umumnya, tetapi mendapat dukungan dari bagian terbesar negara berkembang.

Masalah terorisme internasional tidak dapat dipecahkan hanya melalui jalur hukum. Ia lebih merupakan masalah politik. Oleh karena itu, akan selalu ada pihak-pihak lain yang membantu, baik berdasarkan rasa solidaritas dengan tujuan perjuangan itu, khususnya dalam rangka perjuangan menuntut kemerdekaan, maupun karena mungkin sesuai dengan atau menguntungkan bagi kepentingan pihak-pihak itu sendiri.

Terorisme internasional dapat berkembang dan meluas karena bantuan pihak ketiga baik dari pihak resmi (pemerintah) maupun tidak resmi (organisasi-organisasi, perorangan, kelompok simpatisan). Bantuan itu antara lain dapat berupa: a) **latihan**, diberikan di tempat pihak yang dibantu, di negara pembantu atau di negara ketiga; b) **alat peralatan letal** (senjata, bahan peledak, amunisi dan sebagainya) dan **non letal** (perbekalan, alat dan jasa angkutan, dokumen penting seperti peta, informasi, intelejen dan sebagainya); c) **propaganda**, baik secara terbuka (membela aspirasi perjuangan dan sebagainya) maupun tertutup (melalui organisasi-organisasi selubung/**front organizations**); d) **disinformasi**

¹² Roos and Gurr, dalam *Comparative Politics* (Juli 1989), hal 405, dikutip dalam M. Riza Sihbudi, op.cit, hal 93

(menyebarkan informasi palsu atau provokatif yang mendiskreditkan lawan); dan e) **perlindungan dan suaka**.¹³

Terorisme dapat digunakan sebagai senjata defensif maupun ofensif, untuk memelihara status quo atau untuk merusak sistem yang ada. Motivasi dasar didirikannya **Ku Klux Klan** di bagian Selatan Amerika Serikat sesudah perang saudara, **Organization de l'Armee (OAS)** di Aljazair sewaktu Perancis mencoba menindas hasrat merdeka rakyat Aljazair, bertujuan defensif yaitu memelihara status quo. Sedangkan **IRGUN** di Palestina, **IRA** di Irlandia Utara, **The Weatherman** di AS, **Tupa Maros** di Uruguay, kelompok **Boader-Meinhof**, **Red Brigade**, dan lain lain mempunyai tujuan ofensif.¹⁴

Dalam rangka mencapai tujuan politik tersebut, **maksud-maksud** suatu kelompok melakukan terorisme¹⁵ antara lain adalah sebagai berikut:

1. Memperoleh **konsesi-konsesi tertentu**, seperti uang tebusan, pembebasan tahanan (politik), penyebaran pesan, dan sebagainya;
2. Memperoleh **publisitas luas**. Teroris ingin menarik perhatian masyarakat luas kepada aspirasi perjuangan dan pengakuan terhadap eksistensinya sebagai pihak yang ber sengketa. Karena biasanya kelompok teroris itu kecil, maka untuk maksud itu, aksi terorisme yang dilakukan haruslah cukup dramatik dan menggemparkan;
3. Menimbulkan **kekacauan luas, demoralisasi** dan **disfungsi** sistem sosial. Ini adalah maksud tipikal dari kaum revolusioner dan anarkis. Tetapi strategi ini sering gaga. Masyarakat yang sebelumnya mungkin bersimpati dengan tujuan perjuangan kaum disiden itu, akan ikut membantu penguasa memberantas terorisme yang membabi buta;

¹³ Hasnan Habib, op.cit, hal 579

¹⁴ Ibid, hal 573

¹⁵ Loc cit.

4. Memancing **retaliasi** dan atau **kontra-teror** dari pemerintah sedemikian rupa, sehingga menimbulkan situasi yang akan menguntungkan para teroris yang akhirnya bahkan mungkin dapat menggulingkan pemerintah;
5. Memaksakan **kepatuhan** dan **ketaatan**. Ini adalah maksud yang tipikal dari suatu pemerintahan totaliter/fasis/diktator. Teror yang dilakukan oleh pemerintah (state terrorism) terhadap rakyatnya sendiri bertujuan untuk menancapkan kekuasaan mutlak pada rakyat. Cara ini juga dipakai oleh organisasi teroris untuk maksud-maksud yang sama dikalangan para anggotanya.
6. **Menghukum** yang bersalah, atau dipandang sebagai simbol dari sesuatu yang jahat/salah, seperti orang-orang yang tidak setuju dengan tujuan perjuangan mereka, bekerja sama dengan penguasa, bergaya hidup yang bertentangan dengan paham mereka dan sebagainya.

Tujuan-tujuan tersebut diatas dicapai dengan melakukan penculikan, penyanderaan, pembunuhan, pembajakan, pengeboman, peledakan, peracunan, ancaman melalui surat-surat selebaran, intimidasi dan lain sebagainya.

Tujuan akhir terorisme adalah **politik**. Apapun latar belakang psikologi dan motivasi personal para pelakunya, namun tujuan politik selalu melandasinya; ia merupakan ciri dasar yang selalu hadir secara konsisten. Seorang psikolog sosial atau penegak hukum mungkin tidak melihat perbedaan instrinsik antara penyanderaan yang dilakukan oleh seorang kriminal untuk memperoleh uang tebusandan yang dilakukan oleh seorang teroris internasional yang terkenal, namun bagi seorang ahli terorisme modern, perbedaan itu mudah dapat dilihatnya. Tujuan-tujuan politik merupakan unsur esensial dari terorisme yang membedakannya dari tindakan-tindakan kekerasan kriminal lainnya atau yang dilakukan oleh orang-orang yang terganggu jiwanya.

Terorisme selalu dimuati oleh *perasaan sakit hati yang mendalam* mengenai suatu *ketidakadilan yang dirasakan*. Ketidakadilan itu bisa ketidakadilan sosial ataupun ekonomi, namun yang selalu dilihat sebagai biang keladinya ialah penguasa politik atau sistem politik. Karena para teroris yakin bahwa ketidakadilan itu tidak mungkin dihilangkan melalui cara-cara lain apa pun juga, maka terorisme sering disebut sebagai cara, sarana atau taktik akhir. Dalam upaya mencari pembalasan secara fanatik, kelompok sakit hati itu beralih kepada terorisme, kendati mengetahui bahwa terorisme tidak akan membawa kepada hasil yang diinginkan. Bahwa tercatat keberhasilan beberapa organisasi teroris dalam mencapai tujuan-tujuan politik antara lain kelompok-kelompok Irgun dan Stern Gang dalam perang kemerdekaan Israel, kelompok-kelompok insurgensi dalam berkuasanya kaum Sandinista di Nicaragua, begitu pula PLO dalam mencapai sebagian dari tujuan politiknya, namun keberhasilan itu tidak diraih oleh taktik-taktik teroris semata-mata.¹⁶

Tujuan politik yang selalu ada itu umumnya ditransformasikan ke tingkat moralita yang lebih tinggi, dengan maksud memperoleh pembenaran (*justification*). Organisasi-organisasi teroris modern tidak hanya mengumumkan tujuan politiknya, melainkan sekaligus mengaitkannya dengan suatu "kebenaran universal". Bagi anggota Hizbullah (Afghanistan dan Palestina) dengan 'JIHAD', bagi Tentara Merah (Jepang) dengan pencetusan revolusi dunia, bagi anggota PLO dengan pemenuhan panggilan "takdir" (*destiny*) dan memperoleh kembali tanah air mereka.

Dinyatakan bahwa salah satu tujuan prinsip dari terorisme adalah memisahkan masyarakat dari penguasa yang sedang memegang suatu kekuasaan/jabatan. Menurut **Thornton**, proses disorientasi ini adalah salah satu ciri yang banyak digunakan oleh teror.¹⁷ Namun, dia

¹⁶ *Ibid*, hal 574

¹⁷ Grant Wardlaw, **Political Terrorism: Theory, Tactics, and Counter Measures**, Cambridge University Press, London, 1982, hal 34

mengingatikan bahwa teror hanya cocok jika para pemberontak memiliki tingkatan yang rendah dari dukungan politik yang sebenarnya tetapi mempunyai potensi yang tinggi untuk dukungan semacam itu.

Propaganda teroris mungkin merupakan sebuah elemen yang penting didalam menentukan apakah permusuhan yang ditimbulkan oleh terorisme akan ditujukan menentang para pemegang kekuasaan atau para pemberontak.¹⁸ Sebuah penemuan yang signifikan dari studi-studi serangan udara adalah bahwa tidaklah selalu negara-negara yang bertanggung jawab terhadap setiap pengeboman disalahkan oleh para korban. Agaknya para korban menyalahkan pemerintah mereka sendiri atas gagalnya melindungi diri mereka.

Teoritikus yang paling mengetahui tentang metode-metode memprovokasi pasukan-pasukan keamanan kedalam suatu reaksi yang canggung atau sikap ilegal adalah *Carlos Marighela*¹⁹. Dalam **Minimanual of The Urban Guerillanya**, ia cukup spesifik menyebutkan tujuan dari taktik-taktik teroris :

"Ketika sebagian besar dari penduduk memulai melakukan aktivitasnya, kesuksesannya dijamin. Pemerintah hanya bisa meningkatkan penindasannya, lalu membuat kehidupan warganya lebih keras dari sebelumnya. Rumah-rumah akan dihancurkan, polisi menyelidiki, penduduk tak bersalah ditahan, komunikasi diputus, teror polisi akan menjadi suatu acara harian, dan akan ada lagi dan lagi pembunuhan yang berbau politik besar-besaran.....situasi negara akan menjadi sebuah situasi militer."

Selain itu, terorisme mungkin ditujukan untuk menimbulkan atau mempercepat kerusakan yang bersifat umum dalam ketertiban sosia, menghilangkan semangat warga negara dan menyebabkan mereka kehilangan kepercayaan pada kemampuan pemerintah yang sedang berkuasa dalam memelihara ketertiban dan stabilitas atau menjamin keselamatan mereka. Terutama ketika sebuah kelompok revolusioner

¹⁸ *Ibid*, hal 36

¹⁹ Carlos Marighela, *Minimanual of the Urban Guirella*, dalam *ibid*, hal 37

menjadi tidak sabar dengan orang-orang—pada kepentingan siapa mereka menegaskan untuk bertindak—karena mereka gagal dalam menilai dan bertindak seperti peran revolusioner tersebut. Mereka mungkin akan berbelok kepada terorisme sebagai bagian dari sebuah kampanye untuk mempolitisir dan memobilisasi khalayak ramai.

Dalam teorinya, jika terorisme digunakan untuk menunjukkan sebuah pemerintahan yang tidak mampu untuk melindungi warganya atau menjaga fungsi-fungsi vital, mendesak pemerintahan yang senantiasa membuang-buang sumber penghasilan untuk operasi-operasi keamanan besar-besaran dan memperturutkan hati pada langkah-langkah yang represif yang mempengaruhi kehidupan rakyat banyak, akan datang suatu waktu dimana rakyat akan memberontak terhadap pemerintah. Dalam prakteknya, strategi semacam itu sering diketahui terlebih dahulu dan penggunaan terorisme mungkin mengubah rakyat, bahkan para simpatisan menentang kekerasan teroris dan para pelakunya. Sehingga menyebabkan rakyat mendukung usaha-usaha pemerintah untuk menumpas teroris.

Tujuan utama selanjutnya dari operasi teroris yang spesifik adalah untuk membuat kelonggaran dari kekuatan yang mengontrol. Hal ini berbentuk seperti permintaan untuk perubahan-perubahan kebijakan (sebagai contoh, pemerintah Austria setuju untuk memberhentikan perijinan bagi para pengungsi Yahudi yang transit melalui Austria dalam perjalanan kembali ke Israel, bagi keamanan pelepasan para sandera yang dilakukan oleh para teroris Palestina di bulan September 1973), uang tebusan (khususnya yang digunakan oleh kelompok teroris Amerika Selatan), dan pelepasan para tahanan atau publikasian dari manifesto teroris. Penggunaan para sandera sebagai penarik dalam proses tawar-menawar menciptakan situasi yang dramatis yang meyakinkan bahwa permintaan-permintaan teroris diperhatikan.

Terorisme juga memiliki sejumlah tujuan internal bagi pergerakan teroris itu sendiri. **Groom**²⁰ melihat bahwa teror mungkin berguna sebagai muslihat yang berdarah karena sekali calon yang melibatkan dirinya dalam sebuah aksi teror adalah sulit baginya untuk keluar, dan dia bisa dikontrol dengan ancaman yang dikeluarkan oleh temannya kepada para penguasa.

Fungsi internal lain yang digunakan oleh terorisme adalah pembentukan semangat juang diantara para anggota pergerakan dan pendukung-pendukung mereka. Jika para teroris bisa menembus lingkaran keamanan dan meledakkan bom, membunuh target yang sangat dilindungi, memaksa keluar kemudahan-kemudahan dari target organisasi, kekuatan dan kredibilitas mereka diakui.

Dengan demikian, penulis memahami bahwa aktivitas-aktivitas teroris mungkin memiliki banyak tujuan. Sementara efek utamanya adalah terciptanya rasa takut dan kegelisahan, sasaran-sasarannya mungkin untuk memperoleh kelonggaran, mendapatkan publisitas maksimum demi sebuah kepentingan, menimbulkan penindasan, mematahkan tatanan sosial, membangun semangat juang dalam gerakan atau melaksanakan kepatuhan. Beberapa sasaran mungkin dikerjakan secara simultan dalam satu kejadian.

Bisa atau tidaknya terorisme mencapai tujuannya sangat tergantung pada keakuratan dari penghitungan-penghitungan yang dimiliki para teroris berkenaan dengan pengaturan waktu, tingkat dan tipe dari aktivitas-aktivitas teroris.

2.2 Perkembangan Strategi Terorisme

Sasaran langsung dari kelompok teroris adalah menciptakan teror (suasana/kengerian), bukan penghancuran. Rasa ketakutan yang mencekam dan kegelisahan politik yang ditimbulkannya, mereka memanfaatkan untuk memaksa pemerintah/penguasa memberi konsesi-

²⁰ Ibid, hal 40

konsesi politik yang sejalan dengan tujuan-tujuan politiknya. Dilihat dari segi itu, maka terorisme pada dasarnya adalah suatu taktik psikologis atau "perang urat syaraf" dengan dua unsur terpentingnya, yakni kengerian dan publisitas. Kengerian itu dapat berkembang menjadi histeria irasional, seperti yang terjadi dalam musim panas tahun 1985 dan 1986 sewaktu para wisatawan Amerika menghindari Eropa sebagai tujuan wisata disebabkan oleh serangkaian peristiwa terorisme di benua itu yang bermula dengan peristiwa pembajakan pesawat TWA 847 dari Athena ke AS pada bulan Juni 1985 dan pemboman sebuah bar di Berlin (Jerman) menewaskan beberapa marinir AS yang berada didalamnya (April 1986).²¹

Rasa ngeri hanya akan timbul jika perbuatan terorisme itu diketahui dan tersiar luas, atau jika dipublikasikan. Kendati kerahasiaan sangat penting dalam mempersiapkan dan melaksanakan suatu operasi terorisme, tetapi mempublikasikannya semaksimal mungkin setelah pelaksanaannya, adalah lebih penting lagi. Dalam hubungan ini, kemajuan teknologi informatika sangat membantu terorisme, lebih daripada kemajuan teknologi senjata. Peliputan langsung para teroris dan tuntutan mereka dimungkinkan dapat dilihat secara langsung oleh pelosok dunia manapun. Disamping ia membangkitkan rasa amarah internasional, dunia juga sadar bahwa suatu kelompok kecil mampu memaksa dunia internasional memusatkan perhatian kepada mereka.

Salah satu bentuk kekerasan politik yang sering menggunakan terorisme ialah **perang gerilya**, sehingga sering diidentikkan dengan terorisme. Padahal, keduanya saling berbeda. **Perang gerilya**²² adalah perang (antar negara) yang dilakukan oleh pihak yang lemah terhadap pihak yang kuat dengan melakukan agresi. Istilah ini, yang berarti "perang kecil", pertama kali digunakan oleh pejuang Spanyol pada tahun 1810 melawan tentara Napoleon.

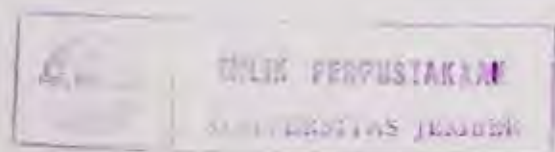
²¹ David E. Long, *The Anatomy of Terrorism*, The Free Press, New York, 1990, hal 6 dalam Hasnan Habib, op.cit, hal 575

²² Loc cit

Mungkin teoritikus gerilya yang paling besar adalah **Mao Tse-Tung** yang mengembangkan sebuah teori yang berhubungan untuk menyatukan seperangkat taktik-taktik militer yang digunakan oleh mereka yang kekurangan pasukan. Mao menyimpang jauh dari teori-teori revolusioner Marxist dan strategi militer yang pernah ada. Dalam slogannya yang terkenal "kekuatan politik menimbulkan laras senjata", Mao mengaku bahwa basis militer merupakan kekuatan politik. Dia juga mengetahui bahwa pada permulaan perjuangan, kekuatan yang dari segi jumlah dan teknologi rendah ia menekankan tentang pentingnya kekuatan politik sebagai pengganti kekuatan militer. Dengan demikian hal ini disadari penting bahwa gerilya-gerilya sangat dimotivasi oleh politik sehingga diperkuat dukungan politik dari kaum tani, mereka dapat bertahan dari kemunduran militer di awal-awal dan memiliki tekad yang bulat untuk melanjutkan kampanye yang berlarut-larut yang akhirnya akan mengalahkan oposisi yang lamban dan kurang berdedikasi.

Perang gerilya biasanya dilakukan dalam kerangka strategi yang lebih besar untuk membantu tentara reguler. Tetapi ia juga dapat berdiri sendiri, terutama jika tentara reguler telah hancur, untuk meneruskan perlawanan. Berbeda dari terorisme, yang sasarannya adalah nonkombatan, sasaran utama perang gerilya adalah unsur-unsur kombatan, yaitu kekuatan militer musuh. Tetapi gerilya juga menghantam sasaran-sasaran non-kombatan, untuk mengacau lambung atau daerah garis belakang musuh guna memecah kekuatannya.

Teror adalah salah satu cara yang sering digunakan dalam perang gerilya. Biasanya jika perang telah berlangsung lama, dan pihak agresor semakin ganas karena tidak berhasil mematahkan perlawanan gerilya. Namun, sasaran utama gerilya tetap kombatan musuh.



Dalam hal ini, untuk memperjelas maksud antara teror dengan perang gerilya berikut persamaan dan perbedaan diantara keduanya²³ :

Persamaan antara Teror dan Perang Gerilya :

1. Baik teror maupun perang gerilya sama-sama menimbulkan kegelisahan dan ketakutan bagi pihak yang menjadi sasaran.
2. Baik teror maupun perang gerilya menggunakan cara-cara dan taktik serta teknik yang inkonstitusional dan bersifat tertutup sebagai pembeda terhadap perang terbuka. Walaupun dalam keadaan tertentu perang gerilya bisa merupakan bagian perang terbuka, dilihat dari sudut pihak yang lemah, karena salah satu ciri perang gerilya adalah dilakukan oleh pihak yang lemah terhadap pihak yang kuat.
3. Baik teror maupun perang gerilya sama-sama menimbulkan korban luka-luka, kematian, dan sejenisnya karena menggunakan berbagai macam senjata dan bahan peledak.

Adapun **perbedaan** antara **Teror** dan **Perang Gerilya** adalah:

1. Teror bisa bersifat nasional dan internasional, sedangkan perang gerilya hanya bersifat nasional, biasa dilakukan oleh pihak yang lemah dalam suatu wilayah negara tertentu (pihak terjajah lawan penjajah atau pihak yang mencoba melakukan kudeta terhadap pihak yang sedang memerintah).
2. Teror lebih banyak memilih sasaran strategis daripada sasaran taktis walaupun skala kegiatannya kecil, sedangkan gerilya selalu dengan sasaran taktis sebagai bagian dari keseluruhan tindakan strategis untuk memenangkan perang yang sedang berlangsung.
3. Tindakan teror yang dilakukan dalam hubungan kelompok akan diproses hukum di negara mana dia beroperasi, kecuali teror dalam

²³ H. Lukman Saksono, Ph. D, M.Sc. dan M. Puspa Heryadi, B.Ph., *Amerika Serikat, Inggris, Yahudi, dan Terorisme Internasional*, PT. Cendekia Jaya Utama, Bandung, hal 349-350

bentuk penjajahan, agresi invasi dan intervensi yang belum ada proses hukum terhadapnya, sedangkan perang gerilya tidak bisa diterapkan terhadapnya dalam hukum perang karena perang gerilya itu sendiri merupakan perang atau bentuk pertempuran yang inkonstitusional dan tidak termasuk dalam Konvensi Jenewa, juga bukan sebagai bagian dari tindakan kriminalitas.

Dengan melihat berbagai hal diatas, selanjutnya berkembang apa yang dinamakan sebagai taktik-taktik gerilya kota yang bertujuan memberikan/mengantarkan perjuangan langsung kepada pemerintah.²⁴ Memang dalam teori gerilya kota bahwa taktik-tektik terorisme menjadi lebih nyata dan teori ini memberikan hubungan antara teori-teori revolusioner dengan terorisme modern. Gerilya-gerilya kota mencari untuk mendapatkan perhatian internasional dengan tindakan-tindakan kekerasan yang dramatis. Pembunuhan-pembunuhan, pemboman pemboman, penculikan-penculikan, perampokan-perampokan bank, dan pembajakan semuanya telah menjadi senjata yang umum bagi aktivis politik kota. Kelompok-kelompok yang lain telah menggunakan taktik-taktik ini dan mempengaruhi mereka lebih jauh lagi dengan memperluas konflik dengan individu-individu dan negara negara yang terlibat secara tidak langsung dalam perjuangan. Ini adalah terorisme internasional, sebuah kerangka baru dalam taktik-taktik teror.

Terorisme internasional adalah sebuah cabang, cabang terbaru dalam evolusi teori-teori revolusioner modern dan perang gerilya. Hal ini mengangkat tindakan-tindakan individu dari kekerasan kepada level strategi. Hal ini mencemarkan nama baik kekuasaan militer konvensional dengan mengganti kekerasan yang dramatis agar rakyat dapat mengamatinya. Itu melanggar aturan-aturan konvensional dari perjanjian yang telah disepakati, dan membuat dunia sebagai medan pertempurannya. Sehingga banyak warga masyarakat yang tak bersalah menjadi korbannya.

²⁴ Grant Wardlaw, *op.cit*, hal 45

Dengan mengakui bahwa tak ada batasan dalam konflik, maka tak ada pula bangsa-bangsa yang netral.

Untuk memahami kedudukan terorisme dalam perang revolusioner adalah penting dengan mempelajari secara lebih mendalam tentang teori perang revolusioner itu sendiri. Yang pertama, membantu untuk membedakan antara banyaknya istilah yang menimbulkan kebingungan dalam semacam diskusi, khususnya istilah-istilah "**irreguler**", "**gerilya**", dan "**perang revolusioner**". Untuk tujuan-tujuan saat ini, istilah **perang irreguler** digunakan untuk memberi arti jangka waktu yang luas dari perang yang tidak konvensional. "**Perang gerilya**" adalah sebuah bentuk dari operasi militer yang tak teratur dimana taktik memukul dan menghilang digunakan untuk menyerang pasukan militer konvensional dan sering beroperasi dengan dukungan dari pasukan militer tetap yang disewa dalam perang konvensional. Poin yang penting untuk dicatat adalah bahwa target-target dan operasi-operasi pada dasarnya adalah perang militer. Sebaliknya, perang revolusioner mungkin menerapkan baik metode-metode gerilya maupun konvensional (baik secara terpisah atau secara bersama-sama). Selain itu penggunaan metode-metode politik psikologi juga diperlukan untuk membangun sebuah sistem politik alternatif. Perbedaan konsep ini dibuat oleh **Kolonel George Bonnet**²⁵, seorang analisis militer Perancis yang mengajukan persamaan di bawah ini:

Perang Revolusioner = Taktik-taktik Gerilya + Aktivitas Politik

Jadi obyek sentral dalam perang revolusioner bukanlah hanya (atau bahkan tidak sama sekali) untuk kemenangan militer tetapi juga dukungan dari rakyat. Oleh karena itu, taktik-taktik gerilya adalah yang nomor dua bagi taktik-taktik politik. Sehingga, tentu saja ilmu politik juga bagian dari bentuk-bentuk lain dari perang konvensional dan bahkan akhirnya bentuk dari perang apapun. Tujuan-tujuan dari perang konvensional adalah mencari tidak lebih dari perubahan politik secara total. Dan sejak rakyat

²⁵ Ibid, hal 46

menjadi targetnya, maka metode-metode politik psikologi pastilah yang terpenting.

Dalam tulisannya yang terkenal, "**On Protracted Conflict**", Mao membagi perang revolusioner kedalam tiga fase²⁶. **Fase pertama**, meliputi strategi serangan pasukan yang sedang berkuasa dan strategi pertahanan pemberontak, sepanjang taktik-taktik gerilya adalah yang nomor dua bagi perang aktif konvensional. **Fase yang kedua** merupakan periode dari konsolidasi strategi musuh dan persiapan kita dalam menghadang serangan. Ini adalah fase yang terpanjang dan yang utama sepanjang perang gerilya mencapai pada sebuah posisi tertinggi. **Fase ketiga** dimulai sepanjang para pemberontak meningkatkan sebuah serangan balasan dan mendesak para pejabat yang berkuasa untuk mundur. Kembali perang gerilya mengambil sebuah peranan sekunder dan metode-metode konvensional menjadi bertambah penting. Menurut Mao, pertimbangan-pertimbangan militer ini dikalahkan oleh pentingnya taktik-taktik psikopolitik. **Shultz** menekankan hal ini ketika dia menulis:

"Jadi, tujuan ideologi, bentuk organisasi dan isi program adalah penting bagi para pemberontak yang pasti mendemonstrasikan kepada khalayak ramai sehingga ada kerangka alternatif untuk memuaskan kebutuhan-kebutuhan mereka. Hanya dengan jalan ini para pemberontak akan mampu untuk bersosialisasi dan memobilisasi khalayak ramai dalam mendukung kepentingan mereka."²⁷

Dengan demikian perang revolusioner adalah konstruktif dan destruktif. Dengan memegang teguh hal ini dalam pikiran, maka adalah mungkin untuk menguji peranan terorisme dalam perang revolusioner.

²⁶ Mao Tse Tung, **On Protracted Conflict**, dalam loc cit

²⁷ Shultz, dalam loc cit

Jenderal Giap²⁸, dalam tulisannya **"The South Vietnamese People Will Win"** secara langsung mendukung penggunaan terorisme:

"Berapapun harga dari pengalaman-pengalaman kemenangan mereka yang sulit, para pecinta tanah air kami di Selatan menyadari bahwa.....jalan setapak yang paling tepat untuk diikuti.....adalah kekerasan revolusioner dan perang revolusioner.....hanya dengan kekerasan revolusioner rakyat dapat.....mengambil kekuasaan."

Seperti diimplementasikan oleh Fron Liberal Nasional (NLF atau Vietkong) di Vietnam Selatan, "Kekerasan Revolusioner" meliputi semua tindakan-tindakan utama teroristik (pembunuhan, pemboman-pemboman, penyanderaan, dan lain-lain).

Teoritikus yang lebih tenang dalam dukungan bagi terorisme, **Che Guevara** sebagai contoh, memperingatkan bahwa terorisme adalah:

"Sebuah langkah yang pada dasarnya tidak efektif dan sembarangan dalam hasilnya. Sejak hal itu sering membuat korban-korban dari rakyat yang tidak bersalah dan mrnghancurkan sejumlah kehidupan yang akan sangat berharga bagi revolusi"²⁹

Bagaimanapun, **Guevara** menyampaikan dengan tegas terorisme sebuah peranan yang terbatas:

"Terorisme seharusnya dianggap taktik yang berharga ketika itu digunakan untuk membunuh beberapa pemimpin terkemuka dari kekuatan-kekuatan penekan yang dikenal dengan kekejamannya, efisiensinya dalam menindas, atau mutu yang lain yang membuat pembunuhan terhadapnya berguna. Tapi membunuh orang-orang yang tidak begitu penting adalah tidak patut diberi suatu penilaian yang baik sejak hal itu membawa pada peningkatan tindakan balas dendam, termasuk kematian."³⁰

Debray, dalam bukunya **"Revolution in the Revolution"**, juga secara tegas membatasi kegunaan dari terorisme :

"Terorisme tidak dapat mengambil peranan yang menentukan dan itu membawa bahaya-bahaya tertentutetapi jika itu adalah bagian dari perjuangan fundamental, bila

²⁸ Jenderal Giap, *The South Vietnamese People Will Win* dalam loc cit

²⁹ Che Guevara dalam loc cit.

³⁰ Ibid, hal 48

dilihat dari sudut pandang militer hal itu sebagai sebuah nilai strategi."³¹

Alasan bagi penurunan terorisme kepada tingkat yang kedua adalah jelas bagi para teoritikus revolusioner. Perang revolusioner, jika hal itu sukses, membutuhkan komitmen atau setidaknya kerjasama dari khalayak ramai. Seperti halnya Shultz yang berkomentar :

*"Teror mungkin.....digunakan secara efektif menentang rakyat tetapi hanya dibawah kondisi-kondisi yang sangat selektif dan terkontrol. Teror tingkat kedua - penculikan dan indoktrinasi—digunakan untuk melawan elemen-elemen kelas tertentu untuk membujuk mereka agar mendukung pemberontakan."*³²

Berdasarkan uraian tersebut diatas, terdapat beberapa kemungkinan perkembangan terorisme di masa depan, sebagai berikut:

1. Terorisme menjadi **perang pengganti (surrogate warfare)**. Seperti yang telah dijelaskan di muka, terorisme adalah perang politik yang menggunakan atau mengancam menggunakan kekerasan fisik dalam mencapai tujuannya, meskipun pada tingkat yang jauh lebih rendah daripada perang biasa. Kemungkinan bentuk/macam perang dewasa ini ialah **perang konvensional modern**, baik umum maupun terbatas (meskipun tidak terlalu mungkin), dan **konflik intensitas rendah** atau perang kecil (lebih mungkin) termasuk didalamnya perang gerilya. Bentuk kedua ini, kendati jauh lebih sedikit memerlukan sumber daya dibanding perang konvensional modern, namun masih tetap berat bagi negara kecil atau negara berkembang, apalagi jika ia berlangsung lama. Oleh karena itu, terorisme internasional merupakan alternatif ketiga. Ia bukan perang konvensional, bukan pula perang kecil. Ia adalah **perang politik**,

³¹ Debray, *Revolution in the Revolution* dalam ibid, hal 48-49

³² Shultz, loc cit.

- perang pengganti**, yaitu pengganti perang, yang tidak memerlukan banyak sarana dan sumber daya.
2. **Munculnya terorisme gabungan**. Berbagai kelompok teroris di dunia memperlihatkan kesamaan ideologi dan platform perjuangan. Keadaan ini memungkinkan terjalannya kerjasama dan operasi bersama, yang memang sudah terjadi beberapa kali.
 3. **Meningkatnya daya penghancur terorisme**. Daya penghancur dan dampak terorisme akan meningkat, tidak saja karena kemajuan teknologi, tetapi juga dengan semakin modernnya masyarakat. Masyarakat modern rawan terhadap terorisme, karena daerah perkotaan dengan lingkungannya yang padat memberikan banyak sasaran empuk. Kesibukan sehari-hari di kota-kota besar relatif mudah dilumpuhkan melalui sabotase terhadap sistem jaringan listrik, jaringan komunikasi, atau dengan meracuni sumber/persediaan air bersih. Udara dalam gedung bertingkat yang tertutup rapat dapat diracuni dengan bahan-bahan kimia dan biologi melalui sistem ventilasinya.

2.3 Libya dan Terorisme Internasional

Negara yang dikuasai Khadafy adalah salah satu negara setelah abad yang lalu mulai mengalami perubahan dramatis di bidang politik, ekonomi dan sosial. Antara 1913 dan 1942, Libya adalah jajahan Italia. Regim kolonial ini tergolong brutal; penduduk Italia pada tahun 1942 di Libya diperkirakan mencapai 100.000 orang dari keseluruhan penduduk 700.000 orang, mendesak para petani pribumi dari pedalaman menuju padang pasir yang tandus. Suatu sikap menolak pasti dihadapkan pada tindakan kejam. Diperkirakan terdapat 80.000 orang Libya dimasukkan ke dalam kamp-kamp konsentrasi dan 20.000 orang lainnya dipaksa migrasi. Dari 1945-1951, Libya diperintah oleh Inggris dan Perancis. Raja Idris menduduki kekuasaan pada tahun 1951 setelah resolusi PBB 1949 memberi kemerdekaan nominal pada negara tersebut.

Sampai permulaan 1960-an masih merupakan negara miskin, kebanyakan masyarakatnya bertani dan secara ekonomis bergabung pada bantuan yang diberikan oleh AS dan Inggris sebagai imbalan bagi penempatan pangkalan-pangkalan militer di Libya. Tetapi pada akhir 1969 Libya sudah menjadi negara produsen minyak terbesar nomor dua di Dunia Arab. GNP meningkat 450 persen antara 1962-1968.

Meskipun demikian, kenaikan itu tidak berarti merefleksikan mencuatnya standar kehidupan kebanyakan penduduk Libya; jumlahnya mencapai dua juta orang pada pertengahan 1960-an. Kerajaan yang korup dan pro Barat ini tidak mau atau tidak mampu memaksa perusahaan-perusahaan minyak yang beroperasi disana untuk membayar bahkan tingkat harga normal dari hasil yang telah mereka kurus; perusahaan-perusahaan minyak tersebut membayar murah bagi minyak Libya dibanding harga dari produsen lainnya, walaupun kualitas minyaknya lebih baik dari rata-rata dan posisi geografis Libya menjadikan murah ongkos pengiriman minyak tersebut langsung masuk ke saku orang-orang yang memang sudah kaya pada jaman rejim Idris.

Pada akhir tahun 1960-an, khususnya setelah perang Arab-Israel 1967 yang membangkitkan perasaan anti pati rakyat terhadap Barat di Dunia Arab, rejim monarki Libya mulai goyah. Meluasnya kerusuhan-kerusuhan anti pemerintah 1967 diikuti oleh periode pembaharuan pemerintah dan ekonomia yang sudah terlambat dan setengah hati; tetapi pada permulaan 1969 momentum pembaharuan menjadi lambat dan bahkan berhenti karena menghadapi berbagai kepentingan pribadi yang konservatif. Sejumlah kecil pengamat cukup dikejutkan oleh kudeta yang menggusur pemerintahan kerajaan tersebut. Orang yang suka berolok-olok terhadap gaya hidup kebanyakan orang Arab mengatakan setidak-tidaknya Amerika setuju dengan kudeta Khadafy pada waktu itu (31 Agustus 1969) karena mereka khawatir bahwa kudeta pro-komunis sudah diambang pintu.

Dari 3 bulan pertama menjadi jelas bahwa kehidupan rejim baru tersebut, **Nasional Arab Militan**, bukan sekedar retorika. Didalam negeri,

usaha-usaha yang dikuasai oleh pihak asing, kecuali bank dan perusahaan minyak dinasionalisasikan; peraturan Islam mengenai cara berpakaian dan larangan meminum minuman keras (mengandung alkohol) dipaksakan; dan dokter-dokter non-Arab, para guru dan teknisi digantikan oleh orang-orang Arab. Di luar negeri, rejim tersebut mulai mencari sekutu di Dunia Arab. Salah satu kegiatan Khadafy yang pertama adalah mengunjungi Presiden Mesir, Jamal Abdul Nasser, seorang yang kudetanya pada tahun 1952 danb ideologi Pan-Arabismenya telah memberikan inspirasi kuat pada Khadafy. Khadafy menawarkan dukungan kepada Nasser, begitupun sebaliknya. Dan pada akhir Desember 1969 Nasser tiba di Tripoli untuk menandatangani suatu **"Persekutuan Revolusioner Tertutup"** dengan Khadafy dan Presiden Sudan, **Ja'far Numery**.³³

Pada saat bersamaan, dalam rangka mencari hubungan lebih erat dengan dunia Arab, Khadafy mulai memutuskan beberapa ikatan bekas rejim Idris dengan Barat. Pada Desember 1969, Libya merundingkan pemindahan pangkalan lebih kecil yang dikuasai Inggris di Tobruk dan El Adam. Dari Januari 1970, Libya mencurahkan perhatiannya untuk mengusahakan harga yang lebih baik bagi minyak Libya.

Jika perundingan mengenai perbaikan harga minyak bagi Libya merupakan pengalaman rejim Khadafy yang paling kentara terhadap Barat pada tahun 1970-1971, tidak berarti itu merupakan tindakan satu-satunya. Pada Juli 1970, semua hak milik Italia dan penduduk tidak tetap Yahudi disana diambil alih. Menteri Luar Negri Italia, Aldo, belakangan dibunuh oleh Brigade Merah, memprotes keras tindakan itu, tetapi pengambilalihan berjalan terus, dan hampir 13.000 warga Italia meninggalkan Libya pada musim panas 1970. Pada September tahun yang sama, Khadafy memutuskan hubungan diplomatik dengan Yordania yang pro-Barat, setelah terjadinya pertempuran antara pasukan-pasukan Yordania dengan gerilyawan Palestina. Pada bulan Desember, bank-bank

³³ Mary Kaldar dan Paul Anderson. *Serangan AS ke Libya; Negara Berdaulat Dibantai*, MD Press, Jakarta, Juni 1987, hal 125

asing yang beroperasi di Libya dinasionalisasikan . Pada Juli 1971 hubungan diplomatik Libia dengan rejim Arab pro-Barat, yakni Raja Hassan dari Maroko, menjadi terputus setelah Tripoli memberi dukungan yang prematur bagi usaha kudeta anti-Hassan.³⁴

Meskipun demikian, kiranya keliru jika dikatakan bahwa Khadafy berdasarkan kenyataan ini sepenuhnya bertentangan dengan pemerintah-pemerintah Barat. Sesungguhnya, sikap anti komunis dari rejim ini telah dibuktikan oleh kebanyakan pengamat dari Barat, khususnya pada 1971 ketika golongan komunis mendalangi kudeta melawan Ja'far Numery di Sudan telah digagalkan dengan bantuan Khadafy. Libya, bekerjasama dengan Dinas Intelejen Inggris telah memaksa pesawat komersial Inggris yang sedang membawa dua orang pemimpin kudeta mendarat untuk ditahan di Libya. Kedua pemimpin kudeta ini diserahkan kepada pemerintah Sudan dan dieksekusi.

Garis "revolusioner" yang dianut Khadafy menyebabkannya dituding - khususnya oleh pembentuk opini Barat -- sebagai seorang "dalang teroris". Tetapi, hal ini tidak dapat dengan begitu saja dibenarkan. Karena sebelum menyebut seseorang itu sebagai dalang teroris perlu diketahui terlebih dahulu apa sebenarnya yang dimaksud dengan "teroris" atau "terorisme". Seperti yang telah penulis jelaskan di awal Bab II ini, bahwa hingga saat ini belum ada kesepakatan diantara para pakar ilmu hubungan internasional dan atau ilmu politik tentang definisi "terorisme".

Seperti pendapat yang dikemukakan oleh **Dr. Kent Layne Oots**³⁵ mendefinisikan "terorisme" sebagai berikut:

"a). sebuah aksi militer atau psikologis yang dirancang untuk menciptakan ketakutan, atau membuat kehancuran ekonomi atau material; b). sebuah metode pemaksaan tingkah laku pihak lain; c). sebuah tindakan kriminal bertendensi mencari

³⁴ *Ibid*, hal 127

³⁵ Dr. Kent Layne Oots, *op.cit*, hal 94

publisitas; d). tindakan kriminal bertujuan politis; e). kekerasan bermotifkan politik; dan f). sebuah aksi kriminal guna meraih tujuan politik dan ekonomi.”

Apabila definisi ini dipakai, maka perang atau usaha memproduksi senjata-senjata pemusnah umat manusia (seperti peluru-peluru kendali dan bom-bom kimia) dapat dikategorikan sebagai “terorisme”. Berarti, bukan hanya Khadafy yang patut dijuluki “dalang teroris” melainkan juga para pemimpin negara maju, termasuk Presiden Amerika Serikat dan Uni Soviet. Begitu pula sikap para donatur (pemberi hutang) negara-negara maju kepada negara-negara berkembang yang seringkali ikut campur dalam politik para debitur, dapat disebut sebagai “terorisme”.

Selanjutnya, tudingan “teroris” yang diarahkan ke Khadafy, pada umumnya disebabkan karena politik Khadafy yang membantu gerakan-gerakan pembebasan (atau pemberontak, menurut pihak lain) di sejumlah negara. Jika argumentasi ini yang digunakan, maka seperti ditulis **Dr. Paul Wapner**³⁶, bahwa Ronald Reagan pun patut mendapat julukan sebagai “dalang teroris”. Seperti diketahui, Reagan — yang paling sering mencap Khadafy sebagai “teroris” itu — justru sangat bersemangat dalam membantu kaum pemberontak Contra di Nicaragua, dan kaum Mujahidin di Afghanistan.

Jadi, penggunaan istilah “teroris” atau “terorisme” sangat bersifat subyektif sekali. “Teroris” bagi satu pihak, sama dengan “gerakan pembebasan” (atau bahkan “pahlawan”) bagi pihak lain. Syaikh Abdul Karim Obeid, misalnya, adalah “teroris” bagi Israel, tetapi “pahlawan” bagi kaum Syi’ah Lebanon. Bagi Israel, Yitzhak Shamir adalah “pahlawan”, tetapi bagi bangsa Palestina ia adalah “teroris”. Tampaknya benar apa yang dikatakan Qadhafi, **“If Abu Nidal is a terrorist, the so is George Washington”**.³⁷

³⁶ Dr. Paul Wapner, “Problem of US Counter - Terrorism: The Case of Libya”, Alternatives, XII, 1988, dalam M. Riza Sihbudi, **Bara Timur Tengah**, Mizan, Bandung, 1991, hal 95

³⁷ **News Week**, 20 Januari 1986 dalam loc cit

Digital Repository Universitas Jember

Beberapa peristiwa penting yang terjadi di dunia, sehingga AS menuduh Libya (Khadafy) sebagai dalang terorisme internasional, diantaranya adalah:

1. Pembunuhan empat belas warga Libya oleh negara Libya sendiri, karena mereka dianggap sebagai kaum penyempal Libya (1985);
2. Penyerangan terhadap kedutaan besar AS di Tripoli (1979);
3. Serangan kembar Khadafy di Roma dan Wina (28 Desember 1985)
4. Pemboman sebuah klub malam Jerman yang menewaskan marinir AS (April 1986);
5. Peledakan pesawat Boeing 747 Pan Am No. 103 (21 Desember 1988);
6. Peledakan pesawat UTA milik Perancis (1989).

Dengan berdasarkan pada kejadian kejadian diatas dan mengandalkan data-data yang sebenarnya bersifat sangat subyektif dan semena-mena, hingga saat ini AS menganggap Khadafy sebagai dalang terorisme internasional -- yang cepat atau lambat-- perlu untuk dimusnahkan.

2.4 Pandangan AS Terhadap Terorisme Internasional Timur Tengah

2.4.1 Timur Tengah Secara Umum

Terorisme menjadi salah satu istilah yang populer dalam satu dekade terakhir ini. Terorisme, bersama istilah-istilah lain seperti, "fundamentalisme", "radikalisme", dan "militanisme", pada umumnya dipopulerkan oleh media massa dan para pakar sosial politik Barat,³⁸ yang kemudian ditelan mentah-mentah oleh sebagian besar media massa dan para pakar sosial politik Indonesia, tanpa berusaha mencari makna

³⁸ M Riza Sihbudi, *Timur Tengah, Dunia Islam dan Hegemoni Amerika*, Pustaka Hidayah, Jakarta, 1993, hal 91

sebenarnya dari istilah-istilah tersebut. Istilah-istilah tersebut umumnya dikaitkan dengan tingkah laku politik sebagian besar komunitas Arab di kawasan Timur Tengah yang berkonotasi negatif³⁹, dalam arti tidak disukai pihak Barat. Dengan kata lain, setiap tindakan - yang sebenarnya bersifat reaktif - yang dilancarkan orang-orang Timur Tengah yang tidak sejalan atau bertentangan dengan kepentingan Barat, maka ia disebut terorisme⁴⁰. Sehingga setiap mendengar istilah terorisme maka yang terbayang dibenak sebagian besar kita adalah Muammar Khadafy, Hafiz al-Asad⁴¹, Yasser Arafat, PLO⁴², Imam Khomeini, milisi Hizbullah, Jihad Islam⁴³, dan kelompok-kelompok anti Barat lainnya.

Shireen T. Hunter dalam salah satu artikelnya, "**Terrorism A Balance Sheet**", misalnya, secara terang-terangan menuduh bahwa, "There are many similarities in the Iranian, Syrian, and Libyan uses of the terrorism as an instrument of policy".⁴⁴ Pandangan ini jelas mencerminkan stereotipe Barat terhadap komunitas Timur Tengah yang tidak mereka sukai.

Pada 17 Oktober 1985, Presiden Reagan bertemu dengan Perdana Menteri Israel Simon Peres di Washington. Bahwasanya kunjungan PM Israel ini berlangsung pada saat hubungan Amerika-Israel sangat harmonis. Dan memang, Peres disambut hangat oleh media Amerika sebagai tokoh perdamaian, dan memuji komitmen-komitmennya untuk "lebih baik menanggung biaya perdamaian daripada membayar harga peperangan". Dalam pertemuan tersebut Presiden AS berkata bahwa ia dan Mr. Perse

³⁹ Daniel Pipes, "Why Asad's Terror Works and Qadhafi's Does Not", *Orbis* Fall, 1989, hal 501 dalam loc cit

⁴⁰ Graham Norton, "Tourism and International Terrorism", *The World Today*, Februari 1987, hal 30-33; dan David C. Rapoport, "Messianic Sanctions for Terror", *Comparative Politics*, Januari 1988, hal 195 dalam loc cit

⁴¹ M. Riza Sihbudi, *Bara Timur Tengah*, op.cit, hal 94-95

⁴² Robert Goren, *The Soviet Union and Terrorism*, London: George Allen & Union, 1984, khususnya ab 5, hal 106-141 dalam M. Riza Sihbudi, *Timur Tengah*, op.cit, hal 92

⁴³ Maurice Latey, "Terrorist Facts and Fancies", *The World Today*, Februari 1988, hal 35-37 dalam loc cit

⁴⁴ Shireen T. Hunter, "Terrorism A Balance Sheet", *The Washington Quarterly*, Summer 1989, hal 20 dalam loc cit.

membahas "momok bengis terorisme" yang telah membunuh begitu banyak korban Israel, Amerika dan Arab, serta menimbulkan petaka kepada banyak orang lainnya, dan menambahkan, "Kami sepakat bahwa terorisme tidak boleh merintangi upaya-upaya kami untuk mencapai perdamaian Timur Tengah."⁴⁵

Realitas-realitas politik ini memberi kerangka yang perlu bagi setiap pembahasan tentang "momok bengis terorisme" yang, dalam pengertian-pengertian rasis dalam diskurs Amerika menunjuk pada aksi-aksi teroris oleh bangsa Arab, tapi tidak oleh Yahudi, sebagaimana "perdamaian" berarti penanganan yang menghormati hak menentukan nasib sendiri bagi bangsa Yahudi, tapi tidak bagi bangsa Palestina.

Peres tiba di Washington untuk membicarakan perdamaian dan terorisme dengan mitra kriminalnya, langsung setelah ia mengirim pesawat-pesawat pembom untuk menyerang Tunis, tempat mereka membunuh 20 orang Tunis dan 55 orang Palestina. Sasarannya sama sekali tidak memiliki pertahanan, karena merupakan sebuah kompleks peristirahatan yang terdiri dari beberapa lusin rumah, penginapan-penginapan, kantor-kantor PLO, yang bersebelahan dan bercampur sedemikian rupa sehingga dilihat dari dekat pun kita sulit membedakan tempat-tempat itu.

Tunisia menerima pejuang Palestina atas perintah Reagan setelah mereka terusir dari Beirut dalam invasi dukungan AS yang menewaskan sekitar 20.000 orang dan menghancurkan bagian-bagian besar negeri itu.

Keterlibatan AS dalam serangan Tunisia juga tak dapat diragukan dengan serius. AS bahkan tidak memperingatkan para korban - sekutu-sekutu dekat Amerika - bahwa para pembunuh sedang mengintai. Orang mempercayai keputra-puraan AS bahwa Armada Keenam dan sistem pengawasan ekstensif AS di kawasan itu tak mampu mendeteksi pesawat-pesawat Israel yang mengisi bahan bakar selama terbang diatas Mediterania, perlu meminta penyyclidikan Kongresional tentang

⁴⁵ *New York Times*, 17, 18 Oktober 1985, dalam Noam Chomsky, *op.cit*, hal 70

ketakandalan total militer AS, yang jelas akan membiarkan kita dan sekutu-sekutu kita terbuka lebar bagi serangan musuh. "Laporan-laporan berita kini mengutip sumber-sumber pemerintah yang mengatakan bahwa Armada Keenam AS pasti tahu tentang datangnya serangan, tapi memutuskan untuk tak memberi tahu para pejabat Tunisia," lapor **Los Angeles Times**. Tetapi, "pernyataan yang amat penting itu tak dilaporkan dalam koran-koran besar pantai timur, **The New York Times** dan **The Washington Post**, tidak juga dalam koran-koran lain AS, tak pula ia dimanfaatkan oleh kantor-kantor berita internasional," ungkap koresponden **Economist London** di Timur Tengah, **Godrey Jansen**, yang menambahkan bahwa "persengkongkolan pasif AS sungguh-sungguh tampak jelas".⁴⁶

Orang boleh menandaskan bahwa pemboman Israel tersebut tidaklah termasuk dalam kategori terorisme internasional, sebab itu merupakan agresi yang kejahatannya jauh lebih serius, seperti ditegaskan oleh Dewan Keamanan PBB. Atau, orang dapat menegaskan bahwa tidaklah adil untuk menerapkan kepada Israel definisi "terorisme internasional" yang dirumuskan oleh pihak lain. Untuk menangkis penegasan terakhir, kita dapat mempertimbangkan doktrin Israel sendiri, seperti dirumuskan oleh Duta Besar Benyamin Netanyahu di sebuah Konferensi Internasional tentang terorisme. Faktor khas dalam terorisme, katanya menjelaskan, adalah "pembunuhan sistematis dan sengaja serta pencekaman (penduduk sipil) yang dimaksudkan untuk menimbulkan rasa takut."⁴⁷ Jelaslah bahwa serangan ke Tunisia dan kebiadaban-kebiadaban Israel lainnya selama berpuluh tahun masuk dalam konsep ini, meskipun kebanyakan aksi terorisme internasional tidak, termasuk serangan-serangan teroris yang paling ganas terhadap orang Israel (Ma'alot, pembantaian Munich, kekejaman di daerah pantai pada tahun 1978 yang dijadikan dalih sebagai

⁴⁶ Godrey Jansen, **Middle East International**, 11 Oktober 1985, mengutip **Los Angeles Times** (LAT), 3 Oktober 1985 dalam Noam Chomsky, *ibid*, hal 75

⁴⁷ Beverly Beyette, **LAT**, laporan mengenai **Konferensi Internasional tentang Terorisme**, **LAT**, 9 April 1986, dalam Noam Chomsky, *ibid*, hal 77

Digital Repository Universitas Jember

penyerbuan Lebanon 1981, dan sebagainya), atau bahkan pembajakan pesawat atau penyelundupan sandera, yang banyak sekali disoroti dan merupakan topik pokok konferensi tersebut.

Serangan atas markas besar Arafat diduga sebagai pembalasan bagi pembunuhan tiga orang Israel di Larnoca, Cyprus, oleh para penyerang yang kemudian tertangkap dan diadili karena kejahatan mereka. Para diplomat Barat meragukan bahwa Arafat mengetahui misi terencana itu, dan "pihak Israel juga sudah mencabut tuduhan awal mereka bahwa Mr. Arafat terlibat."⁴⁸ Para pembela terorisme Israel di Amerika, yang mencoba meyakinkan dunia bahwa "berondongan bom Israel di Tunisia tepat mengenai orang-orang yang bertanggung jawab atas aktivitas-aktivitas teroris", amat meragukan.

Ucapan-ucapan Reagan tentang terorisme dilaporkan dan dibahas dengan sangat serius dalam media utama, tetapi kadang-kadang para kritikus menyoroti kemunafikan orang-orang yang mengutuk keras terorisme internasional sementara mengirim tentara-tentara klien mereka untuk membunuh, memotong motong, menyiksa dan menghancurkan di Nicaragua dan untuk membantai -- yang ini kurang banyak disinggung, karena dianggap sebagai sebuah sukses besar -- berpuluh-puluh ribu orang di El Salvador dalam suatu upaya tekun dan sukses untuk menghindarkan ancaman gawat berupa terwujudnya demokrasi sejati disana.⁴⁹

Konsep terorisme digunakan luas oleh para komentator dan pejabat AS. Maka pers melaporkan, bahwa keprihatinan **Menlu Shultz** atas "terorisme internasional" menjadi "semangat jiwanya" setelah pemboman bunuh diri atas Marinir AS di Lebanon pada Oktober 1983, serdadu-serdadu yang dipandang oleh banyak penduduk sebagai -- dan ini sangat wajar -- pasukan militer asing yang dikirim untuk memaksakan "Orde Baru" yang dibangun oleh agresi Israel. **Barry Rubin** menulis bahwa "penggunaan terorisme dukungan Syria yang paling penting di Lebanon

⁴⁸ Edward Schumacher, *New York Times*, 22 Oktober 1985 dalam *ibid*, hal 77

⁴⁹ Ross Gelbspan, *Boston Globe (BG)*, 16 Desember 1985 dalam *ibid* hal 80

adalah untuk memaksa pengunduran serdadu Israel dan pasukan Marinir AS", sementara Iran dan Syria telah mendukung "aktivitas teroris" oleh "kelompok-kelompok ekstremis Syi'ah" di Lebanon Selatan. Koresponden **Times** Israel, **Thomas Friedman**, rutin melukiskan serangan-serangan di Lebanon Selatan yang diarahkan kepada pasukan Israel sebagai "pemboman-pemboman teroris" atau "terorisme bunuh diri" yang, katanya meyakinkan kita, merupakan hasil dari "kelemahan psikologis atau kegairahan religius".⁵⁰

Sementara itu, peristiwa Nabatiya juga memiliki fakta sejarah yang patut untuk diungkapkan dalam tulisan ini. Bahwa, perginya 50.000 orang dari 60.000 penduduknya yang "umumnya lantaran takut akan berondongan (Israel)" dilaporkan oleh dua wartawan *Jerusalem Post* (JP) yang mengunjungi Lebanon selatan dalam upaya mencari bukti tentang kebrutalan dan teror PLO – hanya sedikit yang ditemukan – malah merekamendapatkan bukti melimpah tentang teror Israel beserta akibat-akibat.⁵¹ Salah satu bombardemen yang terjadi pada 4 November 1977, ketika Nabatiya dihujani tembakan artileri darat dari kubu Maronit Lebanon (dukungan Israel) dan juga dari pos-pos Israel di sepanjang kedua sisi medan pertempuran termasuk beberapa diantaranya enam basis Israel di dalam Lebanon. Serangan-serangan terus berlangsung sampai esok hari, menewaskan tiga wanita diantara korban-korban lainnya. Pada 6 November, dua roket yang ditembakkan oleh gerilyawan Fatah menewaskan 2 orang Israel di Nahariya, menyulut pertempuran artileri, dan roket kedua menewaskan seorang Israel. "Lalu datanglah serangan udara Israel yang gencar, menewaskan 70 orang – hampir semuanya orang Lebanon."⁵² Perselisihan yang dipicu oleh Israel ini, yang dapat mengarah ke sebuah perang besar.

⁵⁰ Donober Doffer, "The Mind of George Shultz", *WP Weekly*, 17 Februari 1986; Rubin, *New Republic*, 2 Juni 1986, Thomas Friedman, *NYT*, 16 Februari 1986, dalam *ibid*, hal 91

⁵¹ Benny Morris dan David Bernstein, *JP*, 23 Juli 1982 dalam *ibid*, hal. 94

⁵² *Economist*, 19 November 1977 dalam *ibid*, hal 95

Namun, peristiwa-peristiwa telah masuk dalam memori sejarah dalam bentuk berbeda, bukan hanya dalam jurnalisme tetapi juga dikancah keilmuan. "Dalam sebuah upaya untuk merintanggi gerakan menuju suatu konferensi perdamaian", tulis Edward Haley tanpa bukti, "PLO menembakkan roket-roket Katyusha ke desa di Utara Nahariya, pada 6 dan 8 November, menewaskan tiga orang," dan mencetuskan "pembalasan Israel yang tak terhindarkan" pada 9 November, yang menewaskan lebih dari 100 dalam serangan-serangan tersebut di dan sekitar Tyre dan dua kota kecil di selatannya.⁵³

Sebagaimana biasanya, dalam sejarah yang telah disterilkan dengan baik bahwa kelompok Palestina-lah yang melakukan terorisme, lalu Israel membalas, mungkin dengan terlalu keras. Di dunia nyata, kebenarannya sering berbeda-beda - suatu hal yang sangat disepelekan dalam kajian tentang terorisme di Timur Tengah.

Donard Shipler menulis bahwa, "Dalam masa empat tahun antara invasi Israel terdahulu atas Lebanon selatan tahun 1978 dan invasi 6 Juni 1982, sebanyak 29 orang telah terbunuh di Israel Utara dalam segala bentuk serangan dari Lebanon, termasuk penembakan dan pelanggaran perbatasan oleh para teroris," tetapi bahwa selama satu tahun sebelum invasi 1982 itu, "keadaan perbatasan tersebut aman dan tenteram". Laporan ini patut kita pandang mendekati setidaknya setengah kebenaran. Sementara PLO tak melakukan aksi-aksi pelanggaran perbatasan selama satu tahun sebelum invasi Israel, perbatasan itu sama sekali tidak tenteram, sebab teror Israel terus berlangsung dan menewaskan banyak sekali warga sipil. Sekali lagi, perbatasan tersebut "tenteram" hanya dalam pengertian rasional menurut diskursus Amerika. Selain itu, Shipler maupun rekan-rekannya tak ingat bahwa sementara 29 orang terbunuh di Israel utara sejak tahun 1978, beribu-ribu orang tewas oleh bombardemen Israel di Lebanon yang nyaris tak diungkap di AS, dan bukan dalam pengertian "pembalasan".

⁵³ Edward Haley, *Qaddafi and the United States Since 1969*, Preager 1984, hal. 74 dalam loc cit

Bahwasanya, dalam jajaran spektrum politik Amerika Serikat dan dikalangan kelas-kelas terpelajar – dengan keseragaman yang amat besar dan perkecualian yang teramat kecil* – bercokol doktrin kokoh bahwa terorisme Paletina beserta sekutu-sekutu Arabnyalah, dengan dukungan Kremlin, serta komitmen membara mereka untuk membunuh kaum Yahudi dan menghancurkan Israel, dan penolakan mereka untuk mempertimbangkan setiap pemecahan politik, yang menjadi akar penyebab konflik abadi Arab-Israel yang didalamnya Israel merupakan korban yang memilukan. Sebagaimana AS, ia tak berdaya dihadapan “momok bengis terorisme”, yang bergentayangan dari AS sampai Lebanon dan tempat-tempat lain. Tetapi komentar-komentar mutakhir tentang “terorisme” di “negara-negara beradab” penuh hipokrisi-hipokrisi busuk, dan hanya akan jadi obyek cemoohan dikalangan masyarakat beradab.

2.4.2 Timur Tengah Secara Khusus (Libya)

Dalam sistem doktrinal Amerika, tidak ada orang yang dilambangkan dengan begitu tandas sebagai “momok bengis terorisme” seperti Muammar Khadafy, si “anjing gila” di dunia Arab, dan Libya dibawah kepemimpinannya telah menjadi model utama bagi sebuah negara teroris.

Penggambaran Libya dibawah Khadafy sebagai negara teroris memang pas. Laporan terbaru Amnesty Internasional menyebut pembunuhan atas empat belas warga negara Libya oleh negara teroris ini sepanjang tahun 1985, empat diantaranya dihabisi di luar negeri; aksi-aksi besar terorisme bolehlah ditimpakan pada Libya.⁵⁴ Di tengah hiruk-pikuk histeria yang dirancang untuk meraih tujuan-tujuan lain, macam-macam tuduhan dilontarkan, tetapi yang mendapat perhatian khusus adalah pernyataan seorang pejabat senior intelejen AS pada April 1986, bahwa “beberapa pekan lalu”, Khadafy “Menggunakan rakyatnya terutama untuk

⁵⁴ Amnesty International Report 1985 (London 1985); Political Killing's by Governments (AI Report, London, 1983) dalam *ibid* hal 157

membunuh kaum penyempal Libya.”⁵⁵ “Beberapa pekan lalu,” kata sang pejabat intelejen melanjutkan, “Khadafy membuat keputusan tegas untuk membidik warga Amerika.” Dugaan keputusan ini, yang menempati kisaran fakta mapan dalam sistem indoktrinasi, walau tak ada sepotongpun bukti yang terpercaya yang disajikan untuk menopangnya, dikemukakan sesudah insiden Teluk Sidra ketika armada laut dan udara AS menenggelamkan kapal-kapal Libya dengan menewaskan banyak orang, dan dianggap sah belaka, malah dirasa sangat terlambat, menurut doktrin-doktrin sinis sebagaimana dianut oleh pemerintah AS.

Bukan hanya terorisme dirumuskan untuk mengabdikan ideologi, tetapi standar-standar pembuktian juga dipersiapkan berdasarkan kesepakatan sedemikian rupa, sehingga pas untuk mencapai tujuan-tujuan AS. Untuk memperlihatkan peranan Libya sebagai sebuah negara teroris, cukuplah didasarkan atas bukti yang paling samar atau tidak ada sama sekali. Judul sebuah editorial New York Times yang menjustifikasi serangan teroris AS yang menewaskan sekitar seratus orang di Libya (menurut laporan-laporan pers dari tempat kejadian), berbunyi, “*To Save The Next Natasha Simpson*” (Menyelamatkan Natasha Simpson Berikutnya). Yang dirujuk adalah gadis Amerika yang berumur sebelas tahun yang menjadi salah satu korban dari serangan teroris di bandara Roma dan Wina pada 27 Desember 1985; korban-korban ini memberi kita hak membombardir kota-kota Libya “untuk membikin gentar terorisme dukungan negara”, landas para editor Times dengan serius. Pemboman ini hanyalah cacat kecil, sehingga tak perlu ada bukti yang ditampilkan untuk menunjukkan bahwa Libya terlibat dalam aksi-aksi itu.

Ahli-ahli Public Relation (PR) pemerintahan Reagan memahami manfaat Libya sebagai musuh dan hanya perlu membuang sedikit waktu dengan menghadapi lawan yang berbahaya ini. Libya sekaligus juga dirancang sebagai agen utama dalam “jaringan teroris” yang didukung Soviet, dan pada Juli 1981 rencana CIA untuk menggulingkan dan

⁵⁵ William Beecher, *BG*, 15 April 1986 dalam *ibid* hal 158

membunuh Khadafy dengan suatu kampanye teror para militer didalam Libya bocor kepada pers.⁵⁶

Kita dapat mencatat sepintas bahwa dengan standar-standar AS, rencana ini untuk mengesahkan Khadafy untuk melakukan aksi teror terhadap sasaran-sasaran Amerika sebagai "pembelaan diri terhadap serangan di masa depan"—kalimat yang dipakai oleh juru bicara Gedung Putih Larry Speaks ketika mengemukakan justifikasi resmi untuk pemboman atas Tripoli dan Benghazi.

Pada Agustus 1981, pesan anti-Khadafy "diterapkan dengan menggelar perangkap untuk Libya di Teluk Sidra", sebuah perangkap "yang direncanakan dengan seksama pihak AS" guna memancing konfrontasi yang didalamnya jet-jet tempur Libya dapat ditembak jatuh.⁵⁷

Akibat operasi Teluk Sidra ini adalah munculnya aksi-aksi terorisme Libya sebagai pembalasan. Aksi-aksi ini lalu akan menciptakan suatu keadaan teror di AS, juga di Eropa, sehingga menyiapkan pentas bagi ledakan-ledakan bom berikutnya. Pemboman diskotik La Belle di Berlin Barat pada 5 April 1986, yang menewaskan seorang serdadu kulit hitam AS dan seorang Turki, langsung saja dituduhkan pada Libya.⁵⁸

Namun demikian, di Jerman sepekan setelah Washington menyampaikan pengetahuan pastinya tentang keterlibatan Libya atas pemboman diskotik itu sepuluh hari sebelumnya (4-5 April 1986), **Der Spiegel** (21 April 1986) melaporkan bahwa penyadapan penyadapan telpon yang terkenal ampuh itu tampaknya tak ada, dan bahwa intelejen Berlin Barat hanya mempunyai kecurigaan-kecurigaan tentang keterlibatan Libya, juga mencurigai kelompok-kelompok pedagang obat bius yang saling bersaing, diantara kemungkinan-kemungkinan lain (termasuk klan atau kelompok-kelompok Neo-Nazi, menurut dugaan sebagian orang; diskotik

⁵⁶ Haley, *Qaddafi and the U.S.*, hal 271, dalam *ibid* hal 173

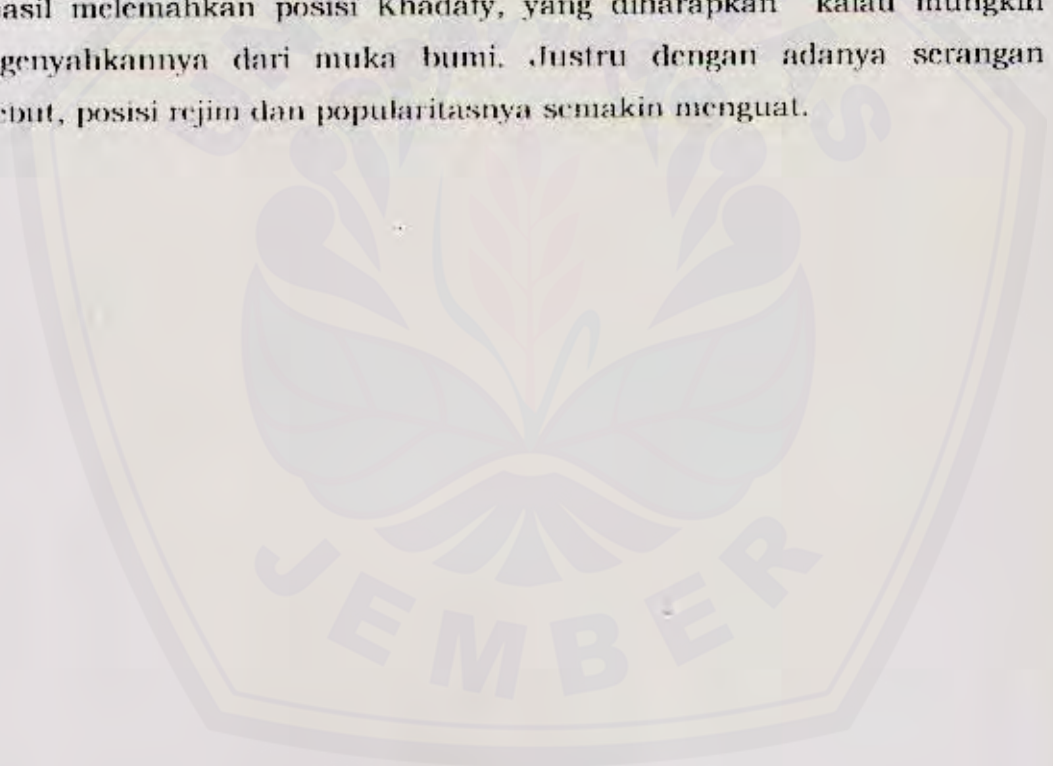
⁵⁷ Noam Chomsky, *Menguak Tabir*, *ibid*, hal 174

⁵⁸ *Ibid*, hal 181

itu sendiri sering dikunjungi oleh masyarakat kulit hitam dan para imigran Dunia Ketiga).

Perang Washington adalah “alat politik”, **Der Spiegel** melanjutkan, “sepanjang lawannya sekecil Libya, dan musuhnya seideal Khadafy”, maka tidak ada pemimpin Eropa yang perlu berilusi bahwa keprihatinan atau kepentingan Eropa akan dipertimbangkan jika AS sudah memutuskan untuk menaikkan suhu kekerasan internasional, bahkan sampai ketinggian Perang Dunia, tambah editor **Rudolf Augstein**.⁵⁹

Apa yang menyebabkan Amerika melakukan berbagai serangan terhadap rejim Khadafy sulit diterangkan. Berbagai serangan yang telah dirancang oleh AS untuk menjatuhkan rejim Khadafy ini ternyata tidak berhasil melemahkan posisi Khadafy, yang diharapkan kalau mungkin mengenyahkannya dari muka bumi. Justru dengan adanya serangan tersebut, posisi rejim dan popularitasnya semakin menguat.



⁵⁹ **Der Spiegel**, 21 April 1986, dalam ibid hal 185

BAB III POLITIK LUAR NEGERI AS DAN LIBYA DI TIMUR TENGAH

3.1 Politik Luar Negeri Amerika Serikat (AS) di Timur Tengah

3.1.1 Membendung Pengaruh Uni Soviet

Keterlibatan Amerika Serikat (AS) di Timur Tengah sejak akhir Perang Dunia II disebabkan oleh keinginan untuk membendung pengaruh Uni Soviet di wilayah yang strategis dan kaya minyak tersebut.¹

Hubungan antara AS dan Timur Tengah dapat dibagi kedalam tiga periode yang berbeda: yang pertama berakhir pada tahun 1941; yang kedua selama periode perang 1941-1945; dan yang ketiga setelah tahun 1945.²

Dalam periode pertama, AS tidak menunjukkan minat politis yang tetap terhadap wilayah ini. Sejak dulu orang Amerika yang mencurahkan perhatian secara serius pada Timur Tengah hanyalah misionaris Protestan dan pendidik lembaga seperti American University of Beirut (didirikan tahun 1866 dengan nama Syrian Protestant College), University America di Kairo, Robert College dan American Women's College di Istanbul, dan juga sekolah-sekolah lanjutan yang dikenal sebagai *college* di Teheran dan Baghdad membuktikan adanya hubungan budaya antara Dunia Baru dan Tanah Injil Kuno. Selain itu, ada Misi American Presbyterian di beberapa negara Timur Tengah yang menggabungkan pekerjaan keagamaan dengan amal dan kedokteran. Semua lembaga ini membuat AS populer di mata orang yang telah mengadakan hubungan dengan lembaga tersebut, dan kenyataan bahwa pemerintah Amerika semakin memperkuat itikad baik umum terhadap demokrasi Amerika.

Peristiwa pertama intervensi politik AS terjadi pada tahun 1918-1919 pada waktu Penyelesaian Perdamaian. Butir 12 dari Empat Belas

¹ Stephen Ambrose, *Rise to Globalism* (New York: Penguin Books, 1986) hal 262 dalam GLOBAL, Jurnal Politik Internasional 2, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, hal 45

² George Lenczowski, Drs. Asgar Bixby, "Timur Tengah di Tengah Kancan Dunia", Sinar Baru Algensindo, Bandung, 1992, hal 439

Butir Wilson secara khusus berkenaan dengan pembagian Imperium Utsmaniyah, dan prinsip umum penentuan nasib sendiri nasional yang tercantum didalamnya memberikan kesan mendalam kepada kaum cendekiawan di Timur Tengah. Berdasarkan reaksi mereka terhadap pernyataan ini, kita bisa menegaskan bahwa perjuangan Amerika bagi tatanan dunia yang adil dan terhormat menimbulkan harapan yang lebih besar daripada radikalisme sosialisme dari Rusia revolusioner. Karena ingin sekali melaksanakan prinsipnya, Presiden Wilson mengirimkan dua misi ke Timur Tengah untuk mengetahui dengan pasti kehendak rakyat yang langsung bersangkutan: Misi King-Crane ke Suriah dan Palestina, dan Misi Harbord ke Armenia.³ Akan tetapi, drama kekuasaan politik di Paris menggagalkan rencana Wilson dan mengakibatkan kompromis yang hanya sedikit menyelubungi imperialisme tradisional Eropa. Setelah kematian Wilson dan penghapusan Perjanjian Versailles, AS menarik diri dari politik dunia sehingga menyerahkan Timur Tengah kepada muslihat mereka sendiri.

Dalam periode pasca perang, peningkatan perhatian terhadap Timur Tengah ini meluas. Pertumbuhan ekspansionisme Soviet telah memaksa Washington untuk merumuskan kebijakan dan mengambil langkah untuk melindungi Timur Tengah dan mengamankan kepentingan vital Barat disana. Ujian pertama terjadi di Iran (1945-1946) ketika Rusia berusaha menundukkan negeri itu lewat dukungannya kepada pemberontakan Azerbaijan dan pemilikan konsesi minyak dengan paksa. Reaksi AS adalah mendorong Iran untuk melawan tekanan Rusia, dan sebagaimana kemudian diungkapkan oleh Presiden Truman, memperingatkan Rusia atas aksi agresifnya lebih lanjut.

Krisis Iran belum berakhir ketika Washington dihadapkan pada ancaman komunis baru, kali ini terhadap Yunani dan Turki. Kelemahan dan kemiskinan akibat Perang Dunia (PD) II mengharuskan Inggris menarik dukungannya kepada kedua negara ini sehingga menimbulkan kekosongan kekuasaan yang berbahaya. Karena yakin bahwa tidak adanya tindakan akan mengakibatkan perluasan kekuasaan Soviet.

³ Ibid, hal 440

yang berbahaya ke arah selatan, Presiden Truman (12 Maret 1947) menyatakan kesediaan AS untuk menyelamatkan kedua negara yang terancam itu dengan menjanjikan bantuan keuangan bagi tujuan ekonomi dan militer.⁴ Pernyataan kebijakan resmi itu (dikenal sebagai Doktrin Truman) secara jelas mengakui ancaman tersebut. Adapun bagi Turki, "Integritasnya penting untuk memelihara ketertiban di Timur Tengah." Kebijakan AS ditetapkan dalam pernyataan itu sebagai penciptaan kondisi dimana kita dan negara-negara lain akan mampu menentukan cara hidup yang bebas dari paksaan..... Kita tidak akan mewujudkan tujuan kita, kecuali jika kita bersedia membantu rakyat bebas dalam memelihara lembaga mereka yang bebas dan integritas nasional mereka melawan gerakan agresif yang berusaha untuk memaksakan rejim totaliter kepada mereka.

Setelah menetapkan tujuan AS, Presiden memohon wewenang dari Kongres untuk memberikan bantuan kepada Yunani dan Turki sebesar \$ 400.000.000 dan untuk mengirinkan personil militer dan sipil ke kedua negara itu untuk membantu dan mengawasi pelaksanaan program bantuan itu.

Ini adalah langkah besar pertama dalam mengakui dan menanggapi ancaman Soviet. Pencantuman Yunani dan Turki dalam Marshall Plan berikutnya serta pengakuan mereka sebagai anggota NATO pada tahun 1950 merupakan hasil logis dari pernyataan kebijakan dasar yang pertama ini. Doktrin Truman ini terbukti berhasil: bantuan dan dana yang diberikan AS kepada Yunani menyebabkan pemerintahnya berhasil menghalau gerilya komunis dan menyelamatkan dirinya dari nasib yang kurang beruntung seperti yang dialami oleh tetangga-tetangganya di Balkan; demikian pula Turki, yang diperkuat ekonomi dan sikap militernya, berhasil menahan tekanan Soviet untuk mengontrol Selat serta menganeksasi propinsi-propinsi timurnya. Sehingga dalam hal ini, Barisan Utara (disebut juga Sabuk Utara yang terdiri dari negara Turki, Iran dan Afghanistan) dapat diselamatkan dari pengaruh Komunis Soviet.

⁴ Ibid. hal 442

Digital Repository Universitas Jember

Kegairahan akibat keberhasilan yang telah dicapai tersebut serta keinginan untuk meningkatkan kerjasama pertahanan regional yang dipolakan pada aliansi NATO, Washington ingin menarik negara-negara Arab ke dalam rencana kerjasama militer yang lebih luas yang akan meliputi Timur Tengah secara keseluruhan. Namun, dalam hal ini kebijakan AS mendapat tanggapan negatif. Negara Arab terkemuka, Mesir, menolak menerima usul Komando Timur Tengah yang diponsori Barat, malahan mengumumkan kebijakan netralisme positif. Pusat-pusat Arab nasionalis lainnya meniru contoh Mesir. Pada tahun 1953 jelas bahwa usaha lebih lanjut untuk menciptakan aliansi regional dengan partisipasi Arab tidak akan berguna. Menlu John Foster Dulles mengakui hal ini sekenbaliknya dari Timur Tengah pada musim dingin tahun itu. Alasan keengganan Arab dapat dirangkumkan sebagai berikut: (1) dunia Arab belum menerima eksistensi Israel yang dipandang sebagai ciptaan dan pos depan imperialisme Barat; (2) sisa-sisa kolonialisme Eropa Barat di Dunia Arab dipandang sebagai ancaman yang lebih besar kemerdekaan dan kesejahteraan Arab daripada imperialisme Soviet yang tampaknya jauh; (3) nasionalisme Arab benci akan kemungkinan hubungan klien-majikan yang akan diminta oleh kerjasama militer dengan Barat, dan curiga hal itu akan menjadi alat neo-kolonialisme ; (4) mereka ingin melindungi negara-negara mereka agar tidak menjadi ajang pertempuran sebagai akibat kemungkinan perluasan perang ke wilayah mereka pada masa yang akan datang.⁵

Karena gagal di Inti Arab di Timur Tengah, Washington kembali ke kawasan dimana selalu ada kesadaran akan ancaman Soviet, yakni Barisan Utara. Pakta Baghdad adalah hasilnya. Ia mempersatukan tiga negara non-Arab (Turki, Iran dan Pakistan), satu Arab (Irak), dan satu Barat (Inggris) dalam satu aliansi militer. AS sendiri tidak ikut bergabung secara resmi, sebagian karena kekhawatiran diasingkan oleh rejim revolusioner Mesir dan semua unsur dunia Arab yang

⁵ Alfred Bonne, "State and Economics in the Middle East A Society in Transition" Rev. ed. London : Rontledge and Kegan Paul, 1955 dalam ibid. hal 443

mengikutinya. Tidak lama kemudian perwakilan sipil dan militer AS aktif dalam berbagai komisi Pakta Baghdad sehingga membuat AS dalam praktek menjadi anggota meskipun resminya bukan anggota persekutuan ini.

Namun demikian, bila pertahanan seluruh Timur Tengah, termasuk bagian Arabnya, merupakan tujuan, maka Pakta Baghdad hanya berhasil sebagian dan bahkan diragukan. Penyebabnya adalah, dari segi militer, komitmen Barat untuk mempertahankan negara-negara Barisan Utara lebih penting daripada kerjasama diantara negara-negara Pakta Baghdad. Sebenarnya, tujuan mempersenjatai negara-negara ini, melatih personelnnya dalam teknik militer baru, membangun pangkalan di wilayah mereka, dan mengoordinasi kegiatan pertahanan dapat tercapai tanpa mekanisme dan pengeluaran tambahan dari organisasi Pakta Baghdad. Meskipun Pakta Baghdad juga menyajikan kerjasama teknik dan ekonomi diantara anggotanya, kerjasama demikian dapat dilakukan melalui persetujuan khusus yang terpisah dari aspek militer, dan karena itu tidak dipengaruhi oleh tantangan keras yang diciptakan oleh Pakta di pusat-pusat netralis nasionalisme Arab.

Dari sinilah dapat dipahami bahwa pembuatan Pakta Baghdad itu dapat dianggap berlebihan untuk maksud mempertahankan Barisan Utara, sementara pada saat yang sama tidak menjadi perintang besar bagi kemajuan Soviet di dunia Arab. Kemajuan ini berbeda dari taktik Rusia terhadap Barisan Utara. Di Utara ia mengancam dan mengintimidasi, sedangkan di Dunia Arab ia membujuk. Pakta Baghdad yang menyajikan pertahanan militer bagi Barisan Utara ternyata bukan rintangan bagi bujukan Soviet di negara-negara Inti Arab. Ia juga tidak mencegah Rusia mempersenjatai Mesir dan Suriah serta mengidentifikasi diri dengan cita-cita nasionalisme Arab.

Dimulai dengan Pakta Baghdad, AS dihadapkan pada reaksi berantai gerakan politik yang memperdalam jurang antara AS dan nasionalisme Arab. Perjanjian senjata Moskow-Kairo adalah peristiwa besar kedua dalam kisah sedih ini, yang diikuti dengan penarikan

tawaran Bendungan Aswan, nasionalisasi Terusan Suez, dan Perang Suez. Perang ini memberikan peluang guna memperbaiki kerusakan pada masa lalu karena AS tampil untuk membela korban agresi, Mesir. Sebenarnya, ada periode singkat dimana pengakuan atas sikap AS dan ucapan terima kasih untuk itu diucapkan oleh Nasser dan Nasionalis Arab lainnya. Perolehan ini segera disusul oleh dua tindakan kebijakan AS: (1) pengesahan prinsip kebebasan pelayaran di Teluk Aqaba oleh Menlu Dulles, dan (2) pernyataan politik Presiden (5 Januari 1957) yang dikenal sebagai Doktrin Eisenhower.⁶

Asal mula dikeluarkannya Doktrin itu disebabkan oleh kekhawatiran Washington terhadap penetrasi komunis internasional ke Dunia Arab segera setelah berakhirnya Perang Suez, runtuhnya pengaruh Inggris di kawasan ini, dan juga bangkitnya kembali permusuhan nasionalis Arab terhadap Barat. Ada kepercayaan bahwa Rusia harus diperingatkan agar tidak ikut campur tangan (guna mencegah salah perhitungan seperti di Korea), dan bahwa AS harus memastikan bantuan bagi negara-negara dalam mempertahankan integritas mereka terhadap agresi komunis dukungan Soviet. Meskipun secara resmi ditujukan ke seluruh Timur Tengah, deklarasi ini terutama ditujukan ke Dunia Arab dimana kemajuan Soviet dan kegiatan partai komunis lokal paling mencolok. Dalam arti ini Doktrin Eisenhower melengkapi Doktrin Truman yang berpusat pada ancaman Soviet terhadap Barisan Utara non Arab. Sementara menyempurnakan doktrin lama, doktrin baru ini berbeda dalam satu hal yang penting: mengaitkan kesatuan-kesatuan AS dalam mempertahankan negara-negara yang terancam. Sebenarnya Presiden mengusulkan dan mengupayakan pengesahan Kongres bagi tiga jenis tindakan:

1. Merabantu Timur Tengah mengembangkan kekuatan ekonominya,
2. Melaksanakan bantuan militer, dan
3. "Menyertakan penggunaan angkatan bersenjata AS guna mengamankan dan melindungi integritas wilayah dan

⁶ Ibid, hal 444

kebebasan politik negara-negara yang meminta bantuan untuk melawan agresi bersenjata dari setiap negara yang dikontrol oleh komunisme internasional⁶.

4. "Perundang-undangan yang diusulkan," demikian bunyi suatu paragraf deklarasi ini, "terutama dimaksudkan untuk menangani kemungkinan agresi komunis, langsung maupun tidak langsung."

Propaganda yang berlawanan ini diperkuat lagi dengan tuduhan yang berkelanjutan bahwa, berbeda dengan Soviet, bantuan Amerika mempunyai "banyak ikatan". Tidak diragukan bahwa AS sering menghadapi dilema kepada siapa dan untuk siapa bantuan diberikan. Kecenderungan yang wajar ialah mula-mula membantu sahabat atau sekutu, dan pandangan ini tercermin dalam undang-undang yang mengesahkan pinjaman dan hibah, khusus yang dibuat dengan judul keamanan timbal balik. Namun, selama lebih dari satu dasawarsa AS telah banyak memberikan bantuan kepada negara-negara netral seperti India, Afghanistan dan Mesir meskipun bantuan militer diberikan kepada negara-negara yang hubungannya dengan Washington melalui alat pertahanan timbal balik. Jadi "ikatan politik", itu sering lebih merupakan mitos ketimbang kenyataan.

Sebagai mandala penting bagi kedua negara adikuasa, Timur Tengah merupakan wilayah yang sangat tidak stabil. Sejak tahun 1945, telah terjadi lebih kurang tujuh konflik militer di wilayah Timur Tengah yang melibatkan Uni Soviet dan AS. Tujuh konflik militer tersebut antara lain adalah: (a) tahun 1948, perang antara negara-negara Arab melawan Israel; (b) tahun 1967, perang antara Mesir-Israel; (c) tahun 1973, perang Yom Kippur antara Mesir dibantu Syria melawan Israel; (d) tahun 1980, pecah perang Irak-Iran selama 8 tahun dan dikenal sebagai Perang Teluk I, serbuan Israel ke Lebanon, Revolusi Iran setelah menggulingkan Syah Iran, serangan Israel terhadap reaktor nuklir Irak; dan (e) tahun 1991, Perang Teluk II antara Irak melawan AS yang mengatasnamakan pasukan multinasional Dewan Keamanan-PBB.⁷

⁷ Stephen Ambrose, *op.cit.*, hal 45

Hubungan AS dan Soviet dengan para sekutunya di Timur Tengah relatif sejajar bila dibandingkan dengan hubungan kedua negara superpower tersebut dengan sekutu-sekutu regionalnya di Asia atau Amerika Latin. Walaupun beberapa negara Timur Tengah seperti Mesir pada masa Nasser atau Syria, memiliki kecenderungan untuk bersifat sosialis. Namun pada dasarnya tidak satupun dari negara-negara Timur Tengah ini yang memiliki komitmen terhadap kedua ideologi yang dicanangkan kedua negara super power. Sumber minyak dan gas alam telah membuat negara-negara ini relatif independen dalam menjalin hubungannya dengan negara patron mereka. Akibatnya, negara-negara ini sering memanipulasi hubungannya dengan negara AS dan Soviet bahkan dapat berganti-ganti sekutu sesuai dengan kebutuhannya.⁸

3.1.2 Minyak sebagai Sumber Kebutuhan Penting

Alasan keamanan dan strategis pada awalnya mendasari ambisi AS untuk terlibat di Timur Tengah. Pasca Perang Dunia II, AS masih merupakan eksporter minyak yang cukup penting di dunia. Negara-negara Arab penting karena berada di dekat Terusan Suez dan Selat Gibraltar serta mengontrol jalan utara menuju Lautan Hindia.⁹ Tetapi pada tiga puluh tahun kemudian, pentingnya minyak dari Timur Tengah menjadi faktor penting bagi AS yang sudah menjadi salah satu importir minyak terbesar di dunia. Oleh karena itu kestabilan keamanan di Timur Tengah menjadi penting bagi AS yang harus menjamin kelancaran lalu lintas pengangkutan minyak dari wilayah tersebut.

Peranan minyak dalam dunia internasional menjadi penting semasa Perang Dunia I ketika bangsa-bangsa yang terlibat dalam perang tersebut menggantungkan energi pada minyak untuk menggerakkan mekanisme industri militer, teknologi, komunikasi dan transportasi mereka. Pada waktu itu Timur Tengah sudah menduduki posisi sentral dalam penyediaan energi dunia, akan tetapi baru pada awal tahun 1970-

⁸ Barry Rubin, "Reshaping the Middle East", *Foreign Affair*, Summer 1990, hal 142 dalam loc cit

⁹ Stephen Ambrose, op cit., hal 260 dalam loc cit

an dunia menyadari betapa potensi minyak dapat digunakan sebagai senjata yang dapat menggetarkan sistem internasional yang ada. Namun sampai Perang Dunia II karena negara-negara penghasil minyak di Timur Tengah mengalami kelangkaan pengetahuan teknis dan secara ekonomis sangat lemah serta kebanyakan berada di bawah kontrol negara-negara kolonial, maka hampir semua kebijakan yang menyangkut explorasi, produksi dan pemasaran dipegang oleh perusahaan-perusahaan minyak Eropa dan Amerika, atau oleh pemerintahan-pemerintahan kolonial itu sendiri yang berpusat di berbagai ibukota di dunia Barat.

Setelah berakhirnya PD II, bersamaan dengan bangkitnya nasionalisme di kalangan negara-negara yang sedang berkembang, negara-negara penghasil minyak yang sudah jenuh diperlakukan tidak adil oleh bekas negara-negara penjajahnya mulai berusaha merubah cara-cara eksploitasi minyak sampai pemasarannya yang dianggap merugikan negara-negara pemilik sumber minyak dan terlalu menguntungkan perusahaan-perusahaan minyak asing. Mula-mula negara-negara penghasil minyak tersebut hanya menuntut dinaikkannya harga minyak dan menuntut royalti yang lebih besar agar supaya posisi tawar-menawar mereka lebih kuat. Tuntutan ini makin meningkat dan sejak tahun 1960 (bulan September), dibentuklah OPEC (Organisational of Petroleum Exporting Countries) sebagai kartel minyak internasional, mulailah suatu revolusi dalam proses politik perminyakan internasional yang lebih menguntungkan negara-negara produsen, dalam hal ini sudah tentu merupakan suatu perkembangan yang wajar.¹⁰

Para pemimpin dunia sedang berkembang, termasuk negara-negara OPEC mencoba melepaskan ketergantungan pada negara-negara Barat dan perusahaan-perusahaan multinasional dan sekaligus menonjolkan identitas nasional mereka masing-masing yang selama ini terkungkung oleh imperialis Barat.

¹⁰ Amien Rais dalam Qystein Noleng, "Minyak dalam Politik, Upaya Mencapai Konsensus Internasional", CV Rajawali, Jakarta, Agustus 1983, hal VI

Pada awal dasawarsa 1970-an terjadi perubahan revolusioner dalam perimbangan kekuatan dalam masalah penguasaan minyak. Perusahaan-perusahaan Barat yang berpuluh-puluh tahun telah menguasai mulai eksplorasi sampai pemasaran minyak terlihat secara bertahap terdesak dan diletakkan dalam posisi yang defensif. Negara-negara yang radikal dan mobilisasional seperti Libya dan Aljazair dengan bantuan negara konservatif seperti Arab Saudi dan Iran bersama-sama mengambil alih kontrol atas proses perminyakan dunia dari tangan berbagai perusahaan minyak yang bermarkas besar di kota-kota besar Eropa dan Amerika. Jika Libya dan Aljazair merebut posisi perusahaan-perusahaan minyak itu karena dorongan nasionalisme radikal yang membara, maka Iran melakukannya didorong selain oleh elemen-elemen nasionalisme juga kebutuhan uang yang cukup besar untuk membiayai modernisasi Iran; sedangkan Saudi Arabia didorong selain oleh hal-hal diatas juga oleh kenyataan bahwa dalam konflik Arab-Israel, Amerika sangat jelas berpihak pada Israel. Di samping dorongan-dorongan diatas, pada tingkat kesadaran yang lebih mendalam negara-negara produsen minyak itu sesungguhnya ingin memperbaiki posisi mereka didalam arena internasional.

Setelah berakhirnya perang Arab-Israel pada Oktober 1973 untuk pertama kalinya minyak dijadikan senjata politik negara-negara Arab secara sangat efektif. Embargo minyak pada tahun 1973 telah benar-benar menggoncangkan Aliansi Atlantik dimana negara-negara Eropa Barat, kecuali Belanda, saling berebut mencari simpati negara-negara Arab petro-dollar dengan menyatakan dukungannya pada tuntutan Arab dalam mencari perdamaian Timur Tengah, tanpa mengindahkan peringatan-peringatan Amerika sebagai pemimpin persekutuan Atlantik. Keretakan persekutuan Atlantik gara-gara embargo minyak Arab yang dipimpin oleh Saudi Arabia tersebut membuat Amerika terperanjat bahwa ternyata minyak merupakan suatu senjata yang sangat efektif dan dapat menggoyahkan sendi-sendi perekonomian Barat.

Tuntutan negara-negara Arab dalam mencari perdamaian Timur Tengah adalah penarikan mundur tentara-tentara Israel dari daerah

Digital Repository Universitas Jember

pendudukannya hingga garis batas tahun 1967. Pada tanggal 6 November 1973 negara-negara anggota Pasar Bersama Eropa menerima resolusi yang mendukung tuntutan negara-negara Arab ini.¹¹

Suatu pertemuan puncak negara-negara Arab dilangsungkan di Aljazair pada akhir tahun 1973 untuk membahas hal-ihwal yang berkenaan dengan dilaksanakannya embargo minyak terhadap AS dan Eropa. Irak tidak menyetujui dilakukannya embargo secara pukul rata, karena dampaknya dapat menimbulkan kerugian bagi negara-negara yang bersahabat dengan negara-negara Arab. Irak lebih cenderung untuk melakukan nasionalisasi perusahaan minyak asing yang beroperasi di negara-negara Arab pemberi konsesi sebagaimana telah dilakukan oleh Irak terhadap perusahaan asing yang beroperasi di wilayahnya. Ada dugaan bahwa Irak tidak menyetujui embargo, karena Irak sangat berkepentingan untuk meningkatkan penghasilan dari penjualan minyaknya yang sejak dilakukannya nasionalisasi perusahaan minyaknya sulit mendapat bagian di pasaran minyak dunia. Kalau Irak ikut ambil bagian dalam embargo itu, maka akan menurun pula penghasilan dari penjualan minyaknya. Demikian pula dengan Libya yang tidak mau ikut serta dalam pelaksanaan embargo minyak, dengan alasan bahwa tindakan tersebut bisa mengorbankan kepentingan negara-negara Eropa yang bersahabat dengan pihak Arab. Namun seperti halnya Irak, ada dugaan bahwa bagi Libya pengurangan penjualan minyaknya akan juga berarti menurunnya penghasilan Libya. Maka Libya bukan saja menolak ikut serta dalam tindakan embargo, melainkan malahan terus melakukan penjualan minyaknya dengan harga yang dinaikkan. Baik Irak maupun Libya bukan saja tidak ikut serta dalam melakukan embargo, melainkan malah mengisi kekurangan pasokan minyak oleh negara-negara yang melakukan embargo.

Sekalipun embargo ini telah mengakibatkan panik dalam masyarakat di negara-negara konsumen, namun di pihak negara-negara produsen pun tidak tercapai kepuasan atas tuntutan terhadap

¹¹ Amris Hassan, "Minyak sebagai Senjata Politik", dalam *Ekonomi Politik Timur Tengah: Faktor Minyak*, PPWI-LIPI, Jakarta, Agustus 1996, hal 59

Digital Repository Universitas Jember

pelaksanaan segera ditariknya tentara pendudukan Israel dari semua wilayah Arab. Maka baik di pihak mereka yang terkena embargo minyak maupun dikalangan negara-negara pelaku embargo mulai tampak adanya usaha ke arah penyelesaian yang dapat diterima kedua pihak. Tuntutan pihak Arab agar tentara Israel ditarik mundur dari wilayah Arab yang didudukinya tidak mudah dilaksanakan, apalagi dengan segera. Maka perumusan tersebut harus dilunakkan menjadi "dijadwalkannya penarikan mundur tentara pendudukan Israel dari wilayah Arab yang pelaksanaannya dijamin oleh AS". Demikianlah maka penarikan mundur secara bertahap berdasarkan penjadwalan menggantikan perumusan "penarikan mundur segera" (*immediate withdrawal*).¹²

Arab Saudi yang sejak semula dikenal sebagai penentang terhadap gagasan untuk menggunakan minyak sebagai senjata politik kini justru memelopori pelaksanaan embargo minyak. Sebelum keputusan tersebut diambil, sebenarnya Arab Saudi telah mengisyaratkan kemungkinan akan digunakannya minyak sebagai senjata. Hal ini antara lain terungkap melalui pernyataan Menteri Perminyakan Arab Saudi, Ahmad Yamani, dalam kunjungannya ke Washington bulan April 1973. Pada kesempatan tersebut Yamani menyatakan bahwa Arab Saudi mungkin sekali akan menggunakan minyak sebagai senjata politik. Sebulan sesudahnya, Raja Faisal memberitahukan kepada pihak Aramco (sebuah perusahaan minyak terkemuka Amerika), bahwa kalau AS tidak mengubah sikapnya yang berat sebelah dan selalu pro-Israel, maka konsesi yang diberikan kepada Aramco akan dibatalkan. Pihak Aramco menyampaikan informasi ini kepada Kementerian Pertahanan AS dan Gedung Putih, disertai anjuran agar AS mengubah sikap politiknya secara lebih berimbang dalam menangani sengketa Arab-Israel. Namun pihak Gedung Putih tidak menghiraukan saran tersebut.

Penolakan dari Gedung Putih terhadap berbagai saran yang diajukan kepadanya didasarkan pada pendirian, bahwa AS tidak akan

¹² Ibid, hal 61

membiarkan politik luar negerinya dipengaruhi oleh tekanan dari pihak luar, apalagi yang menyangkut hubungannya dengan Israel. Lepas dari siapa Presiden dan partai mana yang sedang berkuasa di Gedung Putih, AS sejak berdirinya negara Israel selalu menunjukkan sikap berpihak kepada kepentingan Israel.¹³ Selain oleh kuatnya pengaruh *Lobby Yahudi* di berbagai lembaga politik AS, Israel juga merupakan sekutu yang dapat diandalkan oleh AS untuk mempertahankan perannya sebagai kekuatan yang berpengaruh di kawasan Timur Tengah.

Mesir dan Arab Saudi tetap menghendaki agar selekasnya embargo dihentikan. Keinginan Arab Saudi ini didasarkan pada kekhawatiran terhadap semakin meningkatnya pengaruh negara-negara Arab yang tergolong radikal dan mungkin dapat menggoyahkan posisi kepemimpinan Arab Saudi dalam dunia Arab. Bagi Arab Saudi – yang lemah secara militer – dilanjutkannya embargo niscaya akan merusak hubungannya dengan AS. Padahal Arab Saudi sendiri tidak bisa melepaskan ketergantungan jaminan keamanannya pada perlindungan AS.¹⁴

Sementara bagi Mesir sendiri, penghentian embargo ini dalam rangka untuk mendapatkan simpati dan bantuan dari AS yang diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan Mesir.

Dari rentetan peristiwa selama diberlakukannya embargo terdapat kesan kuat di pihak perusahaan minyak maupun di pihak negara-negara produsen yang melakukan embargo, bahwa penggunaan minyak sebagai senjata politik tidak akan terulang lagi di masa mendatang. Perkiraan ini didasarkan pada kenyataan bahwa penggunaan minyak sebagai senjata politik tidak mencapai sasaran sebagaimana diharapkan. Embargo minyak memang telah mengakibatkan terjadinya kegoncangan di Amerika dan Eropa. Namun ternyata negara-negara industri maju pada umumnya dapat melakukan tindakan penyesuaian sedemikian rupa sehingga akibat embargo itu berhasil diatasi. Selain pasokan

¹³ Ibid, hal 62

¹⁴ Loc.cit.

minyak dapat diperoleh dari negara-negara produsen non-OAPEC (Organization of Arab Petroleum Exporting Countries, yaitu organisasi negara-negara Arab pengekspor minyak, yang beranggotakan 7 negara Arab yang tergabung dalam OPEC yaitu Saudi Arabia, Iran, Kuwait, Irak, Qatar, Libya, Uni Emirat Arab, bersama dengan Mesir, Suriah dan Bahrain);¹⁵ kampanye secara besar-besaran untuk melakukan penghematan energi merupakan langkah yang efektif guna menanggapi akibat embargo itu. Belum lagi kenyataan bahwa persediaan minyak begitu berlimpah (*glut*), sehingga diantara negara-negara OAPEC-pun ada yang tetap menjual minyak di pasaran bebas (*spot market*). Sejalan dengan semua ini, bermunculan gagasan dan prakarsa untuk segera meningkatkan penelitian yang ditujukan pada ditemukannya sumber energi alternatif yang dapat menggantikan minyak. Maka secara keseluruhan terkesan bahwa penggunaan minyak sebagai senjata politik tidak berhasil mencapai sasaran yang ditetapkan semula.

Berlakunya embargo tampaknya tidak mempengaruhi tingkat produksi di negara-negara Timur Tengah secara keseluruhan. Pada tahun 1973 produksi minyak di Timur Tengah sudah mencapai jumlah 6.772.168.000 barrel dan kemudian meningkat menjadi 7.765.440.000 barrel, sedangkan pada tahun 1974 jumlahnya meningkat lagi hingga 7.966.810.000 barrel. Maka yang sangat berpengaruh terhadap perekonomian dunia umumnya dan AS khususnya bukanlah diberlakukannya embargo, melainkan sangat melonjaknya harga minyak.

Lepas dari kemungkinan terulangnya lagi penggunaan minyak oleh negara-negara Arab penghasil minyak sebagai senjata politik dalam menghadapi perusahaan minyak internasional, tidak kurang pentingnya perlu diperhatikan hubungan antar-negara Arab sendiri yang oleh berbagai sebab sangat rawan bagi timbulnya persengketaan. Mengingat bahwa lebih dari 60% cadangan minyak dunia berada di negara-negara dalam kawasan Timur Tengah, maka terjadinya sengketa antar-negara

¹⁵ Amien Rais, dalam Qystein Noreng *op.cit.*, hal XVII

dalam kawasan itu dengan mudah dapat membelah keseluruhan negara-negara itu dalam kubu-kubu yang saling bertentangan.

Setiap pengamat perkembangan politik Timur Tengah umumnya dan hubungan antar-negara Arab khususnya sedikit banyak harus memperhatikan berbagai penyiasaan yang dilakukan oleh beberapa negara di kawasan itu untuk dengan satu atau lain cara membangun hegemoni yang cukup disegani dan selalu diperhitungkan, baik oleh kawan (yang mengandalkan perlingdungan nya) maupun oleh lawan (yang mungkin merongrongnya). Pada umumnya terdapat kesepakatan, bahwa kontes untuk membangun hegemoni itu terjadi antara Mesir, Irak, Suriah dan Arab Saudi sebagai pelaku utama dalam persekutuan dengan beberapa negara Arab lain, baik yang langsung berbatasan dengan negara-negara tersebut (seperti Jordan, Kuwait, Oman, Yaman dan negara-negara Arab Teluk) maupun yang tidak langsung berbatasan (seperti Maroko, Tunisia, Aljazair dan Mauritania). Dalam penyiasaan untuk menegakkan hegemoninya itu masing-masing dengan sendirinya menggunakan faktor yang paling menonjol dimilikinya. Mesir, Suriah, Irak terutama sebagai kekuatan militer, sedangkan Arab Saudi merupakan sumber dana yang luar biasa karena dimilikinya cadangan minyak yang sangat besar.¹⁶

Negara-negara kecil di kawasan Teluk (seperti Oman, Kuwait, Qatar, Uni Emirat Arab dan Bahrain) yang juga merupakan negara-negara produsen minyak jelas tidak mungkin untuk secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama menghadapi ancaman militer yang mungkin ditujukan kepada mereka. Dalam hubungan ini dua sumber ancaman militer selalu membayangi perilaku politik mereka, yaitu Irak dan Iran, yang keduanya merupakan kekuatan militer sekaligus negara yang didukung oleh sumber dana dari hasil penjualan minyaknya. Bayangan ancaman yang potensial bisa berasal dari kedua negara tersebut akhirnya menjadi kenyataan dalam dua kali terjadinya perang Teluk, yaitu Perang Irak-Iran dan perang Irak Kuwait (AS yang dengan menyertakan beberapa negara lain tampil sebagai kekuatan

¹⁶ Amris Hassan, *op.cit.*, hal 69

multinasional). Perang Teluk II pada dasarnya merupakan perang antara Irak dan AS. Dalam perang ini AS untuk pertama kalinya – sesudah perang Vietnam – mengerahkan angkatan bersenjataanya secara besar dan dengan dukungan persenjataan yang paling mutakhir. Dalam Perang Teluk II itu penyertaan pasukan dari beberapa negara Arab hampir tiada artinya dibandingkan dengan besarnya kekuatan militer AS yang dilibatkan sebagai kombatan. Menarik sekali untuk dipahami, bahwa pada tahun 1990 AS masih merupakan mitra dagang terbesar bagi Irak.¹⁷ Masyarakat internasional pun menyaksikan, betapa besar keterlibatan AS dalam memberikan dukungannya pada Irak selama berlangsung peperangannya melawan Iran. Sedangkan dukungan dana bagi Irak diperoleh dari Arab Saudi dan Kuwait serta negara-negara Arab Teluk. Akan tetapi pola aliansi segera berubah secara mendasar ketika Irak melakukan penyerbuan ke Kuwait.

Selesainya Perang Teluk I belum sepenuhnya dapat dianggap telah pulihnya hubungan antara Irak dan Iran seperti sedia kala. Demikian juga selesainya Perang Teluk II pun belum bisa diartikan tuntasnya permasalahan antara Irak dan Kuwait. Dikalangan negara-negara Teluk khususnya masih terdapat kecurigaan bahwa Irak sesungguhnya tidak sudi menerima ditegaskannya tapal batas internasional baru yang ditarik antara Kuwait dan Irak setelah selesainya Perang Teluk II.

Kekhawatiran terhadap kemungkinan terjadinya lagi gejolak bersenjata di kawasan ini telah dijadikan alasan oleh AS untuk tetap menggelar kekuatan militer ketiga angkatan di kawasan Teluk. Bahkan kali ini tidak saja di lepas pantai melainkan juga di daratan Jazirah Arab.

Dalam situasi yang seperti ini ternyata Arab Saudi bersama dengan negara-negara Arab Teluk lainnya tidak punya pilihan lain kecuali mengandalkan jaminan keamanannya pada AS. Selain merupakan kekuatan militer terbesar dengan persenjataan tercanggih,

¹⁷ Korany, B., Noble, P., and Brymen, R. (eds.) "The Many Faces of National Security in the Arab World" (New York, St. Martins Press, 1993), hal 122

AS sanggup pula memainkan peran yang efektif di forum internasional (di Dewan Keamanan PBB khususnya) untuk menghadang ancaman Irak dengan kekuatan militer yang luar biasa. Ditingkatkannya postur kehadiran militer AS baik di lepas pantai (off-shore) maupun di daratan (on-shore) beberapa negara Teluk jelas berkaitan dengan usaha untuk menjamin keamanan sumber minyak di kawasan itu serta jalur-jalur penyalurannya untuk memasok kebutuhan pasar minyak dunia umumnya dan negara-negara industri khususnya. Sebagaimana diutarakan oleh dubes AS untuk PBB, **Madelaine Albright**, ketika berkunjung ke Jakarta sebelum dimulainya Sidang Umum PBB 1995, AS tidak mungkin membiarkan kawasan dengan cadangan minyak terbesar itu jatuh ke tangan seorang diktator (maksudnya Saddam Hussein).¹⁸ Pernyataan Albright itu jelas menggambarkan betapa minyak menjadi pertimbangan utama bagi kehadiran militer AS di kawasan Teluk. Maka patut dipertanyakan, apakah AS sudi melakukan hal yang sama seandainya di kawasan ini tidak tersimpan cadangan minyak terbesar di dunia. Dari semua kenyataan di atas ini tampaknya tidak berlebihan untuk menarik kesimpulan, bahwa minyak masih merupakan sumber energi utama dan andalan untuk masa mendatang. Betatapun penelitian untuk mendapatkan sumber energi alternatif sebagai pengganti minyak, namun tetap akan diperlukan waktu yang cukup lama sebelum energi alternatif itu bisa dihasilkan dalam jumlah yang mencukupi untuk memasok kebutuhan dunia, khususnya bagi kebutuhan negara-negara industri maju.

Tabel II : Cadangan Minyak Dunia

Negara	Miliar Barel	%
Arab Saudi	260,0	26,3
Irak	100,0	10,1
Uni Emirat Arab	98,1	9,9
Kuwait	96,5	9,7
Iran	92,9	9,4
Venezuela	59,1	6,0
F.I.S	57,0	5,8
Meksiko	51,3	5,2

¹⁸ Kompas, 22 Agustus 1995

AS	26,3	2,7
Cina	24,0	2,4
Libya	22,8	2,3
Nigeria	17,9	1,8
Aljazair	9,2	0,9
Norwegia	7,6	0,8
Indonesia	6,6	0,7
India	6,1	0,6
Kanada	5,6	0,6
Mesir	4,5	0,5
Oman	4,3	0,4
Yaman	4,0	0,4
Inggris	4,0	0,4
Lain-lain	32,9	3,1
Total	991,0	100,0

Data dari: *Oil & Gas Journal*, Dec. 1991 dalam Amris Hassan, *Minyak sebagai Senjata Politik*, Jurnal PPWI-LIPI, Jakarta, Agustus 1996, hal. 73

3.1.3 Israel Sebagai Mitra Utama AS di Timur Tengah

Sejak berakhirnya Perang Dunia I, AS memainkan diplomasi yang aktif di Timur Tengah.¹⁹ Pada waktu itu Presiden Woodrow Wilson mengirimkan sebuah komisi King-Crane ke Timur Tengah dalam rangka mengkaji beberapa kemungkinan akibat penerapan Deklarasi Balfour 1917 yang menjanjikan "Tanah Yahudi di Palestina". Dalam Deklarasi Balfour²⁰ ini menyebutkan bahwa Yahudi memperoleh pengakuan resmi atas pentingnya sebagai juru bicara bagi Dunia Yahudi. Deklarasi ini telah menetapkan babak baru dalam sejarah Yahudi, yaitu membangun rumah nasional di Palestina. Dalam periode baru ini, Zionis mengubah diri sendiri dari misionaris menjadi pembangun negara.

Perang Dunia II menciptakan kepentingan yang lebih besar di Timur Tengah. Mandat Inggris di Palestina berakhir pada 15 Mei 1948, dan ketika kemerdekaan negara Israel diproklamkan, baik Amerika maupun Uni Soviet (waktu itu) mengakui republik baru itu pada hari yang sama, 18 Mei 1948. Perang antara Arab dan Israel berlangsung sesudah kemerdekaan Israel, dimana pihak Arab menggunakan senjata

¹⁹ Robert G. Neumann, "United States Policy in The Middle East", *Current History* (Januari 1984) dalam M. Riza Sihbudi, "Timur Tengah, Dunia Islam dan Hegemoni Amerika" Pustaka Hidayah, Jakarta, Agustus 1993, hal 17

²⁰ George Lenczowski, op cit., hal 237

dari Cekoslovakia. Kendati Soviet termasuk yang pertama kali mengakui kemerdekaan Israel, tetapi Soviet dan sekutu-sekutunya justru berpihak pada negara-negara Arab. Dan, Amerika-lah yang terus menjadi pendukung utama Israel.

Pada saat yang sama, pihak Arab menyadari bahwa AS, sebagai satu-satunya kekuatan dunia yang mempunyai pengaruh pada kedua belah pihak yang berkonflik, mampu untuk menciptakan “perdamaian” di Timur Tengah.

Alan Taylor menulis dalam bukunya, **The Superpower and the Middle East**, bahwa kebijakan Amerika di Timur Tengah kontemporer beranjak dari kebutuhan untuk menegaskan dan melindungi kepentingan AS di sebuah kawasan dimana sebelum PD I Washington tidak mempunyai peran politik apa pun.²¹ Formulasi kebijakan AS didasarkan pada interaksi dua doktrin taktis: menciptakan sistem aliansi dan – selanjutnya – “perwakilan” (menciptakan rezim-rezim yang bisa “mewakil” kepentingan AS di Timur Tengah).

Pada mulanya kebijakan AS tersebut ditujukan untuk “meminimalkan” (**minimize**) pengaruh Uni Soviet di kawasan Timur Tengah.²² Untuk itu AS menjadikan Israel dan Iran (di bawah Shah) sebagai sekutu terpentingnya. Namun dalam perkembangannya, karena kehadiran Israel menimbulkan kontroversi, AS pun menjadi pihak yang terlibat dalam konflik yang berkepanjangan di kawasan ini. Obsesi AS yang di satu sisi ingin menciptakan “perdamaian”, tetapi di sisi lain membutuhkan sekutu yang dapat menjamin kepentingannya, menimbulkan kontradiksi dalam kebijakan AS di Timur Tengah.

Menurut **Taylor**,²³ pemimpin AS pertama yang mencoba mengusahakan perdamaian dalam konteks kawasan Timur Tengah adalah Presiden Harry S. Truman ketika ia mencoba – tapi gagal – mencegah pecahnya perang di wilayah Palestina pada awal 1948. Dan memang, sejak berdirinya Israel tahun 1948 konflik utama yang

²¹ Alan Taylor, **The Superpower and The Middle East**. (Syracuse, Syracuse University Press, 1991) hal 49 dalam loc cit.

²² Ibid, hal 18

²³ Taylor, dalam M. Riza Sihbudi, op.cit hal 50

mendominasi pertikaian antar negara di wilayah tersebut bertumpu pada konflik antara Israel dengan negara-negara Arab yang ingin memperjuangkan kembali wilayahnya yang telah diduduki oleh Israel sejak perang tahun 1967 serta memberikan kedaulatan wilayah atas rakyat Palestina.²⁴

Pemerintahan Truman saat itu mengusulkan agar PBB bertindak mencegah permusuhan secara terbuka antara negara Yahudi Israel yang baru lahir dan negara-negara ArabPalestina. Namun, akibat tekanan dari dalam dan luar negeri, Truman menarik kembali usulannya dan pecahnya perang pun tak dapat dihindarkan.

Pada tahun 1950, Truman memutuskan untuk memainkan peranan sebagai penjamin status quo di Timur Tengah sebagai salah satu cara mengupayakan terciptanya stabilitas di kawasan ini. Pada tanggal 25 Mei, bersama Inggris dan Perancis, AS menandatangani **Tripartite Declaration** ("deklarasi tiga pihak"), yang bertujuan menciptakan perimbangan kemampuan militer antara Arab dan Israel, mengusahakan perdamaian dan stabilitas, serta mencegah penggunaan kekuatan militer untuk mengubah perbatasan yang sudah ada. Dalam kenyataannya, Tripartite Declaration tidak mampu menciptakan perdamaian maupun stabilitas politik di Timur Tengah.

Sejak berdirinya Israel pada tahun 1948 konflik utama yang mendominasi pertikaian antar negara di wilayah tersebut bertumpu pada konflik antara Israel dengan negara-negara Arab yang ingin memperjuangkan kembali wilayahnya yang telah diduduki oleh Israel sejak perang tahun 1967 serta memberikan kedaulatan wilayah atas rakyat Palestina.

Dukungan AS terhadap Israel didasarkan pada simpati terhadap perjuangan bangsa Israel untuk memperoleh tanah airnya sendiri terutama setelah bangsa Yahudi mengalami *genocide* semasa Hitler berkuasa di Jerman. AS adalah negara pertama yang mengakui kedaulatan Israel sebagai suatu negara yang berdiri sendiri pada tahun

²⁴ Smita Notosusanto, "Krisis Teluk dan Politik Luar Negeri AS Pasca Perang Dingin", dalam GLOBAL, Jurnal Politik Internasional 2, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1991, hal 47

1948. Rasa simpati ini khususnya didukung oleh rakyat Yahudi di AS yang sampai kini memiliki pengaruh politik yang amat kuat terhadap politik luar negeri AS di Timur Tengah. Lobi Yahudi di AS juga menjadi sumber dukungan ekonomi yang berharga bagi Israel.

Persahabatan Israel dengan AS merupakan gambaran penting hubungan Israel dengan negara-negara besar. Pengaruh AS sangat besar bagi terciptanya resolusi PBB tentang pembagian. Israel mengharapkan dan memperoleh bantuan ekonomi dari AS. Selama kunjungan Dr. Weizmann, pemimpin **Organisasi Zionis Dunia (World Zionists Organization)** di Washington (Mei 1948), kepadanya dijanjikan bantuan sebesar US \$ 1.000.000.000 yang terpenuhi pada bulan Januari 1949 melalui Bank Ekspor Impor. Negara-negara Arab tidak pernah menerima bantuan langsung seperti itu dari AS. Pada bulan Januari 1949 itu pula AS memberi pengakuan penuh secara *de jure* dan menunjuk tokoh terkenal pro-Zionis, Dr James G. McDonald, sebagai duta besar AS pertama di Tel Aviv. Israel mengundang para ahli Amerika, seperti Dr. Walter C. Lowdermolk, guna memberikan advis dalam bidang irigasi dan masalah teknik lainnya. Ia juga menyetujui kontrak dengan perusahaan otomotif Ford dan Kaizer-Frazer yang menghasilkan pendirian pabrik perakitan mobil di negara baru ini. Pada tahun 1950 kedua negara menandatangani perjanjian **Point Four** yang memperluas bantuan Amerika terhadap Israel.²⁵

Bagi AS sendiri, politik pro-Israel ini bukannya tanpa hambatan dan keraguan. AS hampir saja meninggalkan resolusi pembagian PBB dan lebih mendukung rencana mandat. Perubahan lainnya terjadi ketika Menlu Marshal mengumumkan pengesahan resmi AS terhadap rencana Bernadotte pada akhir tahun 1948. Selain itu, Presiden Roosevelt dan Truman berulang-ulang menegaskan bahwa AS tidak akan mendukung setiap penyelesaian Palestina yang bertentangan dengan keinginan Arab. Sikap mendua AS ini disebabkan oleh pemisahan tanggung jawan antara Gedung Putih dan Departemen Luar Negeri. Sementara yang terakhir memilih Timur Tengah secara keseluruhan, Gedung Putih menghendaki

²⁵ George Lenczowski, *op. cit.*, hal 259

isolasi masalah Zionis dari lingkungan Arab sehingga hanya menjadi masalah domestik. Meskipun demikian, diplomasi AS pada umumnya pro-Israel.

Walaupun tidak memiliki jumlah penduduk yang besar dan tidak memiliki sumber-sumber minyak bumi, Israel tetap merupakan sekutu yang penting bagi AS karena kekuatan militer serta integritas nasionalnya yang kuat. Hal ini dibutuhkan oleh AS untuk membantu membendung ekspansi Uni Soviet di Timur Tengah.²⁶ Begitu pentingnya posisi Israel sehingga dalam suatu perjanjian bilateral antara kedua negara tersebut AS menyatakan Israel sebagai "sekutu non-NATO yang terpenting bagi AS". Sebagai konsekuensinya Israel mendapat perlakuan khusus dalam pembelian perakitan militer buatan AS. Setiap tahunnya, bantuan luar negeri AS terhadap Israel mencapai rata-rata US \$ 3 - 3,5 milyar.²⁷ Pada tahun 1985 Israel menandatangani dibentuknya wilayah perdagangan bebas '**Free Trade Area**' yang menghapuskan semua tarif serta hambatan-hambatan perdagangan bilateral antara kedua negara.²⁸

Hubungan erat diantara kedua negara (Israel dan AS) ternyata tidak disukai oleh sekutu-sekutu AS dikalangan negara-negara Arab. Sebaliknya, Israel mencurigai setiap tindakan pendekatan yang dilakukan AS terhadap negara-negara Arab. Pada dasarnya, dalam konflik Arab-Israel, AS ingin memainkan suatu peranan sebagai perantara yang netral, terutama karena AS juga menganggap penting hubungannya dengan negara-negara Arab seperti Saudi Arabia dan Mesir. Namun bagi Israel, netralitas dapat disamakan dengan posisi pro-Arab.

Perbedaan pendapat dan paham antara Israel dengan AS misalnya muncul ketika AS pada masa pemerintahan Reagan mengambil keputusan untuk menjual pesawat AWACS dan sejumlah rudal ke Saudi Arabia. Israel memprotes keputusan ini karena dianggap akan

²⁶ Ambrose, dalam Smita Notosusanto, *op.cit.*, hal 48

²⁷ Ellen B. Laipson, **Israel-American Relations**, Washington DC, Congressional Research Service, 1990 hal 9-11 dalam *loc.cit.*

²⁸ *Ibid*, hal 10 dalam *loc.cit.*

Digital Repository Universitas Jember

membahayakan keamanan Israel. Sebaliknya permintaan Arab Saudi akan pesawat-pesawat intelejen AWACS ini lebih didasarkan pada keinginan untuk menguji ketulusan hubungan AS dengan Saudi Arabia daripada kepentingan pertahanan regional.²⁹

Meskipun peran lobi Israel di AS sering dianggap sebagai faktor utama kebijaksanaan AS yang mendukung Israel, akan tetapi lobi ini tidak selalu mengambil posisi yang sama dengan Israel. AIPAC (American-Israel Political Action Committee) yang merupakan lobi Israel di AS, berulang kali menentang posisi PM Shamir yang dianggap terlalu konservatif dan menghambat proses perdamaian bagi penduduk Palestina di wilayah yang diduduki Israel. Selain itu pula, dalam memadamkan kegiatangerakan intifadha oleh masyarakat Palestina, Israel terlalu sering menggunakan kekerasan. Dan, terakhir terdapat perbedaan pandangan antara Shamir dengan Presiden Bush dan Menlu Baker karena ketidaksediaan Shamir untuk menerima usulan perdamaian Baker. Shamir juga berkehendak untuk melaksanakan usulan perdamaiannya sendiri. Kebijakan Shamir untuk mendatangkan imigran Yahudi dari AS dan menempatkan mereka di wilayah-wilayah Gaza dan Tepi Barat juga menimbulkan ketegangan dengan Presiden Bush yang menganggap kebijaksanaan ini sebagai penghambat utama ke arah perdamaian di Timur Tengah.³⁰

Strategi Pasca Perang Teluk II dan keeratan hubungannya dengan AS akan dimanfaatkan oleh Israel untuk mendorong usulan perdamaiannya sendiri dalam usaha menyelesaikan masalah Palestina. Usulan ini seperti usulan-usulan Israel yang telah lamapau, tidak akan memberikan kedaulatan mutlak bagi rakyat Palestina atas wilayah-wilayah yang kini diduduki Israel. Israel juga akan bersikeras untuk tidak menarik mundur pasukan-pasukannya dari wilayah yang didudukinya, bahkan bila pemilu sedang berlangsung. Besar

²⁹ Laipson, op.cit., hal 13 "Surve of U.S. Jewish Leaders Finds Overwhelming Support for Israeli-PLO Talks", *The New York Times*, 2 Oktober 1990, dalam loc.cit.

³⁰ Jonathan Diehl, "Israeli Settlers Are Making Themselves At Home: Outposts in the Occupied Territories are Growing Skadily and Quckly", *The Washington Post National Weekly Edition*, 2-8 Juli 1990 hal 17 dalam ibid, hal 40

kemungkinan posisi Israel akan dengan mudah diterima karena keengganan negara-negara Arab untuk terjun kedalam permasalahan lain setelah baru menyelesaikan Perang Teluk. AS juga akan mampu menekan negara-negara Arab untuk lebih bersifat fleksibel di meja perundingan karena peran AS membantu mereka dalam Perang Teluk. Dukungan PLO terhadap Saddam Hussein dalam Perang Teluk juga akan memperlemah kedudukan negara-negara Arab dalam menghadapi Israel.

Proses politik domestik Israel, seperti di masa lalu, juga akan mempengaruhi efektifitas pengaruh AS dalam usaha mencari penyelesaian terhadap masalah Palestina. Pada masa Reagan, pemerintah Partai Buruh Israel yang dipimpin Perdana Menteri Shimon Peres kini berkuasa di Israel, lebih bersifat kooperatif terhadap usulan-usulan perdamaian Reagan untuk memberi otonomi terhadap masyarakat Palestina yang tinggal di wilayah Gaza dan Tepi Barat. Namun pemerintahan Perdana Menteri Shamir dari Partai Likud yang lebih konservatif cenderung untuk berpegang teguh pada prinsip bahwa Israel tidak akan mundur dari wilayah-wilayah yang telah didudukinya sejak tahun 1967.³¹

Wilayah Timur Tengah akan masih menjadi kawasan yang penting bagi AS namun AS tidak akan mampu menanggung beban keterlibatan yang sedemikian besar untuk menyelesaikan setiap konflik regional yang akan muncul. Terlebih lagi dalam masalah Palestina, tampaknya Israel masih akan tetap menjadi mitra yang sejati bagi AS.

3.2 Politik Luar Negeri Libya di Timur Tengah

3.2.1 Naiknya Khadafy sebagai Tokoh Sentral Libya

Kekuasaan Raja Idris I yang semakin mutlak, ditambah dengan semakin merajalelanya korupsi di lingkungan istana, telah membangkitkan ketidakpuasan di kalangan rakyat Libya. Pada mulanya Raja berhasil mengeliminasi setiap bentuk oposisi. Tetapi sekelompok

³¹ Joel Brinkley, "Ariel Sharon: Talking Tough" dalam *The New York Times Magazine*, 8 Juli 1990, hal 41-42 dalam ibid, hal 49

perwira muda dibawah kepemimpinan Kapten Muammar Khadafy (mantan salah seorang ajudan istana) berhasil, mengantisipasi keadaan. Mereka melancarkan kudeta tak berdarah pada 1 September 1969, di saat Raja Idris I sedang berada di luar negeri. Dan yang lebih penting, di saat ketidakpuasan terhadap monarki semakin meluas.

Khadafy dan kawan-kawannya segera membentuk **Dewan Komando Revolusi (DKR)** yang beranggotakan 12 perwira muda, dengan Khadafy sendiri sebagai Sekjen-nya. UUD dihapuskan, pemerintah dan parlemen dibubarkan. Bentuk kerajaan diganti dengan republik, dengan nama Republik Arab Libya.³² DKR mengambil alih semua jabatan eksekutif dan legislatif, dan menunjuk Dr. Mahmud Sliman Al-Maghrebi (bukan anggota DKR) sebagai perdana menteri yang baru. Januari 1970, Khadafy mengambil alih jabatan perdana menteri, setelah terjadi usaha perebutan kekuasaan yang didalangi Menteri Pertahanan Kol. Adam Al Ahwaz dan Menteri Dalam Negeri Musa Ahmad pada bulan Desember 1969.³³

Khadafy lahir pada tahun 1942 di sebuah pemukiman Badui di padang pasir sebelah selatan Sirte, Libya Utara. Ia berasal dari suku Qaddadli yang sederhana dan taat kepada agama Islam. Menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah di sekolah Islam yang menggunakan pengantar bahasa Arab, Khadafy selanjutnya memusatkan studinya di bidang sejarah, sambil belajar di akademi militer. Dari sanalah ia mulai tertarik pada Revolusi Mesir 1952, serta perang Mesir-Israel 1956 (waktu itu Israel dibantu oleh Inggris dan Perancis).³⁴ Di akademi militer, Khadafy bertemu dengan teman-temannya yang beberapa tahun kemudian bersama dia membentuk DKR. Sahabatnya yang paling dekat adalah *Abdul Salam Jalloud*, yang sampai kini menjadi orang nomor dua di Libya.

³² M. Riza Sihbudi, *Bara Timur Tengah*, Mizan, Bandung, 1991, hal 84

³³ Mary Kaldor dan Paul Anderson (Eds.), *Serangan Amerika Serikat ke Libya: Negara Berdaulat Dibantai*, MD Press, Jakarta, 1987, hal 122-123

³⁴ Loc.cit.

Digital Repository Universitas Jember

Latar belakang pendidikan dan keluarganya yang menjadi landasan kokh bagi Khadafy untuk menjadi seorang yang keras dalam hal moralitas, hidup puritan dan kepekaan terhadap sosial yang tinggi. Ia anti alkohol dan kehidupan malam. Lebih suka tinggal di barak daripada di istana. Dengan cermat Khadafy memperhatikan kejadian-kejadian di lingkungan sekitarnya, dan apa yang menjadi kebutuhan rakyatnya. Khadafy menganggap Raja Idris I sebagai seorang yang reaksioner, berada di bawah pengaruh kekuatan asing dan membuat rakyat Libya terbelakang. Khadafy sangat terpengaruh dengan ide-ide Gammal Abdul Nasser (Presiden Mesir 1956-1970), terutama tentang Nasionalisme Arab, Sosialisme dan Pan-Islamisme. Begitu pula tentang "tiga lingkaran": Arab, Afrika dan Islam. Tahun 1971 Khadafy membentuk partai Persatuan Sosialis Arab (PSA) yang mirip PSA-nya Nasser. PSA merupakan partai politik pertama di Libya sejak merdeka tahun 1951. Sebagaimana Nasser, Khadafy menganggap dirinya sebagai "kampiu" di dunia Arab, Afrika dan Islam.

Setelah memperoleh kekuasaan, Khadafy bersama rekan-rekannya di DKR melancarkan perombakan besar-besaran di segala sektor (politik, ekonomi, dan sosial-budaya). Perombakan tersebut disesuaikan dengan semboyan mereka: "Kemerdekaan, Sosialisme dan Persatuan" yang kemudian lebih dijabarkan secara terperinci dalam **Buku Hijau (Green Book)**. Beberapa kebijaksanaan yang dijalankan Khadafy pada masa awal kekuasaannya, antara lain: penghentian pemeliharaan istana-istana raja, pemakaian kalender Arab dan Islam dalam komunikasi-komunikasi umum, pengangkatan seorang Mufti Agung (penasihat resmi pemerintah dalam menafsirkan hukum Islam), laangan penggunaan alkohol, serta penutupan bar dan klab-klab malam.

Pada tahun 1970 Khadafy mengusir tentara Inggris dan Amerika dari pangkalan Tobruk, El-Adem dan Wheelus. Disusul dengan penyitaan harta benda dan pengusiran 25.000 pemukim Yahudi dan Italia, serta nasionalisasi beberapa perusahaan minyak asing seperti Shell, ESSO dan ENI.

Dalam upaya menciptakan persatuan Arab, Khadafy membuat federasi dengan Mesir, Sudan, dan Suriah (1969-1970). Kemudian dengan Mesir saja (1973), dengan Tunisia (1974), dengan Suriah saja (1980), dengan Chad (1980-1981) dan terakhir dengan Maroko (1985).³⁵

Pada awal 1974, dengan bantuan Uni Soviet dan Perancis, pemerintah Khadafy mulai memodernisasi angkatan bersenjata yang sampai sekarang diperkirakan meliputi: 1.200 tank termasuk dari jenis T-72, 1.000 mobil lapis baja pengangkut pasukan, 110 jet tempur Mirage dan helikopter Super Frelon buatan Perancis, 2 skuadron MIG-23, selusin pembom TU-22, sistem rudal darat ke udara buatan Soviet, sejumlah rudal jenis SCUD dan FROG-7, serta sejumlah MIG-25.³⁶ Serta pembelian 15 bomber SU-24D dari Uni Soviet, yang mendapatkan protes dari pemerintah AS pimpinan George Bush.³⁷ Libya diperkirakan menyediakan dana sebesar 13 milyar dolar AS untuk anggaran militernya.

3.2.2 Khadafy dan Pandangan Politiknya

Pada tahun 1974, Khadafy melemparkan gagasannya yang ia namakan sebagai **“Teori Universal Ketiga” (Third Universal Theory)** yang, menurutnya, merupakan “teori alternatif” dari kapitalisme dan komunisme. Menurut Khadafy Teori Universal Ketiga (TUK) merupakan pemecahan final terhadap perjuangan umat manusia selama berabad-abad untuk mencapai kemerdekaan politik, ekonomi dan sosial. Serta merupakan falsafah alternatif bagi komunisme Marxis dan kapitalis Barat. TUK, yang juga merupakan penjabaran semboyan “Kemerdekaan, Sosialisme dan Persatuan” dimuat dalam tiga seri “Buku Hijau”.

Buku Hijau seri pertama diterbitkan tahun 1975, dengan judul: **“Pemecahan Masalah Demokrasi: Kekuasaan Rakyat”**. Isinya menguraikan aspek-aspek politik teori ketiga. Buku pertama terdiri atas 48 halaman dan dijual dengan harga 1 dinar Libya (\$ US 3,35). Seri

³⁵ Ibid, hal 85

³⁶ Loc.cit.

³⁷ Pelita, 20 April 1989

kedua berjudul: **“Pemecahan Masalah Ekonomi: Sosialisme”**, diterbitkan 1978. Antara lain berisi gagasan bahwa individu harus dibebaskan dengan memenuhi kebutuhan-kebutuhannya, dan dengan melarang mereka menguasai sesuatu yang menjadi kebutuhan orang lain. Dan bahwa buruh gajian merupakan bentuk “perbudakan modern”, oleh karenanya harus diganti dengan wiraswasta. Sedangkan seri ketiga, yang berjudul: **“Dasar-dasar Sosial Teori Universal Ketiga”**, menguraikan aspek-aspek sosial teori tersebut. Seri ketiga diterbitkan tahun 1979, Khadafy menamakan sosialisme sebagai “sosialisme ilmiah yang Islamis”, yaitu sosialisme yang didasarkan pada keimanan, kepercayaan dan warisan rakyat Libya.³⁸

Dari ketiga seri Buku Hijau, yang paling penting adalah seri pertama, karena ia menjadi landasan bagi perubahan struktur politik Libya. Pada tahun 1977 terjadi perubahan struktur politik secara drastis, dimana bentuk republik diganti dengan “negara massa” (Jamahiriya). Nama Republik Arab Libya diubah menjadi Jamahiriya Arab Libya Rakyat Sosialis, biasanya disingkat dengan Jamahiriya saja.³⁹ Dan pada dekade 1980-an, nama Khadafy sering dikaitkan – khususnya oleh para pembentuk opini Barat – dengan ‘terorisme internasional’.

Dalam visi politiknya, Khadafy menyatakan, *“The truth is that Islam is a great revolution, may, it is a world revolution.....The voice of truth and the Islamic revolution must echo in every part of the world.”* Pernyataannya itu terdapat dalam “Buku Hijau” (Green Book) jilid kedua yang terbit pada 1977 dengan judul **The Solution of the Problem of the Economy, Socalism.**⁴⁰

Dari pernyataan Khadafy yang dikutip di atas, dan dari judul-judul tiga jilid “Buku Hijau”-nya terlihat jelas bahwa Khadafy berusaha menggabungkan antara nilai-nilai Islam dan Sosialisme – yang menurut

³⁸ M. Riza Sihbudi, *op.cit*, hal 86

³⁹ *Loc cit*.

⁴⁰ Raymond N, Habiby, “Mnammar Qadhafi’s New Islamic Scientific Socialist Society”, *Middle East Review*, Vol. XI, No. 4, Musim Panas, 1979, dalam *ibid* hal 91

Time, "Sosialisme Badui".⁴¹ Khadafy memang lahir di sebuah pemukiman Badui di padang pasir sebelah selatan kota Sirte, Libya Utara (pada 1942). Kedua orang tuanya berasal dari suku Qaddadfa yang sederhana dan taat kepada ajaran Islam. Nama Khadafy diambil dari nama sukunya.

Khadafy sangat membenci kolonialisme. Suatu ketika, di tahun 1962, ia pernah membuat marah seorang Insoektur Inggris, bernama Johnston. Pagi hari itu, Johnston memasuki kelas untuk memberikan pelajaran bahasa Inggris. Untuk menghormati sang guru, semua siswa serentak berdiri, kecuali Khadafy yang tetap duduk terpaku. Johnston yang merasa dihina, segera memerintahkan Khadafy untuk keluar dari kelas. Tapi, dengan cepat Khadafy menjawab, "Andalah yang harus keluar. Betapa beraninya Anda mengusir saya di tanah air saya sendiri. Anda Kolonialis!"⁴²

Tingginya kepakaan sosial Khadafy terlihat dari sikapnya yang dengan cermat memperhatikan kejadian-kejadian di lingkungan sekitarnya. Ia menilai monarki Raja Idris I sebagai reaksioner, korup dan dikangkangi oleh kekuatan asing yang, pada akhirnya, membuat rakyat Libya sangat terbelakang serta makin lebarnya jurang sodial, antara kemiskinan di kalangan rakyat banyak dan kemewahan segelintir manusia di lingkungan istana.

Namun, Khadafy juga merasa prihatin terhadap apa yang ia sebut sebagai, "the backwardness of the Islamic nation from Indonesia to Mauritania."⁴³ Keterbelakangan yang melanda umat manusia, menurut Khadafy, disebabkan terutama oleh "the wrath of God" (kemarahan Tuhan) yang dimanifestasikan dalam bentuk, "backwardness, hunger, disese, imperialism, reactionary style of life, and a dictatorship installed over them from within."⁴⁴

⁴¹ "Qaddafi: Obsessed by a Ruthless Messianic Vision", *Time*, 21 April 1986, dalam loc.cit.

⁴² Frederick Muscat, *Muammar Khadafi: Anakku, Presidenku*, Beunebi Cipta, Jakarta, 1988, hal 30-35 dalam loc.cit.

⁴³ *Green Book II*, hal 21 dalam ibid hal 92.

⁴⁴ *Ibid* 20 dalam loc.cit.

Kesemuanya itu, menurut Khadafy, harus diatasi dengan mengibarkan bendera “revolusi Islam”. Karena, Islam adalah, “the religion of freedom, the religion of progress, the religion of equality, the religion of justice.....”.⁴⁵ Revolusi memang menjadi bagian terpenting dari obsesi Khadafy. Pada tahun 1981, ia pernah mengatakan, “Saya bukan seorang pemimpin politik. Saya hanya memimpin jalannya revolusi.” Katanya, “I am leader of a revolution that expresses the feelings of the whole Arab nation and the whole Islamic world.”⁴⁶

Kebijakan yang dijalankan Khadafy selama berkuasa, pada hakekatnya merupakan upaya mewujudkan obsesinya, baik tentang “revolusi”, “teori universal ketiga”, maupun tentang “persatuan Arab”. **Dr. Lisa Anderson**, seorang ahli masalah Libya, melukiskan Khadafy sebagai seorang yang teguh terhadap prinsip-prinsip yang diyakininya, termasuk dalam menghadapi tekanan internasional.⁴⁷

Untuk mewujudkan obsesinya, di sektor politik domestik, Khadafy melakukan perombakan besar-besaran terhadap struktur kenegaraan Libya. Pada Maret 1977, nama Republik Arab Libya yang dipakai sejak 1 September 1969, diubah menjadi **Jamahiriya Rakyat Arab Libya Sosialis**. Menurut Khadafy, Jamahiriya berarti “negara massa” (people dom). Nama kantor berita Libya, **JANA**, merupakan kependekan dari **Jamahiriya Arab News Agency**.

Sejalan dengan perombakan struktur kenegaraan, lembaga-lembaga politik pun mengalami perubahan total. Dewan Komando Revolusi (RCC) dan Partai Uni Sosialis Arab (ASU) yang mendominasi politik Libya pasca “revolusi 1969”, diganti dengan lembaga politik baru yang diberi nama Kongres Nasional Umum (GNC). Istilah pemerintahan (government) diubah menjadi Komite Nasional Umum, dan Kedutaan Besar diubah menjadi Biro Rakyat.

Namun, dalam menjalankan politik domestiknya, Khadafy – sebagaimana para penguasa di Dunia Ketiga lainnya – kurang

⁴⁵ Loc. cit.

⁴⁶ “A talk with the Colonel”, *Time*, 20 Juli 1981, dalam loc. cit.

⁴⁷ Lisa Anderson, “Assessing Libya’s Khadafi”, dalam *Current History* (Mei 1985) dalam loc. cit.

mentoleransi adanya perbedaan pendapat. Bahkan ia termasuk sangat represif terhadap lawan-lawan politiknya. Salah satu kelompok anti-Khadafy yang paling terkemuka adalah **Front Nasional Pembebasan Libya (NFSL)** yang – menurut majalah *Arabia* – merupakan “the most important Libyan opposition movement with pro-Islamic tendency”.⁴⁸

NFSL yang didirikan pada 7 Oktober 1981 oleh mereka yang sebelumnya tergabung dalam Asosiasi Islam Libya (IAL) itu, juga mempunyai sayap militer yang bernama Korps Pembebasan (Solvation Corps). Pada 8 Mei 1984, 30 komando Korps Pembebasan mencoba membunuh Khadafy dengan menyerang tempat kediamannya di Tripoli, namun mengalami kegagalan. Setahun berikutnya, 75 perwira militer yang diduga terlibat dalam aksi-aksi NFSL dieksekusi.⁴⁹ Kelompok ini menuduh Khadafy telah “menyimpangkan” ajaran-ajaran Islam.

Sebelumnya, pada Juni 1971, Persatuan Arab Sosialis diumumkan sebagai satu-satunya partai politik negara.⁵⁰ Pendapatan dari minyak disalurkan untuk proyek-proyek pembaharuan dan pembangunan, seringkali direncanakan dan dilaksanakan secara serampangan. Pengeluaran untuk pembangunan bidang pertanian meningkat sampai 900% antara 1970-1974, dan pembangunan bidang industri mencapai 600%. Sistem kesejahteraan sosial yang unik di Dunia Arab dibangun dengan cepat. Pada pertengahan 1970-an warga negara Libya menikmati fasilitas pendidikan dan perumahan gratis, subsidi kendaraan dan pasar yang berlimpah ruah dengan barang-barang konsumsi. Salah satu masalah terbesar bagi rejim adalah kurangnya tenaga kerja trampil; datangnya kesejahteraan yang berasal dari minyak bagi masyarakat yang mata pencaharian utamanya bertani tidak mendorong lahirnya kelas industri dan pekerja bangunan. Pada umumnya mereka menyerahkan masalah ini kepada para teknisi dan manajer. Dari permulaan 1970-an, ribuan tenaga kerja asing, terutama

⁴⁸ “The Struggle for Libya”, *Arabia*, Juni 1984, dalam *ibid* hal 93

⁴⁹ Lisa Anderson, “Libya’s Qaddafi: Still in Command?” dalam *Current History*, Februari 1987 dalam *loc cit*

⁵⁰ Mary Kaldor dan Paul Anderson (Eds.), *op cit.* hal 128

dari negara Arab miskin dan juga dari Eropa, dipekerjakan pada berbagai proyek Libya. Pada 1975, 42% dari angkatan kerja yang ada bukan orang Libya asli.

Tidak mengherankan jika Khadafy menjadi demikian populer dengan sebutan sebagai pembangun kesejahteraan baru bagi rejimnya. Bukan karena hal ini jika banyak orang ingin memperoleh kesempatan yang lebih banyak untuk melakukan kritik; sensor sedemikian ketat sengaja dilakukan, penentang-penentang yang dicurigai oleh rejim diancam dengan kekerasan; walaupun jumlah mereka tidak lebih banyak dari kebanyakan negara-negara lain di wilayah itu. Pada Agustus 1971,⁵¹ Raja Idris dan 107 orang politisi dan birokrat terdahulu diadili, kebanyakan ***in absentia*** atas tuduhan korupsi,; Idris adalah contoh dari mereka yang dihukum mati *in absentia*, dan 76 orang pengikutnya dipenjarakan.

Meskipun demikian, pada 1973, Khadafy juga menghadapi beberapa masalah internal. Persatuan Arab Sosialis gagal menarik jumlah anggota yang cukup untuk dijadikan landasan kekuatannya, dan ada sejumlah pertanda mengenai oposisi yang sedang tumbuh di dalam tubuh DKR – dewan pelaksana harian pemerintahan Libya terhadap nasionalisme radikal Khadafy. Dalam hal ini Khadafy menanggapinya dengan terus-menerus melakukan ofensif. Pada April 1973,⁵² dia menyerukan “revolusi kebudayaan untuk menghancurkan ideologi-ideologi impor, baik dari Timur ataupun dari Barat” dan menciptakan suatu masyarakat yang berlandaskan pada ajaran Al Qur’an. Semua individu yang secara politis “sakit” harus dibersihkan, dan seluruh buku impor harus dimusnahkan, termasuk yang mempropagandakan Ateisme dan Komunisme. Senjata harus dibagikan kepada “massa revolusioner” guna melindungi revolusi. Penggerak revolusi kebudayaan ini adalah “Komite Rakyat”, terdiri dari 16-20 orang, dengan kekuasaan untuk menyingkirkan para birokrat dan manajer cukup dengan alasan tidak dapat dipercaya secara politis, kemalasan dan ketidakmampuan. Pada

⁵¹ Ibid, hal 129

⁵² Ibid, hal 130

akhir Juni 1973, rejim Libya mengklaim bahwa sekitar 1.800 komite telah dibentuk.

Tujuan yang dinyatakan dalam revolusi kebudayaan tersebut tidak hanya untuk merombak masyarakat Libya. Pada Mei 1973, Khadafy menyatakan tentang Teori Universal Ketiga, yang didasarkan pada Al Qur'an, merupakan :

Jalan bagi seluruh umat manusia di dunia yang membenci Kapitalisme Materialis dan Komunisme Ateis. Jalan bagi semua orang di dunia yang membenci konfrontasi berbahaya antara Pakta Warsawa dan Persekutuan Militer Atlantik Utara (NATO)..... Ini juga untuk semua orang yang menentang pemerintahan Fasis yang membangun struktur mereka di atas reruntuhan bangsa-bangsa lain, seperti Israel yang merebut tanah bangsa Palestina serta tetangganya. Dan ini untuk semua orang yang mendukung hak-hak bangsa kecil untuk menikmati hak kemerdekaan pemberian Tuhan, dan sejumlah bangsa yang diperbudak oleh Soviet Rusia.⁵³

3.2.3 Tujuan dan Hubungan Politik Luar Negeri Libya (Khadafy)

Di bidang politik luar negeri, Khadafy sangat aktif memberikan dukungan (bantuan) – terutama – finansial pada apa yang ia sebut sebagai “gerakan-gerakan pembebasan” di sejumlah negara lain, seperti faksi-faksi radikal di tubuh PLO, MNLF (Philipina), dan Tentara Republik Irlandia (IRA). Setiap tahunnya Khadafy juga mengadakan “konferensi gerakan-gerakan pembebasan sedunia” di ibukota Libya, Tripoli.⁵⁴

Sementara itu sebagai konsekuensi permusuhannya terhadap AS, Khadafy menjalin persekutuan dengan Uni Soviet. Pada tahun 1970, untuk pertama kalinya Moskow mengirim senjata ke Libya, dan dua tahun kemudian (Februari 1972) “orang kuat kedua Libya”, Abdul Salam Jalloud, menjadi pemimpin Libya pertama yang mengunjungi Soviet.

⁵³ Loc cit.

⁵⁴ M. Riza Sihbudi, op cit., hal 93

Setelah itu, pada tanggal 15 Mei 1974, kedua negara menandatangani perjanjian di bidang militer.⁵⁵

Meskipun menjalin persekutuan yang erat dengan Kremlin, Khadafy menegaskan bahwa Libya tidak berdiri di pihak Uni Soviet atau Amerika. Bagi Khadafy, mereka yang mendukung perjuangan bangsa Palestina, merupakan sahabat Dunia Arab termasuk Libya. Sebaliknya, mereka yang mendukung Zionis Israel, akan dianggap sebagai musuh. Persekutuan Libya-Soviet, seperti ditulis Dr. Anderson, lebih didasarkan pada persamaan kepentingan, yaitu mencegah meluasnya pengaruh AS di kawasan Timur Tengah.

Selanjutnya, untuk mewujudkan obsesinya tentang "persatuan Arab", Khadafy pernah berusaha – kendatipun akhirnya gagal – membuat federasi dengan sejumlah negara Arab. Diantaranya dengan Mesir (1960-1970 dan 1973), Suriah (1969-1970 dan 1980), Sudan (1969-1970), Tunisia (1974), Chad (1980-1981), dan terakhir dengan Maroko (1985-1986). Dalam hal "persatuan Arab" ini, ia memang sangat dipengaruhi gagasan mendiang Presiden Mesir, Gammal Abdul Nasser, tentang "nasionalisme Arab". Bahkan, menurut Dr. Anderson, "Khadafy lebih Nasseris daripada Nasser sendiri."

Sebagai seorang yang teguh terhadap prinsip-prinsip yang diyakininya, Khadafy tampak tidak pernah jera untuk terus berusaha merealisasikan apa yang menjadi obsesinya. Setelah gagal mengadakan federasi dengan sejumlah negara Arab, ia kemudian membentuk aliansi taktis bersama Iran, Suriah, Aljazair dan Yaman Utara, yang ia sebut sebagai "fron anti-Barat". Dan, untuk aliansi ekonomi, ia menggabungkan negaranya ke dalam organisasi Persatuan Arab Maghreb (Union Maghrebine Arabe) bersama Tunisia, Aljazair, Maroko dan Mauritania. UMA dibentuk pada 17 Februari 1989.⁵⁶

Dalam kesempatan ini penulis mencoba untuk menyebutkan beberapa petualangan Khadafy dalam menjalin hubungan dengan

⁵⁵ Lisa Anderson, "Qaddafi and the Kremlin", dalam *Problems of Communism* (September-Oktober 1965), dalam loc.cit.

⁵⁶ "Unity of the Maghreb Front", South (September 1989) dalam loc.cit.

negara-negara di Timur Tengah dan Afrika sebagai implementasi hubungan politik luar negeri Libya (Khadafy). Diantaranya adalah Mesir, Tunisia, Palestina, Suriah, Chad dan Sub-Sahara Afrika.

a. MESIR

Hubungan dengan Mesir menjadi tegang semenjak akhir 1973 dan semakin buruk lagi pada perang 1977. Kunjungan Sadat ke Israel pada November 1977 dikecam dengan pedas oleh Tripoli, dan pada Desember berikutnya Khadafy menjadi tuan rumah pertemuan puncak Arab yang menolak kebijaksanaan-kebijaksanaan perdamaian Sadat dengan Israel.⁵⁷ Ketika Sadat menandatangani perjanjian Camp David pada Maret 1979, ada laporan mengenai gerakan pasukan-pasukan Libya di sepanjang perbatasan Mesir. Setelah itu, Khadafy melakukan tindakan walk-out (meninggalkan sidang) pada pertemuan puncak Arab di Baghdad sambil mencela sanksi-sanksi setengah hati terhadap Mesir yang dipertimbangkan oleh pemimpin-pemimpin Arab lainnya. Hubungan Libya-Mesir membeku hingga saat ini.

b. TUNISIA

Hubungan dengan Tunisia agak bervariasi. Pada 1976, setelah Tunisia menuduh Libya terlibat dalam percobaan kudeta, para pekerja asal Tunisia diusir keluar dari Libya. Terdapat perselisihan antara kedua negara ini mengenai hak pengelolaan hasil tambang lepas pantai. Segera setelah perselisihan tersebut berhasil diselesaikan, Khadafy mengusulkan terbentuknya federasi yang mencakup Libya, Tunisia dan Aljazair. Tunisia menolak usulan ini dan sekali lagi hubungan kedua negara menjadi memburuk. Pada bulan Januari 1980 terjadi serangan gerilya anti pemerintah terhadap kota tambang Tunisia, Gafsa. Pemerintah Tunisia menuduh keterlibatan Libya dalam peristiwa ini, walaupun disangkal oleh Khadafy. Pemerintah Perancis mengirimkan bantuan militer bagi Tunisia, yang diikuti dengan pembakaran Kedutaan Besar Perancis di Tripoli dan Konsulatnya di Benghazi oleh para demonstran yang berang atas apa yang disebut sebagai intervensi

⁵⁷ Mary Kaldor dan Paul Anderson (Eds.), *op.ci.*, hal 136

Perancis. Pada tahun 1982, hubungan kedua negara membaik kembali. Khadafy mengunjungi Tunisia dan kedua negara menandatangani suatu perjanjian kerjasama. Tetapi, pada akhir 1985, hubungan kedua negara kembali memburuk setelah Khadafy mengusir 30.000 pekerja asal Tunisia.⁵⁸

c. PALESTINA

Khadafy bukanlah seorang aktor utama dalam kancah politik Palestina, tetapi retorikanya yang selalu militan membuatnya agak terkucil dari kepemimpinan Palestina. Khadafy cenderung mendukung kelompok-kelompok ekstrim dalam PLO, daripada menopang organisasi utamanya, FATAH,. Pada tahun 1980, timbul keretakan serius antara Khadafy dan Yasser Arafat, pemimpin Fatah. Khadafy menuduh Arafat lebih memilih cara diplomasi dibandingkan dengan perjuangan bersenjata. Perselisihan ini mereda pada tahun 1981, tetapi pada tahun 1982 hubungan Khadafy dan Arafat memburuk kembali, karena dukungan Libya terhadap kelompok sempalan PLO yang dipimpin oleh Abu Musa. Pada bulan-bulan terakhir ini, hubungan Libya dan aliran utama dalam PLO, Fatah, kembali membaik.⁵⁹

d. SURIAH

Hubungan Khadafy dengan Suriah tidak sebaik yang diperkirakan walaupun keduanya sama-sama mengecam keras Mesir dan PLO dan keduanya mendukung Iran dalam Perang Teluk I. Tidak seperti rejim Arab lainnya, Khadafy tetap mengkhawatirkan sekulerisme rejim Suriah, sementara itu Suriah tidak menyukai keinginan pemimpin-pemimpin Libya untuk memegang tampuk kepemimpinan Dunia Arab. Pada bulan September 1980, Khadafy mengajukan tawaran bersatu dengan Suriah, tetapi Suriah menolak tawaran Libya tersebut.

e. CHAD dan SUB-SAHARA AFRIKA

Intervensi Khadafy di Chad didorong oleh keinginan yang sama dengan yang mendorong usaha-usahanya menyatukan Libya dengan negara-negara Arab lainnya. Dia yakin bahwa negara-negara Sub-Sahara

⁵⁸ Ibid, hal 137

⁵⁹ Ibid, hal 138

Afrika yang beragama Islam dapat membentuk sebuah Republik Islam yang besar. Dia mendukung gerilyawan POLISARIO melawan Pemerintah Maroko di Sahara Barat sejak awal 1970-an, walaupun pada Juni 1983, guna memaksa Hassan untuk tidak mengirim pasukan ke Chad dalam rangka mendukung Habie, dia menghentikan dukungannya bagi POLISARIO dan memperbaiki hubungan dengan Hassan dengan menandatangani perjanjian persahabatan pada tahun 1984. Khadafy mendukung kelompok oposisi MALIAN, baik dengan dana maupun secara militer. Pada tahun 1979, dia membiayai dan melatih gerilyawan Islam fundamentalis yang bergerak di Senegal. Pada tahun 1980, dia mengalihkan perhatiannya kepada Gambia, tempat dia melatih dan membiayai gerilyawan Islam. Selain itu juga terdapat bukti bahwa Khadafy mendukung kudeta yang dilakukan oleh Jerry Rawling pada tahun 1981 di Ghana, walaupun akhir akhir ini dia mengecam rejim Ghana. Dengan pengecualian terhadap POLISARIO (dalam banyak hal gerilyawan ini lebih mengandalkan dukungan Aljkazair daripada Libya), tidak satupun dari usaha-usaha membuat kegoncangan ini yang berhasil. Karena perencanaan yang dilakukan dengan kasar itu tak dapat ditutupi, pemerintah-pemerintah yang sedang mempunyai masalah tersebut adakalanya memutuskan hubungan diplomatik dengan Libya dan mengusir orang-orang Libya dengan tuduhan subversif.

Diberbagai tempat di Afrika, intervensi Libya hampir semuanya tidak konsekuen. Khadafy memberikan dukungan pada rejim Idi Amin di Uganda, dimana tentara Libya gagal untuk mencegah penyingkiran Idi Amin pada 1979. Libya juga memberi bantuan pada golongan Nasionalis Eritrea dalam melawan rejim yang didukung Uni Soviet sebagaimana juga yang dilakukan oleh AS, demikian juga pada kelompok-kelompok anti-pemerintah di Kenya.⁶⁰

⁶⁰ Ibid, hal 139-140

f. PERANG IRAK-IRAN

Libya mendukung Iran dalam Perang Teluk semenjak 1980-an, dan menjadi pemasok senjata yang utama bagi Iran. Hal ini semakin mendorong pengisolasian Libya dari Dunia Arab.

Dengan melihat penjelasan diatas, ada beberapa hal yang menonjol dalam politik luar negeri Libya yang perlu kita catat. **Pertama**, Libya merupakan negara yang sampai sekarang paling antusias dalam mempropagandakan persatuan Arab. Semua keinginan Khadafy untuk melihat integrasi negara-negara Arab sampai dewasa ini tetap merupakan "wishfull thinking", belum pernah menjadi kenyataan. Khadafy, Nasser dan Numeiri pernah mengeluarkan Piagam Tripoli 1969 yang menyatakan akan dibentuknya federasi Libya-Mesir-Sudan.⁶¹ Piagam ini tidak pernah diwujudkan. Setelah Nasser meninggal, pada bulan November 1971, Khadafy, Sadat dan Numeiri mengumumkan akan didirikannya federasi Libya-Mesir-Sudan, bahkan Hafiz Asad dari Suriah menyatakan negaranya akan bergabung dalam federasi ini. Rencana diatas tidak ada yang terwujud, sehingga pada Agustus 1972 Libya dan Mesir bermaksud untuk membentuk federasi sendiri. Namun perang 1973 menggagalkan rencana tersebut. Setelah kegagalan ini, Libya mencoba melakukan integrasi dengan Tunisia. Baik Khadafy maupun Baunguiba telah menyatakan akan dibentuknya Republik Arab Islam sebagai negara hasil integrasi Libya dan Tunisia. Oposisi dalam negeri Tunisia akhirnya menggagalkan rencana tersebut.

Kedua, Libya dibawah Khadafy bersikap tidak kenal kompromi terhadap Israel. Khadafy mengutuk keras Zionisme sebagai nasionalisme rasis dan agresif serta mendambakan eliminasi Israel dari Timur Tengah. Ia juga menentang setiap bentuk perundingan Arab-Israel. Hanya saja perlu dicatat bahwa retorika Khadafy terlalu melambung dibandingkan dengan kontribusi Libya dalam pemecahan konflik Arab-Israel dan pembelaannya bagi rakyat Palestina. Libya memang memberikan dukungan finansial, moral dan politik pada PLO, namun tidak

⁶¹ M. Amien rais, *Diktat Kuliah Politik Pemerintahan Timur Tengah*, FISIP-UGM, Yogyakarta, 1983, hal 156

mengirimkan sebuah pasukan pun ke medan pertempuran perang 1973. Libya hanya memainkan peranan kecil-kecilan dalam embargo minyak Arab ke Barat pada 1973-1974.⁶²

Ketiga, hubungan Libya dengan kedua super power (AS dan US) seharusnya seimbang berdasarkan prinsip "Non-alignment" yang dianut oleh Libya. Dalam kenyataannya Libya lebih dekat ke Moskow daripada Washington. Khadafy berkunjung ke Soviet pada tahun 1977 dan 1981. Belanja militer Libya dari Uni Soviet cukup spektakuler. Pada akhir 1980 persenjataan dari Soviet yang dibeli oleh Libya telah melampaui 12 milyar dolar, sehingga rasio antara 55 ribu angkatan bersenjata Libya dengan peralatan militernya termasuk yang tertinggi di Dunia Ketiga.⁶³ Jika Uni Soviet memelihara hubungan akrab dengan Libya, Amerika dibawah Reagan nampaknya malah mengambil politik konfrontasi terhadap Libya. Sebagai misal latihan perang-perangan Angkatan Laut (AL) Amerika dengan Mesir dan Sudan secara sengaja diadakan di perairan Libya, sehingga pertempuran udara tidak mungkin dihindarkan antara pesawat-pesawat Libya dengan Amerika. Barangkali Reagan ingin menunjukkan bahwa politik luar negeri Khadafy di Timur Tengah maupun sikap anti-imperialis Libya tidak dapat ditolerir oleh Amerika.

⁶² Ibid, hal 157

⁶³ Ronald St. John, "Libya's Foreign and Domestic Policies", Current History, Desember 1981, P. 427 dalam ibid, hal 158

BAB V KESIMPULAN

Dengan berdasarkan uraian yang telah penulis paparkan pada bab-bab sebelumnya, bahwa Amerika Serikat (AS) menuduh Libya sebagai dalang (otak) terorisme internasional dikarenakan sebab-sebab politis yang hanya berdasarkan pada subyektivitas Amerika berkaitan dengan kepentingan AS terhadap kawasan Timur Tengah pada umumnya, dan terhadap negara Libya itu sendiri pada khususnya. Sehingga apa yang disebut sebagai "bukti-bukti tak terbantahkan" maupun suatu proses pengadilan, pada hakekatnya tidak lebih dari sekedar alat politik AS guna menunjukkan bahwa dialah (AS) yang selalu benar, sementara kesalahan selalu menjadi milik Libya.

Tuduhan dan serangan Amerika Serikat atas Libya yang diduga sebagai dalang ataupun pendukung aksi terorisme internasional tersebut disikapi sebagai :

1. Tidak lebih dari sekedar kampanye disinformasi yang dilakukan Washington terhadap Libya. Hal ini terlibat dari reaksi PBB yang "membiarkan" aksi Amerika Serikat beserta sekutu utamanya (Inggris dan Perancis) terhadap Libya, kendati jelas-jelas hal tersebut merupakan tindak pelanggaran terhadap kedaulatan sebuah negara merdeka.
2. Politik Agresi Amerika Serikat terhadap Libya dimaksudkan untuk mempertahankan posisinya sebagai satu-satunya negara adi kuasa. Keruntuhan Uni Soviet sebagai super power, telah membuat Amerika Serikat semakin menjadi-jadi untuk berusaha memaksakan "**tata dunia baru**" (**New World Order**) yang tentu saja, sesuai dengan kehendak AS sendiri.
3. Agresi terhadap Libya dapat dilihat sebagai bukti ketidakpedulian Amerika Serikat terhadap keadilan dan perdamaian di dunia. Rakyat di Timur Tengah menganggap Amerika Serikat menjalankan terorisme negara dengan

mangatasnamakan memerangi terorisme internasional. Hal ini menunjukkan secara jelas tindak-tanduk Amerika Serikat yang semakin tidak terkontrol. Karena, Amerika Serikat yang didukung sepenuhnya oleh Inggris dan Perancis, mengaku memiliki bukti-bukti keterlibatan Libya dalam kasus peledakan pesawat penumpang sipil, tetapi disisi lain justru menolak suatu pengadilan independen atau Mahkamah Internasional. Logikanya, jika Amerika Serikat dan para sekutunya benar-benar memiliki bukti-bukti semestinya mereka tidak akan menolak suatu pengadilan independen.

4. Menurut pandangan Arab, bahwa serangan dan tuduhan Amerika Serikat terhadap Libya merupakan contoh lain dari ketidaksenangan Amerika terhadap bangsa-bangsa Arab. Dunia Arab mengatakan bahwa dengan tindakan itu pemerintah Amerika Serikat telah menaikkan pamor Khadafy di kalangan negara Arab dan Dunia Islam. Seperti ditulis oleh Sulaiman Ferali dalam sebuah artikel utamanya pada Al-Sayyad, sebuah majalah yang pandangannya tidak kiri: "bahwa pandangan Amerika tentang dunia adalah yang paling arogan dan ini ditujukan terhadap bangsa Arab dan Islam. Ini merupakan sikap kaum rasis dan mungkin merupakan rahasia nyata yang melengkapi pandangan kebijaksanaan Amerika Serikat."

Jadi, dari apa yang telah diuraikan, dapat disimpulkan bahwa tuduhan yang dilancarkan Amerika Serikat dengan dukungan Inggris dan Perancis kepada Muammar Khadafy sebagai dalang dan pendukung terorisme internasional, pada hakekatnya bersifat sangat subyektif, stereotipe, dan cenderung semena-mena. Jika sang teroris seperti Khadafy harus dihukum, maka rezim Israel sebagai sang "dewa teroris" pun seharusnya mendapat perlakuan yang sama.

DAFTAR PUSTAKA

a. Sumber dari Buku-buku Literatur

- Chomsky, Noam, 1991, **Menguak Tabir Terorisme Internasional**, Mizan, Bandung
- Dahrendorf, Ralf, 1959, **Class and Class Conflict in Industrial Society**, Stanford University Press, Stanford California
- Daugherty, James E., and Pfalzgraf Jr., Robert L., 1971, **Contending Theories of International Relations**, The John Hopkins University
- Frankel, Joseph, 1990, **Hubungan Internasional**, ANS Sungguh Bersaudara, Jakarta
- Hasnan Habib, 1997, **Kapita Selekta: Strategi dan Hubungan Internasional**, CSIS, Jakarta
- H. Lukman Saksono dan M. Puspa Heryadi, 1988, **Amerika Serikat, Inggris, Yahudi dan Terorisme Internasional**, PT. Cendekia Jaya Utama, Bandung
- Holsti, KJ., 1988, **Politik Internasional, Suatu Kerangka Analisis Jilid 2**, Erlangga, Jakarta
- Kaldor, Mary dan Anderson, Paul, Juni 1987, **Serangan AS ke Libya: Negara Berdaulat Dibantai**, MD Press, Jakarta
- Kartini Kartono, 19 , **Pengantar Metodologi Research**, CV. Rajawali Pers, Jakarta
- Korany, B., Noble, P., and Brymen, R., (eds.), 1993, **The Many Faces of National Security in the Arab World**, St. Martins Press, New York
- Lenczowski, George, dan Bixby, Asgar, 1992, **Timur Tengah Di Tengah Kancan Dunia**, Sinar Baru Algesindo, Bandung
- M. Amien Rais, 1983, **Diktat Kuliah Politik Pemerintahan Timur Tengah**, FISIP-UGM, Yogyakarta
- Marzuki, 1980, **Metodologi Research**, Yayasan Penerbitan Fakultas Psikologi Gadjah Mada, Yogyakarta
- Mc Clelland, Charles A., 1971, **Ilmu Hubungan Internasional: Sistem dan Teori**, CV. Rajawali Pers, Jakarta

- Mochtar Mas'ood, 1990, **Ilmu Hubungan Internasional: Disiplin dan Metodologi**, LP3ES, Jakarta
- M. Riza Sihbudi, 1991, **Bara Timur Tengah**, Mizan, Bandung
- _____, 1997, **Timur Tengah, Dunia Islam dan Hegemoni Amerika**, Pustaka Hidayah, Jakarta
- Noleng, Qystein, 1983, **Minyak dalam Politik, Upaya Mencapai Konsensus Internasional**, CV Rajawali Pers, Jakarta
- Ramlan Surbakti, 1992, **Memahami Ilmu Politik**, PT Gramedia Widiasarana Indonesia, Jakarta
- R. Suprpto, 1997, **Hubungan Internasional: Sistem, Ineraksi dan Perilaku**, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Suharsimi Arikunto, 1977, **Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik**, PT Bina Aksara, Jakarta
- Sutrisno Hadi, 1980, **Metode Research**, Penerbitan Fakultas Psikologi UGM, Yogyakarta
- Tan, Melly G., 19____, **Metode dan Penelitian Masyarakat**, PT Gramedia, Jakarta
- Wardlaw, Grant, 1982, **Political Terrorism: Theory, Tactics and Counter Measures**, Cambridge University Press, London
- WJS Poerwodarminto, 1976, **Kamus Bahasa Indonesia**, PN Balai Pustaka, Jakarta
- Winarno Surachmad, 1970, **Dasar-dasar dan Tehnik Research: Pengantar Metodologi Ilmiah**, CV Tarsito, Bandung
- _____, 1976, **Pengantar Metode Research**, PN Alumni, Bandung

b. Sumber dari Jurnal dan Laporan-laporan

- GLOBAL, Jurnal Politik Internasional Jilid 2, 1991, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta
- Jurnal Ekonomi Politik Timur Tengah: Faktor Minyak, Agustus 1976, PPWI-LIPI, Jakarta

c. Sumber dari Surat Kabar

- Kompas, 22 Desember 1988

Suara Pembaharuan, 22 Desember 1988

Kompas, 23 Desember 1988

Merdeka, 23 Desember 1988

Pelita, 23 Desember 1988

Pelita, 24 Desember 1988

Kompas, 5 Januari 1989

Suara Pembaharuan, 5 Januari 1989

Kompas, 6 Januari 1989

Pelita, 6 Januari 1989

AB (Angkatan Bersenjata), 7 Januari 1989

Kompas, 9 Januari 1989

Pelita, 20 April 1989

Pelita, 3 Januari 1991

Kompas, 4 Mei 1992

Kompas, 22 Agustus 1995

Suara Karya, 5 Agustus 1996

Suara Pembaharuan, 19 Agustus 1996

